

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Triwulan III - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Padang**

BANK INDONESIA PADANG
SEKSI STATISTIK DAN KAJIAN EKONOMI MONETER
Jl. Jend.Sudirman No. 22 Padang
Telp.0751-31700
Fax. 0751-27313

KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara triwulanan sebagai salah satu produk/output Bank Indonesia Padang. Dalam terbitan ini dibahas beberapa materi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam merencanakan dan menerapkan kebijaksanaan moneter.

Cakupan materi dan sistematika pelaporan pada terbitan ini mengacu pada Petunjuk Umum Penelitian dan Pelaporan Ekonomi Regional serta format pelaporan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Pada dasarnya yang dibahas adalah materi yang terkait langsung dengan tugas Bank Indonesia antara lain : perkembangan inflasi regional, kondisi ekonomi makro regional, perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran regional, serta prospek perekonomian daerah. Data yang dianalisis adalah data triwulan III-2006 yang bersumber dari laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Sumatera Barat, dan lain-lain.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya terbitan ini.

Padang, November 2006

ttd

C.Y. Boestal
Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI	7
1.1. Umum	7
1.2. PDRB Dari Sisi Permintaan	8
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga/Masyarakat	9
1.2.2. Konsumsi Pemerintah	10
1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi	11
1.2.4. Ekspor - Impor	13
1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran	16
1.3.1. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	17
1.3.2. Sektor Industri Pengolahan	18
1.3.3. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran	19
1.3.4. Sektor Pengangkutan & Komunikasi	21
1.3.5. Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	21
1.3.6. Sektor Jasa-jasa	22
1.4. Kondisi Ketenagakerjaan	23
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	24
2.1. Umum	24
2.2. Realisasi Pendapatan Daerah	24
2.3. Realisasi Pengeluaran/Belanja Daerah	25
BAB 3 INFLASI	29
3.1. Umum	29
3.2. Determinan Inflasi	30
3.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota Di Provinsi Tetangga	31
3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa	34
3.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi terbesar	39

BAB 4	PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	41
4.1.	Perkembangan Perbankan	41
4.1.1.	Perkembangan Bank Umum	42
4.1.1.1.	Total Assets	42
4.1.1.2.	Penghimpun Dana	43
4.1.1.3.	Penyaluran Kredit	45
4.1.1.4.	Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas	47
4.1.1.5.	Penyaluran Kredit Usaha Mikro	49
4.1.2.	Perkembangan BPR	50
4.2.	Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah	51
4.2.1.	Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga	52
4.2.1.1.	Resiko Kredit Korporasi	52
4.2.1.2.	Resiko Kredit Rumah Tangga	53
4.2.2.	Asesmen Perbankan	54
4.2.2.1.	Resiko Kredit	54
4.2.2.2.	Resiko Likuiditas	54
4.2.2.3.	Resiko Pasar	55
4.3.	Perkembangan Sistem Pembayaran	55
4.3.1.	Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	55
4.3.1.1.	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar	55
4.3.1.2.	Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	56
4.3.1.3.	Perkembangan Temuan Uang Palsu	57
4.3.2.	Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai	55
4.3.2.1.	Perkembangan Kliring Lokal	57
4.3.2.2.	Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)	57
BAB 5	PROSPEK PEREKONOMIAN	59
5.1.	Prospek Ekonomi	59
5.2.	Prospek Kegiatan Usaha Perbankan	60
5.3.	Proyeksi Inflasi	61

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 8
Tabel	1.2.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 9
	1.3.	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan 9
Tabel	1.4.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Sumatera Barat 12
Tabel	1.5.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Sumatera Barat . 12
Tabel	1.6.	Realisasi Komoditi Ekspor Non Migas Utama 13
Tabel	1.7.	7 Negara Tujuan Utama Ekspor Non Migas 14
Tabel	1.8.	Realisasi Komoditi Impor Non Migas Utama 15
Tabel	1.9.	7 Negara Utama Asal Impor Non Migas 15
Tabel	1.10.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 16
Tabel	1.11.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 17
Tabel	1.12.	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi 17
Tabel	1.13.	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 23
Tabel	2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat 27
Tabel	3.1.	Perkembangan Inflasi Inti, Administered dan Food Kota Padang 31
Tabel	3.2.	Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang 33
Tabel	3.3.	Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kelompok Barang 34
Tabel	3.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan 35
Tabel	3.5.	Perkembangan Inflasi Kelompok Makan Jadi 36
Tabel	3.6.	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan 36
Tabel	3.7.	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi 37
Tabel	3.8.	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan 37
Tabel	3.9.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan 38
Tabel	3.10.	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang 38
Tabel	3.11.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang 39
		40

Tabel	3.12.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang	
Tabel	4.1.	Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum	43
Tabel	4.2.	Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Pengguna	43
Tabel	4.3.	Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu	44
Tabel	4.4.	Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum	45
Tabel	4.5.	Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana	45
Tabel	4.6.	Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	46
Tabel	4.7.	Sebaran kredit bank Umum dan LDR Berdasarkan Lokasi Proyek	47
Tabel	4.8.	Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum	48
Tabel	4.9.	Sebaran NPLs Bank Umum Per Penggunaan dan Sektoral	48
Tabel	4.10.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	48
Tabel	4.11.	Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum Menurut BakiDebet.....	49
Tabel	4.12.	Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi	49
Tabel	4.13.	Sebaran NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektoral	50
Tabel	4.14.	Indikator Perkembangan BPR	51
Tabel	4.15.	Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong	57
Tabel	4.16.	Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang	58

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sumatera Barat 7
Grafik	1.2.	Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini 10
Grafik	1.3.	Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini 10
Grafik	1.4.	Outstanding Kredit Konsumsi 10
Grafik	1.5.	Realisasi Kredit Konsumsi Baru 10
Grafik	1.6.	Outstanding Kredit Investasi 11
Grafik	1.7.	Realisasi Kredit Investasi Baru 11
Grafik	1.8.	Luas Lahan dan Produksi Kare Sumater Barat 18
Grafik	1.9.	Luas Lahan dan Produksi Padi Sumatera Barat 11
Grafik	1.10.	Impor Bahan Baku dan Modal 19
Grafik	1.11.	Produksi dan Pemasaran Semen 19
Grafik	1.12.	Ekspor Impor Sumatera Barat 20
Grafik	1.13.	Kegiatan Bongkar Muat 20
Grafik	1.14.	Jumlah Kamar dan Tamu Hotel 20
Grafik	1.15.	Outstanding Kredit Sektor Penggunaan 20
Grafik	1.16.	Kapasitas da Pelanggan Telepon 21
Grafik	1.17.	Jumlah Penumpang Pesawat 21
Grafik	1.18.	Kinerja Bank Umum Sumatera Barat 22
Grafik	1.19.	Kinerja Lembaga Keuangan Non Bank 22
Grafik	1.20.	Outstanding kredit Sektor Jasa 22
Grafik	2.1.	Perkembangan Realisasi Pendapatan 25
Grafik	2.2.	Perkembangan Realisasi Belanja 26
Grafik	3.1.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (q-t-q) 29
Grafik	3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y) 30
Grafik	3.3.	Perkembangan Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (q-t-q) 32

Grafik	4.1.	Perbandingan kegiatan Usaha Perbankan Sumbar da Nasional TW -III-2006	41
Grafik	4.2.	Perkembangan Aktiva Bank Umum	42
Grafik	4.3.	Perkembangan Suku Bunga Simpanan	44
Grafik	4.4.	Perkembangan Suku Bunga Kredit	46
Grafik	4.5.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Kredit/Pembiayaan baru Tahun 2006	46
Grafik	4.6.	Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Prov. Sumatera Barat	52
Grafik	4.7.	Hasil Survei Konsumen : Indeks kondisi Ekonomi saat ini	52
Grafik	4.8.	Hasil Survei Konsumen : Indkes Keyakinan Ekspektasi Konsumen	53
Grafik	4.9.	Komposisi DP Menurut Jangka Waktu	54
Grafik	4.10.	Perkembangan Suku Bunga kredit dan NPLs di Sumatera Barat	55
Grafik	4.11.	Perkembangam Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar	56
Grafik	4.12.	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)	56
Grafik.	5.1.	Perkembangan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) TW. I-2005 s.d TW. III-2006	59
Grafik.	5.2.	Perkembangan Hasil Survei Konsumen: Okt 2005 – Sep 2006	60

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|---|---|
| Lampiran | 1 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Triwulanan 2005-2006 |
| Lampiran | 2 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Triwulanan 2005-2006 |
| Lampiran | 3 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Triwulanan Tahun 2005-2006 |
| Lampiran | 4 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Triwulanan Tahun 2005-2006 |
| Lampiran | 5 | Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Padang (2002=100) |
| Lampiran | 6 | IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa (Tahun Dasar 2002) |

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III - 2006

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh positif, sementara inflasi cenderung meningkat

Memasuki triwulan III-2006, perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan tersebut mengalami trend yang terus menurun sejak triwulan I-2006. Konsumsi yang menjadi motor penggerak perekonomian cenderung melambat dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekspor Sumatera Barat yang cukup baik, belum bisa mendongkrak kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kontribusi pemerintah daerah yang diharapkan dari belanja konsumsi dan belanja modal ternyata belum dapat diserap dengan baik oleh jajarannya.

Kondisi harga-harga di Sumatera Barat, yang diwakili kota Padang, diwarnai dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor utama inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan III-2006 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok makanan jadi dan kelompok pendidikan. Berdasarkan determinannya, inflasi inti maupun non inti, masih berada pada level 2 digit. Secara umum, masih tingginya inflasi non inti tersebut terutama dikarenakan masih dihitungnya dampak kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 yang lalu.

Kegiatan usaha perbankan daerah meningkat dan stabilitas keuangan daerah terjaga..

Kinerja perbankan di Sumbar pada triwulan III-2006 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang positif. Stabilitas sistem keuangan regional Sumbar selama triwulan laporan secara umum relatif terjaga. Hal ini terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang cukup terkendali, meskipun disertai dengan tekanan risiko kredit yang sedikit meningkat.

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan menunjukkan peningkatan transaksi tunai sementara itu transaksi non-tunai cenderung menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

KONDISI MAKROEKONOMI

Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 6,35% (y-o-y)

Meskipun perekonomian Sumatera Barat senantiasa mengalami pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan tersebut mengalami trend yang terus menurun sejak triwulan I-2006. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 6,35% (y-o-y), atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2006 yang tumbuh sebesar 6,60% (y-o-y). Namun secara triwulanan, pertumbuhan PDRB pada triwulan III-2006 lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2006, yaitu tumbuh sebesar 1,78% (q-t-q), sementara pada triwulan II-2006 tumbuh sebesar 1,33%.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan kontributor terbesar terhadap struktur PDRB Sumatera Barat, walaupun komposisinya berkurang apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pangsa konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan mencapai 54,39%, disusul pengeluaran pembentukan modal tetap bruto dengan pangsa sebesar 17,90%, ekspor netto sebesar 15,21% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,59%. Sementara pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya memiliki pangsa sebesar 0,91%.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif terjadi pada semua jenis penggunaan.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (y-o-y), di triwulan III-2006 pertumbuhan ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,21%, disusul kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 6,01%, konsumsi pemerintah sebesar 5,74%, pertumbuhan pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,98%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 3,70% (Tabel 1.2). Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan kuartalan (q-t-q), di triwulan III-2006

pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,38%, disusul kemudian konsumsi rumah tangga sebesar 1,32%, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 1,19%, net ekspor sebesar 1,16%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 0,62%.

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan III-2006 sebesar 24,90%. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 18,18%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,24%), sektor industri pengolahan (13,12%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,10%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (5,11%), sektor bangunan/konstruksi (4,96%), sektor pertambangan & penggalian (3,22%), dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 1,17%.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor ekonomi.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2006, dengan pertumbuhan mencapai 8,15% (*y-o-y*). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,96%, sektor industri pengolahan sebesar 6,40%, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,38%, sektor bangunan/konstruksi sebesar 6,12%, sektor listrik, gas & air sebesar 5,95%, sektor jasa-jasa sebesar 5,36% dan sektor pertambangan & penggalian sebesar 4,80%.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Realisasi penerimaan dinilai cukup baik dan sebaliknya dengan realisasi belanja.

Secara umum, realisasi pendapatan/penerimaan pada Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Prov. Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2006 dinilai cukup baik, walaupun Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi. Sementara itu, realisasi belanja/pengeluaran APBD Prov. Sumatera Barat justru dinilai tidak maksimal. Rendahnya realisasi belanja selain karena faktor pengesahan APBD yang terlambat juga berasal dari instansi/dinas di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat yang diduga tidak siap menyerap dana yang telah dialokasikan tersebut. Jumlah pendapatan yang lebih besar dari jumlah pengeluaran berdampak terhadap neraca APBD Prov. Sumatera Barat yang surplus.

Realisasi pendapatan melebihi 75% dari yang dianggarkan.

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III-2006 cukup baik yang melebihi angka 75% dari total perkiraan pendapatan, yaitu sebesar Rp787,43 miliar atau tepatnya mencapai 79,93% dari total total anggaran pendapatan (Grafik 2.1). Pendapatan tersebut antara lain bersumber dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp355,02 miliar (77,64% dari total anggaran), dan pos dana perimbangan sebesar Rp432,19 miliar (81,95% dari total anggaran).

Realisasi belanja baru mencapai 47% dari total anggaran.

Berbeda dengan realisasi pendapatan yang cukup baik, realisasi pengeluaran belanja daerah sampai dengan triwulan III-2006 bergerak lambat dan tidak maksimal yaitu baru mencapai Rp480,86 miliar atau 47,41% dari total anggaran belanja sebesar Rp1,01 triliun (Grafik 2.2). Realisasi belanja tersebut antara lain berasal dari pos belanja aparatur daerah sebesar Rp234,73 miliar (58,45% dari total anggaran), pos belanja pelayanan publik sebesar Rp162,42 miliar (40,54% dari total anggaran), pos belanja bagi hasil & bantuan keuangan sebesar Rp83,38 miliar (41,15% dari total anggaran), dan pos belanja tidak terduga Rp0,33 miliar (3,55% dari total anggaran).

INFLASI

Kota Padang pada triwulan III-2006 mengalami inflasi sebesar 0,93% (q-t-q).

Memasuki triwulan III-2006, tingkat harga-harga di Sumatera Barat, yang diwakili kota Padang, diwarnai dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi kota Padang pada triwulan III-2006 tercatat sebesar 0,93% (*q-t-q*). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,71% (*q-t-q*). Namun inflasi kota Padang tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan III-2006 yang tercatat sebesar 1,16% (*q-t-q*). Hingga September 2006, laju inflasi kota Padang mencapai 2,84% (*y-t-d*), lebih rendah dibandingkan laju inflasi

nasional yang tercatat sebesar 4,06%.

Sementara itu, perkembangan harga secara tahunan di kota Padang, pada triwulan III-2006 mengalami inflasi sebesar 14,41% (y-o-y). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,47% (y-o-y). Dibandingkan inflasi tahunan nasional triwulan III-2006 yang tercatat sebesar 14,55% (y-o-y), inflasi tahunan kota Padang sedikit lebih rendah.

Kelompok makanan jadi dan kelompok pendidikan mengalami inflasi tertinggi.

Faktor utama inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan III-2006 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok makanan jadi dan kelompok pendidikan. Kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,98% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,50%. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 5,46% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,31%. Pada triwulan laporan, terdapat pula kelompok barang/jasa yang mengalami deflasi yaitu kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 0,19%. Deflasi pada kelompok bahan makanan terjadi sejak triwulan I-2006.

Berdasarkan determinannya, inflasi kota Padang, baik inflasi inti maupun non inti, masih berada pada level 2 digit. Inflasi inti (*core inflation*) kota Padang tercatat sebesar 12,41% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 5,84%, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) sebesar 16,19% dengan sumbangan sebesar 8,57%. Secara umum, masih tingginya inflasi non inti tersebut terutama dikarenakan masih dihitungnya dampak kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 yang lalu.

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan usaha perbankan Sumatera Barat Tw.III-2006 tumbuh positif.

Indikator-indikator perbankan pada triwulan III-2006 menunjukkan perkembangan yang positif dan searah dengan indikator makroekonomi. Apabila dibandingkan dengan perbankan nasional, perkembangan kegiatan usaha perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) di triwulan III-2006 relatif lebih baik, terlihat dari pertumbuhan asset dan DPK yang dialami perbankan Sumbar, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada perbankan nasional. Total asset bank umum di Provinsi Sumbar pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp14.968 miliar, naik sebesar Rp986 miliar (7,05%) dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar pada triwulan III-2006 mencapai Rp10.522,1 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp771,7 miliar (7,91%) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Menurut jenis simpanan, semua jenis simpanan menunjukkan peningkatan, tertinggi dialami oleh tabungan sebesar 9,04%. Kemudian diikuti oleh giro dan simpanan berjangka yang masing-masing meningkat sebesar 8,05% dan 6,55%.

Nilai kredit yang disalurkan oleh bank umum untuk proyek yang berlokasi di Sumbar hingga posisi triwulan laporan mencapai Rp10.067,2 miliar, meningkat Rp201,8 miliar (2,05%) dibandingkan posisi triwulan II-2006. Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 0,35%. Pertumbuhan kredit tersebut seiring pula dengan tren penurunan suku bunga kredit yang sejalan dengan penurunan BI rate (diimplementasikan melalui suku bunga SBI tenor 1 bulan), dari 12,50% pada akhir triwulan II-2006 menjadi 11,25% pada akhir triwulan laporan. Berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan kredit terbesar yakni 21,29%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 19,55%. Sementara menurut jenis penggunaannya, kredit modal kerja mencatat pertumbuhan tertinggi (3,06%) diikuti oleh kredit konsumsi (2,00%) dan kredit investasi (0,72%).

Dengan pertumbuhan DPK yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit, nisbah kredit terhadap DPK di Sumbar sedikit turun, dari 101,2% pada triwulan III-2006 menjadi 95,7% pada periode laporan. Dalam hal kualitas kredit yang disalurkan, nisbah NPLs pada triwulan laporan masih relatif terjaga yaitu 4,95%, sedikit di atas nisbah NPLs triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 4,85%.

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank umum Sumbar pada triwulan III-2006 mencapai Rp6.332,1 miliar atau meningkat Rp280,3 miliar (4,63%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pangsa UMKM

bank umum di Sumbar mencapai 74,73% dari total kredit, sedikit lebih tinggi dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 73,56%. Pangsa UMKM bank umum di Sumbar mencapai 75,60% dari total kredit, sedikit lebih tinggi dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 74,73%. Berdasarkan kelompok baki debetnya, alokasi kredit terbesar disalurkan untuk usaha mikro dengan pangsa 40,25%. Sedangkan pangsa kredit berskala besar (korporat) sebesar 24,40%

Kegiatan usaha BPR Sumbar Tw.III-2006 lebih baik dibandingkan bank umum.

Secara umum, indikator-indikator perkembangan kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan bank umum. Total asset BPR di Sumbar pada triwulan III-2006 mengalami peningkatan sebesar 5,31%, menjadi Rp494,79 miliar (Tabel 4.14). Pada periode yang sama, posisi penghimpunan dana BPR tercatat sebesar Rp312,19 miliar atau naik 2,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan DPK, kredit yang disalurkan BPR juga mengalami peningkatan sebesar 7,78%, menjadi Rp380,47 miliar di triwulan III-2006. Dengan laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR BPR di Sumbar meningkat, dari 116,22% pada triwulan II-2006 menjadi 121,87% pada triwulan III-2006. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik. Selain itu, kualitas kredit yang disalurkan BPR juga mengalami perbaikan seperti terlihat dari penurunan nisbah kredit bermasalah (NPLs) BPR, dari 9,57% menjadi 8,95%

Stabilitas sistem keuangan daerah relatif terjaga.

Secara umum pada triwulan laporan, risiko-risiko yang dialami oleh sektor korporasi dan rumah tangga tidak menunjukkan perkembangan yang membahayakan. Sementara perbankan daerah mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat bersamaan dengan peningkatan kegiatan usaha pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Transaksi tunai menunjukkan peningkatan

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan memperlihatkan transaksi tunai masih mengalami net-inflow meskipun nilainya turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi menggunakan kliring dan RTGS secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Selama triwulan III-2006, aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (inflow) naik sebesar Rp521,7 miliar menjadi Rp2.352 miliar. Sementara itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (outflow) tercatat sebesar Rp1.472 miliar atau terjadi peningkatan sebesar Rp178,8 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, terjadi aliran uang kas masuk bersih (net-inflow) sebesar Rp880 miliar pada triwulan laporan, meningkat sebanyak Rp342 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penemuan uang palsu yang dilaporkan masyarakat melalui perbankan kepada BI Padang masih tergolong sangat kecil. Persentase nilai temuan uang palsu terhadap nilai uang kartal masuk (inflow) selama triwulan III-2006 sebesar 0,0001%, mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase temuan triwulan sebelumnya sebesar 0,00029%.

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami penurunan baik volume maupun nominalnya. Volume kliring turun 37,4% menjadi 103,4 ribu lembar dengan nilai transaksi menurun 24,2% menjadi Rp2.401,9 miliar. Sementara itu transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan III-2006 menunjukkan transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi naik sebesar 15,61% menjadi Rp9.363,9 miliar sementara volume transfer meningkat 10,20% menjadi 7.197 transaksi. Sedangkan untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi menurun sebesar 4,68% menjadi Rp8.568,1 miliar sementara volume transaksi turun 0,40% menjadi 8.236 transaksi.

PROSPEK PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Tw.IV-2006 diperkirakan lebih tinggi dibanding Tw.III-2006.

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran serta kondisi makro ekonomi nasional yang cukup stabil, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV-2006 diprediksikan mengalami pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2006. Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang

menunjukkan ekspektasi responden untuk kegiatan usaha di triwulan IV-2006 jauh lebih optimis dibandingkan realisasi kegiatan usaha pada triwulan laporan.

Sejalan dengan perkiraan peningkatan perekonomian Sumbar, kegiatan usaha perbankan pada triwulan IV-2006 berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan laporan. Perkiraan ini didukung oleh hasil survei kredit perbankan daerah yang menunjukkan permintaan kredit, permintaan kredit baru dan realisasi kredit baru pada triwulan IV-2006 akan meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2006. Perkiraan peningkatan kredit tersebut juga diproyeksikan searah dengan peningkatan DPK. Sementara itu, tren penurunan suku bunga DPK dan kredit diperkirakan akan berlanjut pada triwulan IV-2006.

*Inflasi Tw.IV-2006
diperkirakan lebih
tinggi dibanding
triwulan laporan.*

Dengan memperhitungkan pola tekanan inflasi yang akan mencapai puncaknya pada triwulan IV-2006 sehubungan dengan bulan Puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan (Grafik 5.3), laju inflasi kota Padang pada triwulan IV diprediksikan sekitar 2-3%. Dengan demikian laju inflasi kota Padang pada tahun 2006 akan berkisar 6 + 1%. Hasil tersebut juga didukung proyeksi inflasi menggunakan model ANP yang memperkirakan laju inflasi kota Padang tahun 2006 sebesar 5 – 6,9%.

**TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
SUMATERA BARAT**

INDIKATOR	2005				2006		
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III
MAKRO-EKONOMI REGIONAL							
Laju Inflasi (q-t-q)	6.80%	-1.32%	2.75%	11.25%	1.17%	0.71%	0.93%
Laju Inflasi (y-o-y)	12.56%	8.35%	11.64%	20.47%	14.13%	16.47%	14.41%
IHK Bahan Makanan (qtq)	12.70%	-5.45%	5.75%	10.43%	-1.34%	-2.35%	-0.83%
IHK Makanan Jadi (qtq)	4.12%	1.68%	2.61%	5.72%	5.43%	0.05%	2.98%
IHK Perumahan (qtq)	1.12%	0.07%	0.45%	8.22%	2.29%	4.82%	1.15%
IHK Sandang (qtq)	0.90%	0.47%	3.62%	4.23%	0.55%	5.28%	0.80%
IHK Pendidikan (qtq)	0.32%	-0.01%	0.37%	2.30%	0.11%	1.57%	0.32%
IHK Kesehatan (qtq)	0.08%	1.80%	0.92%	8.25%	5.52%	-0.18%	5.46%
IHK Transport (qtq)	13.50%	0.59%	0.58%	30.61%	0.48%	0.31%	0.10%
Pertumbuhan PDRB (q-t-q) *	1.15%	1.39%	1.98	1.94	1.21	1.33	1.78
Pertumbuhan PDRB (y-o-y) *	4.99%	5.19%	5.28	6.61	6.82	6.60	6.35
Ekspor (Ribu USD) **	140,593	172,715	225,139	178,723	205,987	174,694	292,472
Impor (Ribu USD) **	2,240	-	1,050	-	-	3,468	7,479
PERBANKAN (BANK UMUM)							
Aktiva (miliar Rp)	10,909.90	11,375.30	11,656.80	12,213.07	13,011.75	13,982.01	14,968.13
Deposito (miliar Rp)	2,274.85	2,396.05	2,654.26	2,785.10	3,114.56	3,250.82	3,463.80
Giro (miliar Rp)	1,573.85	1,836.62	2,060.73	2,265.00	2,582.21	2,899.05	3,132.30
Tabungan (miliar Rp)	2,851.97	2,808.52	3,533.88	3,906.10	3,415.94	3,600.62	3,926.10
DPK berdasarkan lokasi kantor penghimpun dana (miliar Rp)	7,703.02	8,027.52	8,248.87	8,956.30	9,112.70	9,750.48	10,522.10
Kredit Umum berdasarkan lokasi proyek (miliar Rp)	8,776.05	9,124.35	9,286.13	9,515.80	9,830.88	9,865.35	10,067.20
Kredit UMKM (miliar Rp)	5,012.76	5,269.86	5,352.86	5,608.23	5,779.05	6,051.82	6,332.10
Suku Bunga Kredit (rerata tertimbang akhir periode)	15.04	14.98	15.32	15.82	16.28	16.38	16.30
Suku Bunga Deposito I bin (rata2 tertimbang akhir periode)	6.13	6.36	7.73	10.08	10.37	10.19	9.88
NPLs	3.36%	3.39%	4.33%	3.73%	4.00%	4.85%	4.95%
NIM	2.69%	4.39%	6.65%	8.74%	2.28%	4.34%	6.21%
LDR	113.93%	113.66%	112.57%	106.25%	107.88%	101.18%	95.68%
SISTEM PEMBAYARAN							
Cash Inflow (miliar Rp)	1,825.50	1,477.04	1,912.46	2,323.11	1,927.09	1,830.39	2,352.00
Cash Outflow (miliar Rp)	1,059.50	946.85	1,280.58	1,483.94	1,259.38	1,292.89	1,472.00
PTTB (nominal, miliar Rp)	1,140.0	788.0	682.0	668.0	576.0	739.0	930.0
Volume Kliring (lembar)	160,438	161,213	176,707	166,567	158,752	165,132	103,371
Nominal Kliring (miliar Rp)	3,131.90	2,174.00	3,533.41	3,586.50	3,135.61	3,168.99	2,401.90
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH***							
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	93.70	223.44	329.33	448.299	105.57	236.82	355.02
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	82.50	144.37	206.24	247.49	159.01	278.27	397.52
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran APBD (miliar Rp)	46.18	248.15	468.05	766.42	54.17	261.10	480.86

Keterangan :

* Tw.III-2006 angka sangat sementara, mulai Tw.I-2005 digunakan tahun dasar 2000

** Tw.III-2006 angka sementara, *open file data*.

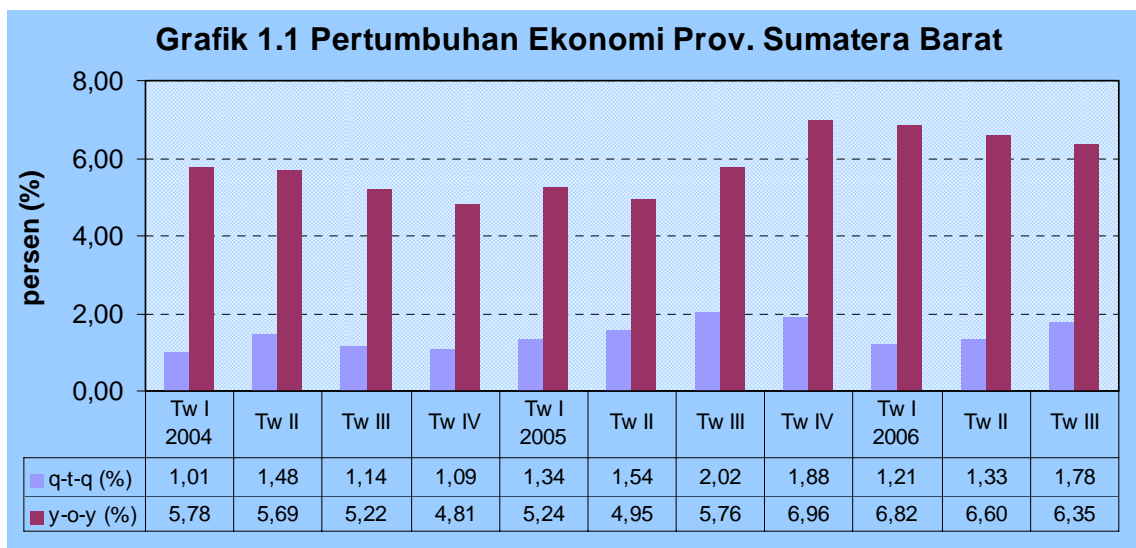
*** Posisi sampai dengan triwulan laporan.

BAB 1

Kondisi Makro Ekonomi Sumatera Barat

1.1. Umum

Meskipun perekonomian Sumatera Barat senantiasa mengalami pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan tersebut mengalami trend yang terus menurun sejak triwulan I-2006. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 6,35% (y-o-y), atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2006 yang tumbuh sebesar 6,60% (y-o-y). Namun secara triwulanan, pertumbuhan PDRB pada triwulan III-2006 lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2006, yaitu tumbuh sebesar 1,78% (q-t-q), sementara pada triwulan II-2006 tumbuh sebesar 1,33% (Grafik 1.1).



Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan III-2006 terjadi pada semua jenis penggunaan, dengan faktor pendorong utama masih berasal dari pertumbuhan ekspor. Konsumsi rumah tangga masih merupakan kontributor terbesar terhadap struktur PDRB Sumatera Barat, walaupun komposisinya berkurang apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Di sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Berdasarkan struktur ekonomi Sumatera Barat, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa masih merupakan sektor yang memiliki pangsa yang

cukup besar. Gabungan 4 sektor tersebut pada triwulan III-2006 telah mencapai 72,44% dari total PDRB Sumatera Barat.

1.2. PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tetap merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pangsa konsumsi rumah tangga mencapai 54,39%, disusul pengeluaran pembentukan modal tetap bruto dengan pangsa sebesar 17,90%, ekspor netto sebesar 15,21% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,59%. Sementara pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba hanya memiliki pangsa sebesar 0,91% (Tabel 1.1).

Tabel 1.1.
Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

dalam %

Jenis Penggunaan	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-
A. Makanan	35,11	35,06	35,29	35,15	35,17	35,05	34,83
B. Non Makanan	19,89	19,72	19,67	19,81	19,64	19,63	19,56
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94	0,92	0,91
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,79	11,70	11,71	11,74	11,71	11,66	11,59
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,14	18,03	18,04	18,10	18,01	17,98	17,90
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-	-
6 Net Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	14,14	14,54	14,35	14,26	14,52	14,75	15,21
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan tahunan ($y-o-y$), di triwulan III-2006 pertumbuhan ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,21%, disusul kemudian pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 6,01%, konsumsi pemerintah sebesar 5,74%, pertumbuhan pada pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,98%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 3,70% (Tabel 1.2). Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan kuartalan ($q-t-q$), di triwulan III-2006 pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,38%, disusul kemudian konsumsi rumah tangga sebesar 1,32%, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 1,19%, net ekspor sebesar 1,16%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 0,62% (Tabel 1.3).

Tabel 1.2.
Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

(y-o-y, dalam %)

Jenis Penggunaan	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	5,32	5,06	4,85	6,82	6,60	6,01
A. Makanan	3,82	5,41	6,03	4,56	7,55	7,04	6,08
B. Non Makanan	6,08	5,17	3,37	5,36	5,53	5,82	5,88
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	(1,12)	0,62	7,23	1,18	7,76	6,02	3,70
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,58	4,35	6,08	4,23	6,79	6,12	5,74
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,25	5,85	7,26	5,83	6,38	6,30	5,98
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-	-
6 Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	26,51	22,01	15,27	21,06	15,00	13,25	11,21
7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	17,46	21,92	34,96	21,58	25,03	17,12	9,85
	4,95	5,76	6,96	5,73	6,82	6,60	6,35

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

Tabel 1.3.
Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

(q-t-q, dalam %)

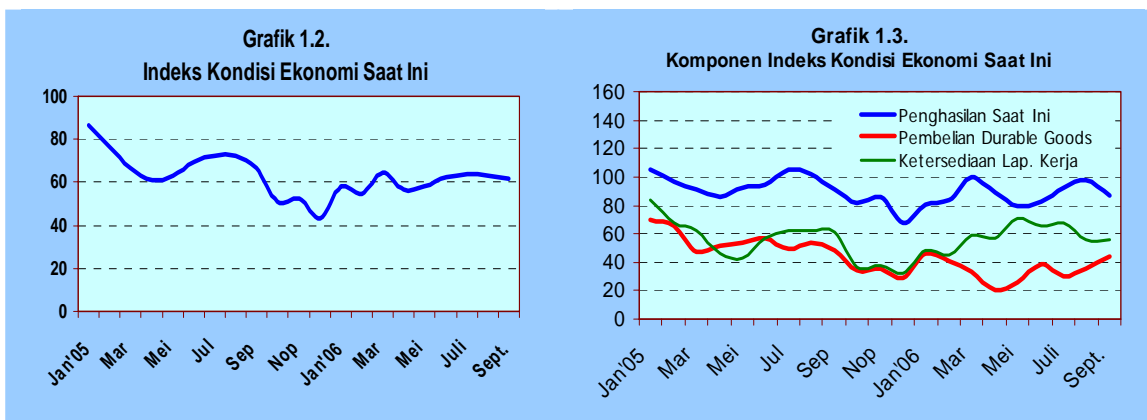
Jenis Penggunaan	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,44	1,89	2,16	4,85	1,17	1,23	1,32
A. Makanan	1,61	2,14	2,50	4,56	1,10	1,13	1,22
B. Non Makanan	1,13	1,46	1,54	5,36	1,29	1,41	1,51
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,97	2,87	2,35	1,18	0,37	0,33	0,62
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,71	1,55	1,95	4,23	1,41	1,07	1,19
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,38	1,69	1,88	5,83	1,28	1,31	1,38
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-	-
6 Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	4,01	5,92	2,25	21,06	2,09	2,43	4,01
7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	7,70	7,86	6,96	21,58	0,63	0,89	1,16
	1,54	2,02	1,88	5,73	1,21	1,33	1,78

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

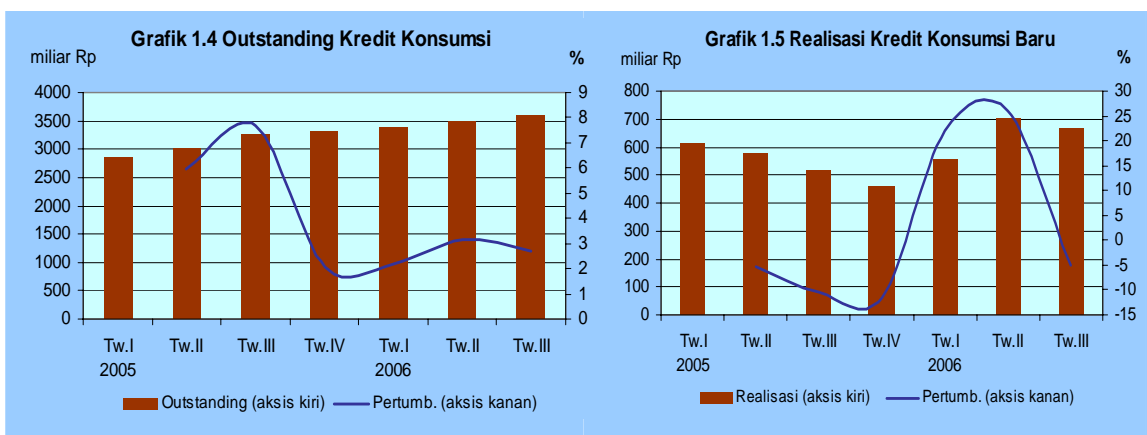
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga/Masyarakat

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2006 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 6,01% (y-o-y) lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,60% (y-o-y). Dilihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan, pertumbuhan tersebut disumbangkan dari pertumbuhan pada makanan maupun non makanan yang masing-masing naik sebesar 6,08% (y-o-y) dan 5,88% (y-o-y).

Dugaan daya beli masyarakat yang melemah didukung oleh hasil survei konsumen dan realisasi kredit baru untuk konsumsi yang cenderung menurun. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini cenderung menurun namun dengan slope yang tidak terlalu curam (grafik 1.2). Hal tersebut terutama disebabkan oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang menurun, meskipun indeks pembelian *durable goods* sedikit meningkat (grafik 1.3).



Selain itu, meskipun pertumbuhan *outstanding* kredit konsumsi pada triwulan III-2006 mengalami sedikit peningkatan, namun peningkatannya tidak se-ekspansif tahun sebelumnya (grafik 1.4). Hal tersebut diperkuat dengan realisasi kredit baru untuk konsumsi yang juga mengalami penurunan di Sumatera Barat (grafik 1.5). Penurunan realisasi kredit baru terkait dengan suku bunga kredit konsumsi dan tingkat inflasi yang relatif masih tinggi.



Dilihat dari besarnya nilai konsumsi, jika pada semester I-2006 impor Sumatera Barat dilakukan melalui provinsi lain sehingga tidak tercatat sebagai impor Sumatera Barat, maka pada triwulan laporan tercatat adanya barang impor yang masuk ke Sumatera Barat secara langsung. Dari total nilai impor sebesar USD7.478,54 ribu pada triwulan III-2006, nilai impor kategori barang konsumsi sebesar USD134,42 ribu. Meskipun tidak sebesar impor kategori bahan baku dan barang modal, namun impor barang konsumsi tersebut cukup mengindikasikan adanya konsumsi yang meningkat di Sumatera Barat.

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

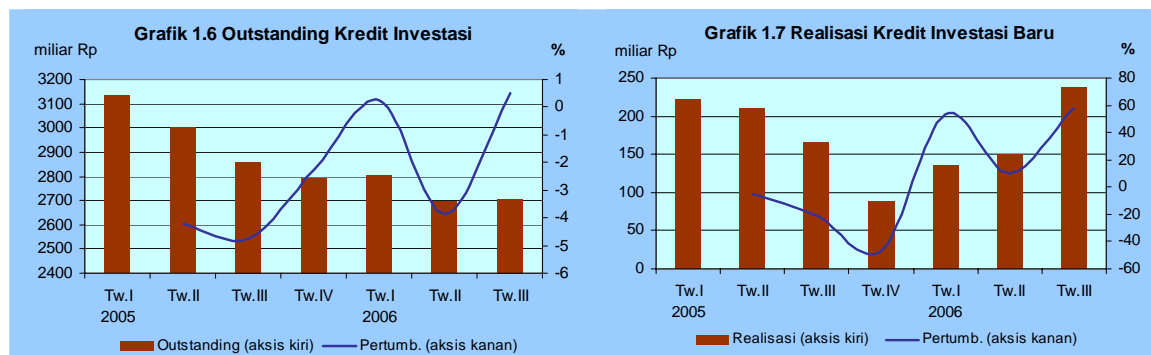
Seperti halnya konsumsi rumah tangga, pengeluaran/konsumsi pemerintah pada triwulan III-2006 juga mengalami perlambatan. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 5,74% (*y-o-y*), lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 6,12% (*y-o-y*). Perlambatan

diantaranya karena daya serap instansi pemerintah daerah terhadap APBD yang belum optimal. Di tingkat provinsi, sampai dengan triwulan III-2006 baru sekitar 47% belanja/pengeluaran pemerintah daerah yang terealisasi. Angka realisasi tersebut dinilai cukup rendah, mengingat target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 6% di tahun 2006 harus didukung dengan investasi yang relatif besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Dengan sisa anggaran sekitar Rp533 miliar, konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2006 diperkirakan akan meningkat.

1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi

Investasi, yang diestimasi dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), mengalami pertumbuhan sebesar 5,98% (*y-o-y*) atau sedikit lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,30% (*y-o-y*). Pertumbuhan investasi di triwulan laporan diperkirakan berasal dari investasi di sektor swasta dan pemerintah.

Investasi sektor swasta tercermin dari pertumbuhan *outstanding* kredit investasi dan pertumbuhan realisasi kredit baru untuk modal kerja di triwulan laporan yang cenderung meningkat (grafik 1.6 dan 1.7). Begitu pula dengan realisasi belanja modal pemerintah provinsi Sumatera Barat pada periode triwulan laporan yang cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.



Indikasi bergerakinya investasi dapat dilihat pula dari impor barang modal yang masuk ke Sumatera Barat. Pada periode triwulan laporan barang modal mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari USD1,73 juta menjadi USD2,98 juta pada triwulan III-2006. Barang modal tersebut didominasi oleh mesin-mesin dan barang mineral bukan logam yang sangat diperlukan bagi industri semen dan industri pengolahan karet/kelapa sawit di Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari *Website* BKPM, tercatat adanya realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama triwulan III-2006. Realisasi PMDN sebesar USD74,4 juta dan realisasi PMA sebesar USD1,2 juta. Adanya investasi PMDN dan PMA tersebut merupakan realisasi dari persetujuan yang telah diberikan pada periode sebelumnya (Tabel 1.4).

Tabel 1.4 Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Sumatera Barat

Tahun	PERSETUJUAN				REALISASI			
	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja			Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		
		Indns.	Asing	Jumlah		Indns.	Asing	Jumlah
2004	712.333,44	4.368	13	4.381	631.733,33	300	9	309
2005 :								
Tw. I	368.142,70	768	0	768	2.583,47	276	0	276
Tw. II	144.300,00	na	na	na	190.600,00	na	na	na
Tw. III	na	na	na	na	1.600,00	na	na	na
Tw. IV	na	na	na	na	70.000,00	na	na	na
2006 :								
Tw. I	10.000,00	na	na	na	na	na	na	na
Tw. II	592.500,00	na	na	na	na	na	na	na
Tw. III	511.500	na	na	na	74.400,00	na	na	na

Sumber : *Website* BKPM, na = data tidak tersedia

Sementara itu, persetujuan PMDN pada periode triwulan III-2006 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp0,51 miliar. Begitu juga dengan penanaman modal asing (PMA) di Sumatera Barat, persetujuan yang diberikan kepada calon investor asing, selama triwulan III-2006 mencapai USD0,03 juta (Tabel 1.5). Menurunnya persetujuan yang diberikan diperkirakan terkait dengan sikap calon investor yang cenderung menunggu situasi perekonomian nasional membaik dan pemberian insentif yang lebih menarik dari pemerintah daerah.

Tabel 1.5 Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Sumatera Barat

Tahun	PERSETUJUAN				REALISASI			
	Investasi (US\$ 000)	Tenaga Kerja			Investasi (US\$ 000)	Tenaga Kerja		
		Indns.	Asing	Jumlah		Indns.	Asing	Jumlah
2004	18.443,95	1.346	14	1.360	29.532,64	169	16	185
2005 :								
Tw. I	60.964,00	82	0	82	23.578,82	68	6	74
Tw. II	11.500,00	na	na	na	19.000,00	na	na	na
Tw. III	111.600,00	na	na	na	10.300,00	na	na	na
Tw. IV	20.900,00	na	na	na	0,00	na	na	na
2006 :								
Tw. I	400,00	na	na	na	na	na	na	na
Tw. II	1.600,00	na	na	na	na	na	na	na
Tw. III	28.000	na	na	na	1.200,00	na	na	na

Sumber : *Website* BKPM, na = data tidak tersedia

1.2.4 Ekspor – Impor

Pertumbuhan ekspor barang & jasa Sumatera Barat pada triwulan III-2006 tercatat sebesar 11,21% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut dikonfirmasi dengan realisasi ekspor barang & jasa dari Sumatera Barat yang meningkat. Berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai (data *open file*), ekspor Sumatera Barat pada triwulan III-2006 mencapai USD292,47 juta, angka ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD174,69 juta. Sementara itu, di triwulan III-2006 impor barang ke Sumatera Barat hanya tercatat sebesar USD7,48 juta. Dengan demikian, pada triwulan III-2006 terjadi nilai neraca perdagangan/*trade balance* non migas positif sebesar USD284,99 juta (Tabel 1.6 & Tabel 1.8).

Berdasarkan komoditi ekspor, komoditi karet mentah & sintetis merupakan komoditi yang paling banyak di ekspor dari Sumatera Barat. Meskipun harga karet alam di pasar dunia sejak Agustus 2006 mulai melemah dan terus menurun, namun posisi harga di tingkat eksportir masih tergolong tinggi, yakni di atas level USD1,5 per Kg. Pada triwulan III-2006, porsi ekspor komoditi karet mentah & sintetis mencapai 46,96% dari total ekspor Sumatera Barat, yang ditujukan ke Amerika Serikat dan China, disusul Meksiko, Kanada dan India. Berkurangnya pasokan karet alam dunia dari China karena angin taifun dan dari Thailand akibat banjir, berdampak terhadap kenaikan ekspor karet Sumatera Barat yang naik 102,46% dari triwulan sebelumnya. Selain itu, peningkatan ekspor didukung pula dengan produksi karet Sumatera Barat yang meningkat.

Tabel 1.6
Realisasi Komoditi Ekspor Non Migas Utama

									(000' USD)
Akhir Periode	Batubara, Kokas dan Briket	Produk Kayu dan Gabus	Minyak dan Lemak Nabati	Minyak Atsiri dan Wangi-wangian	Kopi, Teh Coklat dan Rempah	Karet Mentah dan Sintetis	Buah dan Sayuran	Lainnya	Total
2004	5.790	12.558	312.293	6.397	26.113	209.447	6.493	20.443	599.534
Tw. I	-	2.917	81.707	2.227	5.701	46.163	1.114	6.923	146.752
Tw. II	572	2.602	65.831	1.113	6.243	52.250	922	6.925	136.458
Tw. III	2.066	3.940	78.658	2.368	7.157	64.829	2.954	3.913	165.885
Tw. IV	3.152	3.099	86.097	689	7.012	46.205	1.503	2.682	150.439
2005	14.594	43.610	363.670	8.111	29.688	233.353	7.290	16.854	717.170
Tw. I	2.532	3.444	71.266	2.691	7.409	48.451	1.382	3.418	140.593
Tw. II	5.390	4.476	87.647	2.031	8.492	58.310	2.553	3.816	172.715
Tw. III	3.927	32.618	106.068	1.851	7.276	66.425	1.731	5.242	225.139
Tw. IV	2.745	3.073	98.689	1.537	6.512	60.167	1.624	4.377	178.723
2006	3.293	7.554	178.756	2.198	16.734	150.841	6.140	15.164	380.681
Tw. I	2.616	5.184	91.638	1.675	7.955	83.008	3.257	10.654	205.987
Porsi (%)	1,27	2,52	44,49	0,81	3,86	40,30	1,58	5,17	100
Pertumb.(%)	(4,67)	68,71	(7,14)	9,00	22,16	37,96	100,58	143,39	15,25
Tw. II	677	2.370	87.118	523	8.780	67.832	2.884	4.510	174.694
Porsi (%)	0,39	1,36	49,87	0,30	5,03	38,83	1,65	2,58	100
Pertumb.(%)	(74,13)	(54,27)	(4,93)	(68,80)	10,37	(18,28)	(11,45)	(57,67)	(15,19)
Tw. III*	279	1.894	127.425	2.860	6.865	137.332	2.497	13.321	292.472
Porsi (%)	0,10	0,65	43,57	0,98	2,35	46,96	0,85	4,55	100
Pertumb.(%)	(58,80)	(20,09)	46,27	447,14	(21,81)	102,46	(13,40)	195,37	67,42

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data *open file*/masih dapat berubah

Komoditi ekspor Sumatera Barat terbesar selanjutnya adalah komoditi minyak & lemak nabati, yang didominasi *crude palm oil* (CPO), dengan porsi sebesar 43,57%, disusul kemudian komoditi kopi, teh, coklat & rempah sebesar 2,35%, minyak atsiri & wangi-wangian sebesar 0,98%, komoditi buah & sayuran sebesar 0,85%, produk kayu & gabus sebesar 0,65%, komoditi batubara, kokas & briket sebesar 0,10%, dan sisanya merupakan gabungan komoditi lainnya (Tabel 1.6).

Apabila dilihat dari negara tujuan ekspor, Singapura merupakan negara tujuan ekspor terbesar dari Sumatera Barat dengan pangsa ekspor sebesar 82,96%. Besarnya ekspor Sumatera Barat ke Singapura merupakan hal yang wajar mengingat Singapura merupakan negara transit bagi perdagangan internasional. Barang ekspor yang transit di Singapura tersebut selanjutnya diberangkatkan kembali ke negara pembeli.

Negara tujuan ekspor selanjutnya adalah Hongkong sebesar 5,79%, Amerika sebesar 3,99%, RRC sebesar 0,57%, Jerman sebesar 0,57%, Malaysia sebesar 0,32%, Belanda sebesar 0,23% dan sisanya tersebar ke negara lainnya (Tabel 1.7). Komoditi ekspor ke negara-negara tersebut umumnya adalah hasil alam seperti karet, CPO, buah/sayuran, dll.

Tabel 1.7
7 Negara Tujuan Utama Ekspor Non Migas

(000' USD)

Akhir Periode	Amerika	Belanda	Jerman	Hongkong	RRC	Singapura	Malaysia	lainnya	Total
2004	35.283	5.246	6.387	11.239	4.386	498.390	3.443	35.160	599.534
Tw. I	9.015	1.178	975	1.405	308	124.203	927	8.741	146.752
Tw. II	10.035	1.052	1.142	150	1.585	112.968	830	8.696	136.458
Tw. III	7.948	1.618	2.109	1.137	1.085	140.687	849	10.452	165.885
Tw. IV	8.285	1.398	2.161	8.547	1.408	120.532	837	7.271	150.439
2005	24.583	5.968	6.010	29.976	26.047	554.474	34.062	36.050	717.170
Tw. I	6.568	1.504	1.237	3.659	2.910	114.645	2.101	7.969	140.593
Tw. II	5.522	1.805	2.002	9.425	6.141	135.783	2.187	9.850	172.715
Tw. III	5.387	1.437	1.502	3.651	10.945	164.302	28.016	9.900	225.139
Tw. IV	7.107	1.222	1.269	13.241	6.051	139.745	1.758	8.330	178.723
2006	14.096	3.506	3.628	11.985	11.251	308.230	4.241	21.835	380.681
Tw. I	8.502	2.468	2.166	7.396	9.522	159.963	2.851	11.209	205.987
Porsi (%)	4,13	1,20	1,05	3,59	4,62	77,66	1,38	5,44	99
Pertumb. (%)	19,63	102,04	70,71	(44,14)	57,36	14,47	62,14	34,56	15,25
Tw. II	5.594	1.038	1.461	4.589	1.728	148.267	1.390	10.626	174.694
Porsi (%)	3,20	0,59	0,84	2,63	0,99	84,87	0,80	6,08	100
Pertumb. (%)	(34,20)	(57,96)	(32,55)	(37,95)	(81,85)	(7,31)	(51,25)	(5,20)	(15,19)
Tw. III*	11.658	668	1.681	16.947	1.671	242.623	941	16.283	292.472
Porsi (%)	3,99	0,23	0,57	5,79	0,57	82,96	0,32	5,57	100
Pertumb. (%)	108,38	(35,65)	15,05	269,29	(3,29)	63,64	(32,26)	53,23	67,42

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data *open file*/masih dapat berubah

Sedangkan di sisi impor, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan III-2006. Impor ke Sumatera Barat pada triwulan tersebut mencapai USD7,48 juta, meningkat 115,64% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dilihat dari komoditinya, impor ke Sumatera Barat berupa komoditi pupuk kimia buatan dengan porsi 32% dari total impor ke Sumatera

Barat. Selanjutnya adalah berupa mesin-mesin sebesar 15,35% dan pupuk & mineral alam sebesar 7,76% (Tabel 1.8 dan Tabel 1.9).

Tabel 1.8
Realisasi Komoditi Impor Non Migas Utama

(000' USD)

Akhir Periode	Pupuk dan Mineral Alam Lainnya	Pupuk Kimia Buatan Pabrik	Kertas dan Olahannya	Mesin-Mesin	Gandum dan Olahan Gandum	Besi, Baja dan Logam Lainnya	Barang dr Mineral non Logam	lainnya	Total
2004	884	9.990	2.170	1.492	-	654	472	2.249	17.984
Tw. I	132	-	-	11	-	-	-	-	143
Tw. II	620	4.971	963	732	-	299	8	120	7.786
Tw. III	132	5.019	1.207	749	-	355	464	2.129	10.055
Tw. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	313	287	-	271	1.320	-	2	1.097	3.290
Tw. I	313	287	-	271	1.320	-	2	47	2.240
Tw. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. III	-	-	-	-	-	-	-	1.050	1.050
Tw. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	803	3.897	-	2.229	-	11	545	3.461	10.947
Tw. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. II	223	1.504	-	1.081	-	11	545	104	3.468
Porsi (%)	6,42	43,37	-	31,18	-	0,31	15,72	3,01	100
Tw. III*	581	2.393	-	1.148	-	-	-	3.357	7.479
Porsi (%)	7,76	32,00	-	15,35	-	-	-	44,89	100
Pertumb.(%)	160,61	59,11	-	6,16	-	-	-	3.117,15	115,64

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file/masih dapat berubah

Tabel 1.9
7 Negara Utama Asal Impor Non Migas

(000' USD)

Akhir Periode	Jepang	Singapura	Thailand	USA	Jerman	Inggris	Belanda	lain	Total
2004	174	515	388	-	49	82	-	6.721	7.929
Tw. I	-	132	-	-	6	-	-	5	143
Tw. II	174	383	388	-	43	82	-	6.716	7.786
Tw. III	157	177	215	-	1.541	7	-	7.958	10.055
Tw. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	134	1.440	-	14	-	-	653	2.241
Tw. I	-	134	1.440	-	14	-	-	652	2.240
Tw. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. III	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tw. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	325	837	-	1.279	4	1	8.157	10.947
Tw. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsi (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tw. II	-	142	256	-	316	-	1	2.754	3.468
Porsi (%)	-	4,09	7,39	-	9,10	-	0,02	79,41	100
Tw. III*	344	184	581	-	963	4	1	5.403	7.479
Porsi (%)	#DIV/0!	2,45	7,76	-	12,88	0,06	0,01	72,24	95
Pertumb.(%)	#DIV/0!	29,52	126,56	-	205,33	-	0,32	96,17	115,64

Sumber : Ditjen Bea Cukai - diolah BI (PDIE), * data open file/masih dapat berubah

1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan III-2006 sebesar 24,90%. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 18,18%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,24%), sektor industri pengolahan (13,12%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,10%), sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (5,11%), sektor bangunan/konstruksi (4,96%), sektor pertambangan & penggalian (3,22%), dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 1,17% (Tabel 1.10).

Tabel 1.10.
Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(dalam %)

Sektor Ekonomi	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pertanian	24,98	24,97	25,10	25,01	25,03	24,98	24,90
2 Pertambangan & Penggalian	3,27	3,27	3,25	3,26	3,26	3,25	3,22
3 Industri Pengolahan	12,91	13,12	13,21	13,06	13,23	13,15	13,12
4 Listrik, Gas dan Air	1,15	1,17	1,20	1,16	1,20	1,20	1,17
5 Bangunan	4,94	4,97	4,94	4,94	4,94	4,98	4,96
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	18,30	18,18	17,97	18,20	18,05	18,14	18,18
7 Pengangkutan dan Komunikasi	12,86	12,91	13,05	12,88	13,08	13,07	13,10
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,04	5,02	4,99	5,02	5,00	5,06	5,11
9 Jasa-Jasa	16,55	16,39	16,29	16,47	16,20	16,16	16,24
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan tahunan ($y-o-y$), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2006, dengan pertumbuhan mencapai 8,15% ($y-o-y$). Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,96%, sektor industri pengolahan sebesar 6,40%, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,38%, sektor bangunan/konstruksi sebesar 6,12%, sektor listrik, gas & air sebesar 5,95%, sektor jasa-jasa sebesar 5,36% dan sektor pertambangan & penggalian sebesar 4,80% (Tabel 1.11).

Tabel 1.11.
Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(y-o-y, dalam %)

Sektor Ekonomi	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pertanian	3,28	4,87	7,64	5,13	6,99	6,59	6,03
2 Pertambangan & Penggalian	1,91	2,45	5,91	3,09	6,58	6,10	4,80
3 Industri Pengolahan	3,05	5,79	7,45	4,93	8,72	8,57	6,40
4 Listrik, Gas dan Air	11,92	13,07	17,30	12,51	15,10	11,03	5,95
5 Bangunan	3,11	4,73	6,00	4,69	7,35	7,48	6,12
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	6,42	6,17	5,22	5,97	5,11	5,65	6,38
7 Pengangkutan dan Komunikasi	9,86	9,66	11,05	9,81	10,21	8,39	7,96
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,40	6,36	6,56	6,33	6,10	7,10	8,15
9 Jasa-Jasa	4,06	4,05	4,29	4,21	3,92	4,11	5,36
	4,95	5,76	6,96	5,73	6,82	6,60	6,35

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan kuartalan ($q-t-q$), hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor listrik, gas & air bersih yang mengalami penurunan. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2006, dengan pertumbuhan mencapai 2,77%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terjadi pada sektor jasa-jasa (2,30%), dan berturut-turut pada sektor perdagangan, hotel & restoran (2,03%), sektor pengangkutan dan komunikasi (2,02%), sektor industri pengolahan (1,54%), sektor pertanian (1,44%), sektor bangunan/konstruksi (1,36%), sektor industri pengolahan (1,54%), dan sektor pertambangan & penggalian sebesar 0,66%. Sedangkan penurunan terjadi pada sektor listrik, gas & air bersih sebesar 0,82% (Tabel 1.12).

Tabel 1.12.
Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

(q-t-q, dalam %)

Sektor Ekonomi	2005*			2005*	2006**		
	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III
1 Pertanian	1.50	1.97	2.40	5.13	0.95	1.12	1.44
2 Pertambangan & Penggalian	1.56	1.91	1.46	3.09	1.48	1.11	0.66
3 Industri Pengolahan	0.90	3.61	2.59	4.93	1.37	0.76	1.54
4 Listrik, Gas dan Air	4.80	3.93	3.93	12.51	1.68	1.09	-0.82
5 Bangunan	2.12	2.66	1.18	4.69	1.20	2.25	1.36
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	1.32	1.33	0.71	5.97	1.66	1.84	2.03
7 Pengangkutan dan Komunikasi	2.93	2.42	3.04	9.81	1.46	1.23	2.02
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.58	1.77	1.29	6.33	1.32	2.53	2.77
9 Jasa-Jasa	0.86	1.08	1.27	4.21	0.65	1.05	2.30
	1.54	2.02	1.88	5.73	1.21	1.33	1.78

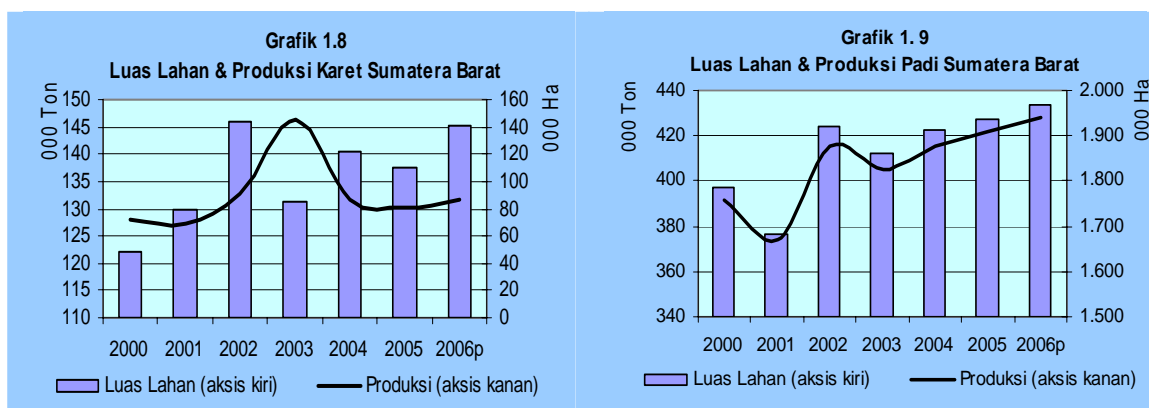
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, *angka sementara, **angka sangat sementara

1.3.1 Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan pada triwulan III-2006 mengalami pertumbuhan sebesar 6,03% (y-o-y). Pertumbuhan PDRB sektor pertanian pada triwulan

laporan tersebut, sedikit lebih rendah apabila dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 6,59% (y-o-y).

Pertumbuhan pada sektor pertanian di triwulan III-2006, terutama disumbang dari pertumbuhan pada subsektor perkebunan yang meningkat sebesar 7,93% (y-o-y), disusul pertumbuhan pada subsektor peternakan sebesar 6,69%, subsektor tanaman pangan & hortikultura sebesar 6,03%, subsektor perikanan sebesar 4,75%, dan subsektor kehutanan sebesar 0,68%. Pertumbuhan pada subsektor perkebunan diantaranya didukung dari meningkatnya jumlah produksi dan luas lahan karet di Sumatera Barat (grafik 1.8). Musim panas yang agak panjang di wilayah Sumatera, justru berdampak cukup baik bagi produksi tanaman karet di Sumatera Barat. Hal ini dikonfirmasi pula dari meningkatnya ekspor hasil karet (*crude rubber*) Sumatera Barat. Sampai dengan Agustus 2006 ekspor *crude rubber* tumbuh hampir 100% (y-o-y) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2005.



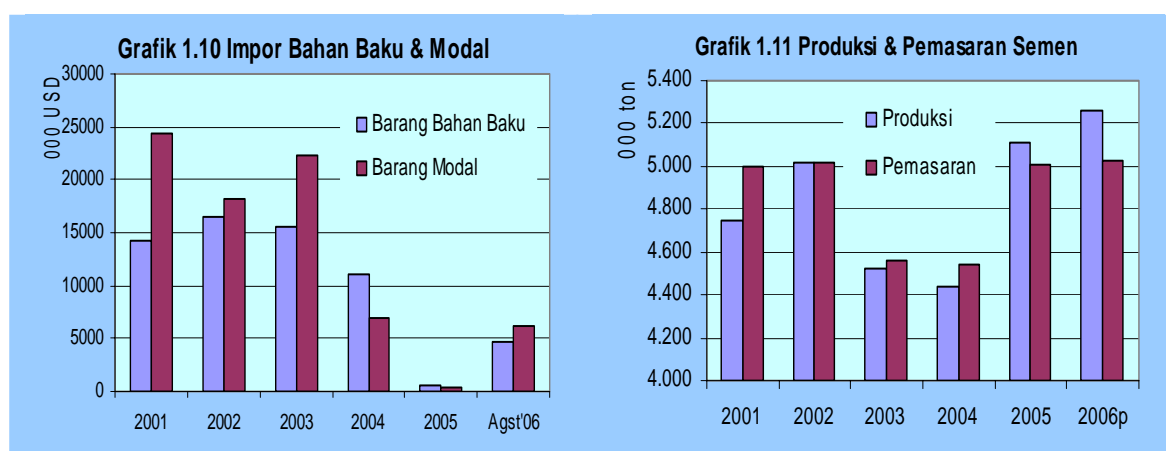
Selanjutnya, meningkatnya produksi padi di Sumatera Barat, baik jenis padi ladang maupun sawah, menjadi faktor pendorong pertumbuhan subsektor tanaman pangan (grafik 1.9). Meningkatnya produktifitas padi didukung dari ketersediaan pupuk yang mencukupi di tingkat petani karena adanya tambahan pupuk impor. Sementara itu, upaya pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian melalui suntikan penguatan modal dan bantuan alat tangkap serta berbagai kelengkapan fasilitas pelabuhan bagi nelayan dan investor di daerah pesisir pantai se-Sumatera Barat, cukup berdampak terhadap pertumbuhan subsektor perikanan. Perkembangan dan potensi perikanan di Sumatera Barat yang cukup bagus membawa hasil dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai Pusat Tuna Kawasan Barat Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Agustus 2006.

1.3.2 Sektor Industri Pengolahan

Perkembangan sektor industri pengolahan di Sumatera Barat, yang keseluruhannya merupakan industri non migas, pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 6,40% (y-o-y).

Pertumbuhan pada triwulan laporan tersebut, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II-2006 yang tumbuh sebesar 8,57% (y-o-y).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan laporan berasal dari pertumbuhan pada hampir semua subsektor industri non migas kecuali subsektor barang kayu dan hasil hutan yang tumbuh negatif. Pertumbuhan terutama berasal dari industri semen & barang non logam sebesar 11,75% (y-o-y), disusul industri tekstil, barang kulit & alas kaki sebesar 5,97%, industri makanan, minuman & tembakau sebesar 4,95%, industri kertas dan barang cetakan sebesar 4,27%, industri alat angkutan mesin dan peralatan sebesar 3,85%, dan industri pupuk kimia & barang dari karet sebesar 3,81%.



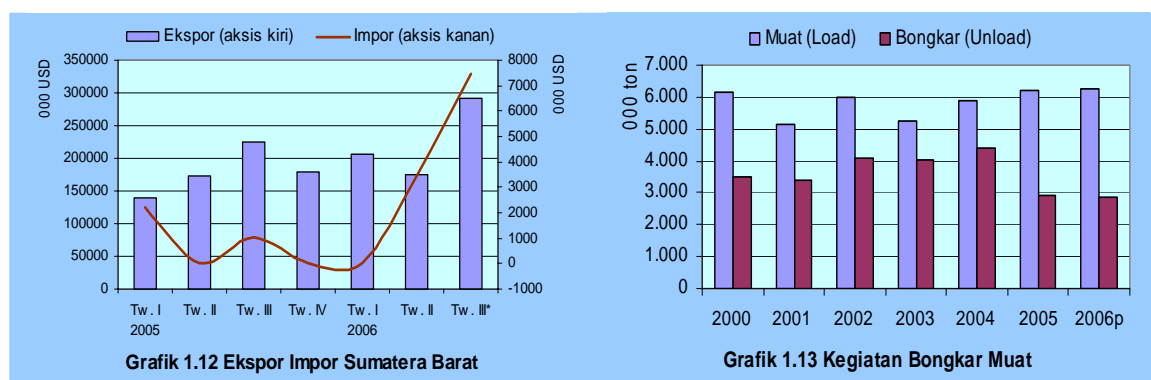
Secara umum, pertumbuhan sektor industri dikonfirmasi dari pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku ke Sumatera Barat yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2005 (grafik 1.10). Impor barang modal yang didominasi oleh mineral bukan logam serta mesin industri diperlukan guna mendukung utilisasi kapasitas produksi sektor industri di Sumatera Barat. Sementara itu, Produksi semen dari PT. Semen Padang yang terus meningkat, diperkirakan akan dapat mencapai kapasitas produksinya yang maksimal yaitu sebesar 5.240.000 ton per tahun. Meningkatnya produksi semen diiringi dengan peningkatan pemasaran semen walaupun pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi dan pemasaran cukup memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri (grafik 1.11).

1.3.3 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

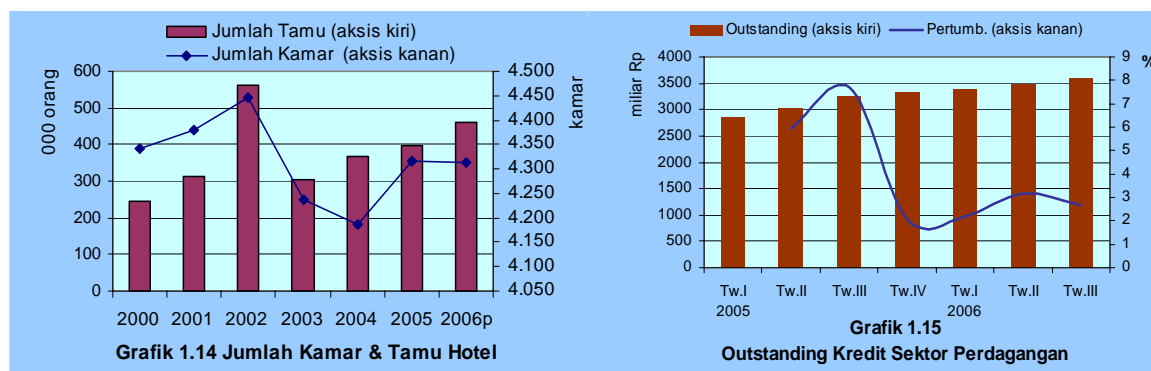
Di triwulan III-2006 sektor perdagangan, hotel & restoran mengalami pertumbuhan sebesar 6,38% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 5,65% (y-o-y). Pertumbuhan yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel & restoran disumbang dari pertumbuhan yang terjadi pada semua

subsektornya yaitu subsektor perdagangan besar & eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran yang masing-masing tumbuh sebesar 6,47%, 3,23%, dan 4,07%.

Menggeliatnya aktifitas perdagangan di Sumatera Barat terutama dipicu sentimen positif dalam menghadapi bulan puasa. Pada periode tersebut, banyak pedagang melakukan transaksi pembelian partai besar untuk keperluan stock/persediaan menjelang dan selama bulan puasa. Peningkatan aktifitas perdagangan terefleksi pula dari nilai ekspor dan impor yang tumbuh signifikan pada triwulan laporan (grafik 1.12). Hal tersebut dikonfirmasi dari kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat, yang meningkat terbatas (grafik 1.13).



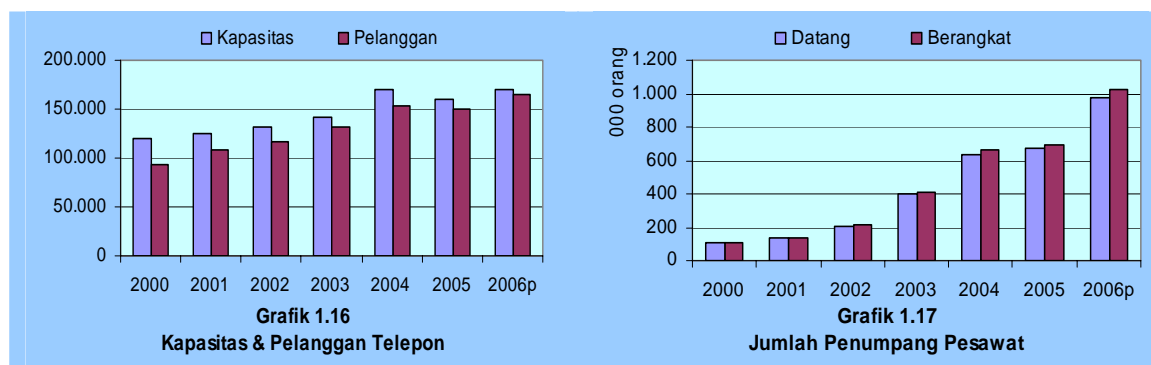
Sementara itu, adanya libur cuti bersama pada periode triwulan laporan dan banyaknya kegiatan simposium/pertemuan bertaraf nasional maupun internasional di Sumatera Barat, cukup mendongkrak volume tamu hotel. Tingginya minat wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat selain karena tergolong daerah aman, juga karena adanya agenda pemerintah daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan besar seperti paralayang, lomba renang antar pulau, festival pagaruyung, dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan jumlah tamu hotel berbintang dan bukan berbintang meningkat cukup baik (grafik 1.14). Bila dikaitkan dengan perkembangan *outstanding* kredit di Sumatera Barat pada triwulan III-2006, ternyata pertumbuhan PDRB di sektor perdagangan, hotel & restoran diikuti oleh peningkatan *outstanding* kredit di ini yang meningkat sebesar 4,10% yaitu dari Rp2,26 triliun pada triwulan II-2006 menjadi Rp2,35 triliun di triwulan III-2006 (grafik 1.15).



1.3.4 Sektor Pengangkutan & Komunikasi

Pada triwulan III-2006, sektor pengangkutan & komunikasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,96% (y-o-y). Namun pertumbuhan pada triwulan laporan tersebut melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 8,39% (y-o-y). Secara umum, perlambatan di sektor ini tercermin dari *outstanding* kredit di sektor angkutan dan komunikasi yang turun sebesar 8,50%, yaitu dari Rp132 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp121 miliar di triwulan III-2006.

Dilihat dari subsektornya, pertumbuhan pada triwulan laporan terutama disumbangkan subsektor komunikasi yang tumbuh sebesar 15,39% (y-o-y), sedangkan subsektor angkutan hanya meningkat sebesar 6,02%. Pertumbuhan pada subsektor angkutan terjadi pada kereta api sebesar 13,21%, angkutan sungai, danau & penyeberangan 10,83%, angkutan udara sebesar 9,39%, jalan raya sebesar 6,09%, jasa penunjang angkutan sebesar 4,63%, dan angkutan laut sebesar 0,77%.



Meningkatnya kapasitas telepon yang disediakan PT. Telkom diiringi dengan peningkatan jumlah pelanggan telepon di wilayah Kandatel Sumatera Barat (grafik 1.16). Peningkatan sentra sambungan telepon merupakan kebijakan nasional PT. Telkom untuk membuka daerah-daerah yang belum terdapat sambungan telepon. Hingga triwulan III-2006, jumlah sentral sambungan telepon di Sumatera Barat telah melebihi 93 sentral yang berarti meningkat 100% dibandingkan tahun 2000.

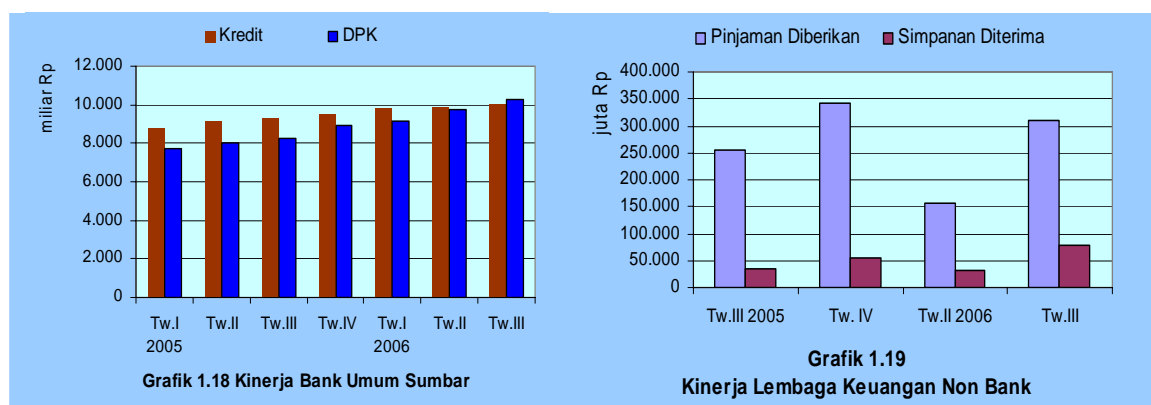
Pada subsektor angkutan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat selain berdampak terhadap tingkat hunian hotel, juga pada jumlah penumpang pesawat terbang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang cenderung meningkat (grafik 1.17). Maraknya pesawat *low cost carrier* (LCC) yang beroperasi di bandara BIM menjangkau penumpang baru yang biasanya menggunakan moda angkutan darat/bis.

1.3.5 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 8,15% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan, lebih tinggi apabila

dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,10% (y-o-y). Pertumbuhan sektor keuangan sebagian besar berasal dari pertumbuhan subsektor bank sebesar 8,99% (y-o-y), disusul kemudian subsektor sewa bangunan sebesar 7,94%, subsektor lembaga keuangan non bank sebesar 7,73%, dan subsektor jasa perusahaan sebesar 4,63%.

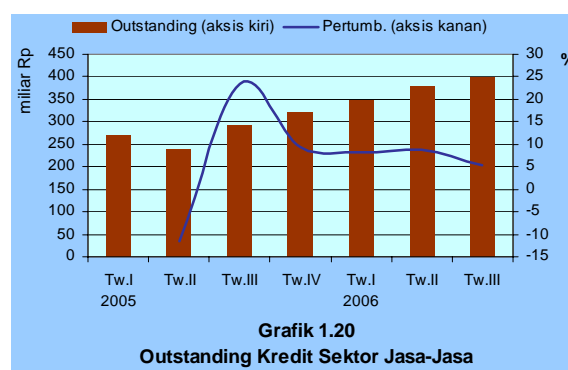
Meningkatnya subsektor bank ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum di Sumatera Barat. Kredit yang tersalurkan hingga triwulan III-2006 sebesar Rp10,07 triliun, sedangkan DPK mencapai Rp10,24 triliun (grafik 1.18). Begitu pula dengan kinerja lembaga keuangan non bank, mengalami peningkatan yang cukup baik. Sampai dengan triwulan laporan, pinjaman yang diberikan mencapai Rp309,56 miliar dan simpanan yang diterima sebesar Rp77,32 miliar (grafik 1.19).



1.3.6 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 5,36% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,11% (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa sebagian besar berasal dari subsektor swasta yang meningkat sebesar 7,96% (y-o-y), sedangkan subsektor pemerintahan umum & pertahanan tumbuh sebesar 4,12% (y-o-y).

Bila dikaitkan dengan perkembangan kredit di Sumatera Barat pada triwulan III-2006, ternyata pertumbuhan PDRB di sektor ini diikuti oleh peningkatan *outstanding* kredit di sektor jasa-jasa (jasa dunia usaha dan jasa sosial masyarakat) yang meningkat sebesar 5,49%, yaitu dari Rp377 miliar



pada triwulan II-2006 menjadi Rp398 miliar di triwulan III-2006 (grafik 1.20).

1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Memasuki triwulan II-2006, jumlah pencari kerja di Sumatera Barat pada periode triwulan III-2006 mengalami penurunan. Pencari kerja yang terdaftar selama triwulan III-2006 (data s.d Agustus 2006) tercatat sebanyak 2.272 orang, sementara pada periode triwulan II-2006 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 3.728 orang (Tabel 1.13). Apabila diperhatikan dari tahun ke tahun, setelah berakhir masa pendidikan yang biasanya jatuh pada periode triwulan III, pencari kerja tidak langsung mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Para pencari kerja yang baru selesai pendidikannya tersebut cenderung berusaha mencari kerja secara langsung terlebih dahulu atau berwiraswasta, baru kemudian mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja setelah beberapa bulan belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini disimpulkan dari jumlah pencari kerja yang relatif merata pada setiap triwulannya.

Menurut tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja pada periode triwulan III-2006 terbanyak berpendidikan tingkat SMA/SLTA sebanyak 1.574 orang (69,28% dari total pencari kerja). Selanjutnya, pencari kerja terbanyak adalah tingkat Sarjana/S1 sebanyak 329 orang (14,48%), disusul kemudian D.I/D.II/D.III yaitu mencapai 279 orang (12,28%), SMP/SLTP sebanyak 57 orang (2,51%), tingkat SD sebanyak 29 orang (1,28%) dan tidak tamat SD sebanyak 4 orang (0,18%), sementara pencari kerja lulusan S2/S3 pada triwulan laporan tidak ada. Hingga triwulan III-2006, jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat tercatat sebanyak 17.973 orang.

Tabel 1.13 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2004		Tahun 2005		Trw II 2006		Trw III 2006		s.d Tw.III 2006	Pertumb. Trw III/II
	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share		
Tidak Tamat SD	11	0,01%	20	0,02%	5	0,13%	4	0,18%	15	-20,00%
Sekolah Dasar	110	0,14%	437	0,51%	76	2,04%	29	1,28%	216	-61,84%
SMP/SLTP	1.130	1,42%	3.466	4,06%	136	3,65%	57	2,51%	565	-58,09%
SMA/SLTA	47.277	59,28%	45.732	53,57%	2.063	55,34%	1.574	69,28%	11.431	-23,70%
D.I/D.II/D.III	10.470	13,13%	9.886	11,58%	776	20,82%	279	12,28%	2.575	-64,05%
Sarjana (S1)	20.666	25,91%	25.615	30,00%	672	18,03%	329	14,48%	3.168	-51,04%
S2/S3	86	0,11%	219	0,26%	0	0,00%	0	0,00%	3	0,00%
Total	79.750	100%	85.375	100%	3.728	100%	2.272	100%	17.973	-39,06%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Sumbar

Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Abadi Minangkabau Internasional (DAMI)

Pemimpin Bank Indonesia (BI) Padang C.Y Boestal mendukung langkah Gebu Minangkabau menggerakkan Dana Abadi Minangkabau Internasional (DAMI). Dana yang terhimpun nanti diusulkan disalurkan BPD Sumatera Barat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di provinsi Sumatera Barat dalam bentuk "kredit mikro miskin" dengan bunga sangat murah. "Kita munculkan istilah "kredit mikro miskin" karena kredit mikro selama ini maksimal Rp50 juta. Untuk tahap pertama sasaran adalah keluarga miskin dapat diberikan, misalnya, maksimal Rp5 juta," kata CY Boestal, ketika berdiskusi dengan pengurus DAMI di BI Padang. Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Kepatuhan BPD Sumatera Barat Masri Saun.

Direncanakan, tim pelaksana penghimpun dana di daerah Sumatera Barat diusulkan beranggotakan pimpinan media cetak, yaitu H. Sutan Zaili Asril (Pemimpin Umum Harian Padang Ekspres), H. Adlis Kasoema (Pemimpin Umum Haluan), H. Basril Djabar (Pemimpin Umum Singgalang), dan Sekretaris Pribadi Gubernur Sumatera Barat, Drs. Hasrul Piliang MSi. Selain menghimpun dana, tim juga mendapat wewenang dari pengurus DAMI untuk melaksanakan teknis kerjasama dengan BPD Sumatera Barat. Menurut Boestal, pihaknya selaku Pimpinan BI Padang juga akan membuat kerjasama dengan BPD Sumatera Barat dalam hal mengawasi dana DAMI yang terhimpun dan mengawasi penyalurannya. Untuk tahap pertama, Boestal mengusulkan, dana yang dihimpun disimpan di BPD Sumatera Barat, sedangkan rekening dapat dibuka di semua bank. Bilamana berhasil menghimpun dana yang memadai, maka sekaligus berarti membesarkan BPD Sumatera Barat.

Boestal mengusulkan kepada pengurus DAMI, penghimpunan dana harus bersifat intelek karena nasabah DAMI adalah "orang berdasar" yaitu orang yang memiliki dana. Ini tidak saja dapat dilakukan melalui imbauan, tapi, juga setiap nasabah orang Minang di BPD Sumatera Barat dan melalui transaksi di setiap restoran/rumah-rumah makan Padang serta berbagai cara lainnya termasuk dana dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Bilamana dana yang terkumpul berapa pun, menurut Boestal, sebaiknya segera disalurkan. BPD Sumatera Barat segera mencari calon penerima "kredit mikro miskin" dan pada media bulan ramadhan sudah dapat diluncurkan penyerahannya. "Launching penyerahan kredit mikro miskin tersebut diharapkan akan semakin membangun kepercayaan peserta DAMI. Orang ingin bukti. Jadi jangan hanya launching penghimpunan dana, tapi, juga penyalurannya," katanya

(Padang Ekspres tanggal 5 September 2006)

BAB 2

Keuangan Pemerintah Daerah

2.1 Umum

Secara umum, realisasi pendapatan/penerimaan pada Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Prov. Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2006 dinilai cukup baik, walaupun Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi. Sementara itu, realisasi belanja/pengeluaran APBD Prov. Sumatera Barat justru dinilai tidak maksimal. Rendahnya realisasi belanja selain karena faktor pengesahan APBD yang terlambat juga berasal dari instansi/dinas di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat yang diduga tidak siap menyerap dana yang telah dialokasikan tersebut. Jumlah pendapatan yang lebih besar dari jumlah pengeluaran berdampak terhadap neraca APBD Prov. Sumatera Barat yang surplus.

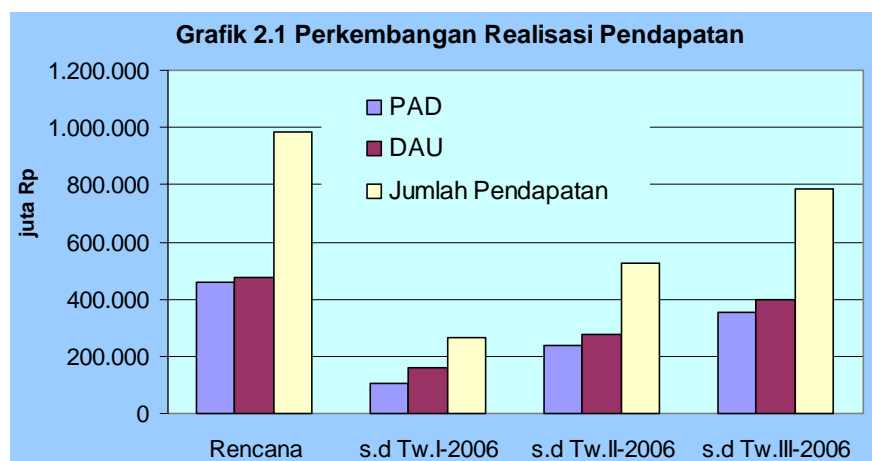
2.2. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III-2006 cukup baik yang melebihi angka 75% dari total perkiraan pendapatan, yaitu sebesar Rp787,43 miliar atau tepatnya mencapai 79,93% dari total total anggaran pendapatan (Grafik 2.1). Pendapatan tersebut antara lain bersumber dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp355,02 miliar (77,64% dari total anggaran), dan pos dana perimbangan sebesar Rp432,19 miliar (81,95% dari total anggaran).

Pendapatan pajak daerah sebesar Rp299,60 miliar merupakan komponen terbesar yang menyumbang PAD Sumatera Barat. Pendapatan pajak daerah terutama berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Himbauan kepala daerah agar mobil bernomor seri luar Sumatera Barat dipindahkan ke nomor Sumatera Barat cukup berhasil meningkatkan permohonan balik nama kendaraan. Sumber PAD berikutnya berasal dari sub pos retribusi daerah sebesar Rp7,66 miliar, bagian laba usaha daerah sebesar Rp25,35 miliar dan sub pos lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp22,40 miliar. Sumber retribusi yang dominan menyumbang PAD adalah retribusi pelayanan kesehatan. Cukup baiknya pelayanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit milik pemerintah, memberi kontribusi terhadap meningkatnya pendapatan rumah sakit. Sementara itu, kinerja beberapa BUMD seperti PT. Semen Padang, BPD Sumatera Barat dan PT. Askrida yang semakin membaik, memberikan pemasukan kepada kas daerah melebihi jumlah yang ditargetkan.

Pendapatan dana perimbangan sebagian besar berasal dari realisasi sub pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp397,52 miliar, sub pos bagi hasil pajak sebesar Rp31,57

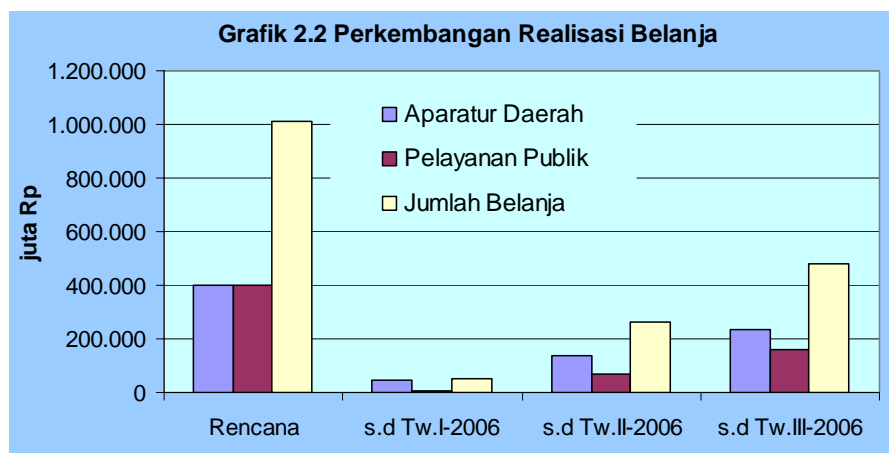
miliar, dan sub pos bagi hasil bukan pajak sebesar Rp3,09 miliar. Masih tingginya komposisi DAU dalam pos pendapatan daerah menyiratkan ketergantungan keuangan daerah terhadap *dropping* dana dari pemerintah pusat yang relatif masih tinggi. Sementara itu, bagi hasil pajak yang diperoleh Sumatera Barat merupakan hasil dari penerimaan pajak bumi & bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.



2.3. Realisasi Pengeluaran/Belanja Daerah

Berbeda dengan realisasi pendapatan yang cukup baik, realisasi pengeluaran belanja daerah sampai dengan triwulan III-2006 bergerak lambat dan tidak maksimal yaitu baru mencapai Rp480,86 miliar atau 47,41% dari total anggaran belanja sebesar Rp1,01 triliun (Grafik 2.2). Realisasi belanja tersebut antara lain berasal dari pos belanja aparatur daerah sebesar Rp234,73 miliar (58,45% dari total anggaran), pos belanja pelayanan publik sebesar Rp162,42 miliar (40,54% dari total anggaran), pos belanja bagi hasil & bantuan keuangan sebesar Rp83,38 miliar (41,15% dari total anggaran), dan pos belanja tidak tersangka Rp0,33 miliar (3,55% dari total anggaran).

Sebagian besar dari realisasi belanja aparatur daerah sampai dengan triwulan III-2006, berasal dari sub pos belanja administrasi umum yaitu sebesar Rp204,50 miliar yang terdiri dari realisasi belanja pegawai/personalia sebesar Rp159,90 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp22,01 miliar, belanja perjalanan dinas sebesar Rp14,37 miliar, dan belanja pemeliharaan sebesar Rp8,22 miliar. Selanjutnya, belanja aparatur daerah pada belanja operasi & pemeliharaan sebesar Rp27,88 miliar, dan belanja modal sebesar Rp2,34 miliar. Secara umum, penyerapan belanja pegawai relatif baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengeluaran tersebut ditujukan untuk pembayaran gaji pegawai yang tidak bisa ditunda-tunda dan tidak terpengaruh dengan keterlambatan pengesahan APBD.



Komponen realisasi pos belanja pelayanan publik sampai dengan triwulan III-2006 sebagian besar berasal dari sub pos belanja modal sebesar Rp62,68 miliar, sub pos belanja operasi dan pemeliharaan sebesar Rp59,41 miliar, dan sub pos belanja administrasi umum sebesar Rp40,33 miliar. Belanja administrasi umum terdiri dari belanja pegawai/personalia sebesar Rp18,70 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp15,77 miliar, belanja perjalanan dinas Rp1,61 miliar, serta belanja pemeliharaan Rp4,24 miliar. Terealisasinya beberapa proyek pembangunan fisik yang sempat tertunda pada triwulan I dan II, seperti irigasi, pembangunan beberapa jembatan, pelebaran jalan dan pembukaan jalan baru, dll, meningkatkan sub pos belanja modal pemerintah daerah.

Jumlah pendapatan pemerintah daerah yang lebih besar dari total belanja/pengeluaran, berdampak terhadap neraca APBD Sumatera Barat yang mengalami surplus. Sampai dengan triwulan III-2006 surplus APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp306,58 miliar, angka tersebut lebih tinggi dari surplus triwulan II-2006 yang mencapai Rp265,99 miliar. Sementara dari segi pembiayaan, mengalami defisit sebesar Rp2,49 miliar pada triwulan laporan.

Fenomena penyerapan belanja APBD yang lambat diduga tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, namun juga di beberapa provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Proses pengesahan APBD yang memakan waktu cukup lama antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) merupakan salah satu penyebab terlambatnya penyerapan belanja pemerintah daerah, terutama belanja modal. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab lambat penyerapan APBD yaitu lambat pengesahan peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan anggaran daerah oleh pemerintah pusat, serta buku petunjuk pelaksanaan anggaran yang sering berubah dan terlambat disampaikan ke daerah (lihat *topical issue* Studi Realisasi APBD di Sumatera Barat).

Tabel 2.1.
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2006

dalam juta rupiah

URAIAN	APBD 2006		Realisasi sd. Tw.III 2006	SISA ANGGARAN	Penyerapan %
	Nominal	Porsi (%)			
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	457.256,11	46,41	355.016,19	102.239,92	77,64
Pajak Daerah	384.635,00	39,04	299.603,49	85.031,51	77,89
Retribusi Daerah	7.852,18	0,80	7.662,02	190,16	97,58
Bagian Laba Usaha Daerah	24.548,00	2,49	25.349,01	(801,01)	103,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	40.220,93	4,08	22.401,67	17.819,26	55,70
Dana Perimbangan	527.357,00	53,53	432.187,62	95.169,38	81,95
Bagi Hasil Pajak	48.213,00	4,89	31.568,83	16.644,17	65,48
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.115,00	0,21	3.094,63	(979,63)	146,32
Dana Alokasi Umum	477.029,00	48,42	397.524,17	79.504,84	83,33
Dana Alokasi Khusus	-	0,00	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	536,00	0,05	230,43	305,57	42,99
Jumlah Pendapatan	985.149,11	100	787.434,24	197.714,86	79,93
BELANJA					
APARATUR DAERAH	401.586,84	39,59	234.727,15	166.859,69	58,45
Belanja Administrasi Umum	321.642,01	31,71	204.499,94	117.142,07	63,58
Belanja Pegawai/Personalia	252.660,53	24,91	159.901,82	92.758,72	63,29
Belanja Barang dan Jasa	35.406,82	3,49	22.013,19	13.393,63	62,17
Belanja Perjalanan Dinas	18.312,92	1,81	14.366,94	3.945,98	78,45
Belanja Pemeliharaan	15.261,73	1,50	8.217,99	7.043,74	53,85
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	66.642,90	6,57	27.883,24	38.759,65	41,84
Belanja Modal	13.301,94	1,31	2.343,96	10.957,97	17,62
PELAYANAN PUBLIK	400.675,61	39,51	162.420,42	238.255,20	40,54
Belanja Administrasi Umum	90.839,81	8,96	40.329,13	50.510,68	44,40
Belanja Pegawai/Personalia	32.666,34	3,22	18.702,14	13.964,20	57,25
Belanja Barang dan Jasa	46.820,45	4,62	15.774,33	31.046,12	33,69
Belanja Perjalanan Dinas	2.555,93	0,25	1.614,55	941,39	63,17
Belanja Pemeliharaan	8.797,10	0,87	4.238,12	4.558,98	48,18
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	112.498,63	11,09	59.411,55	53.087,08	52,81
Belanja Modal	197.337,17	19,46	62.679,73	134.657,44	31,76
Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu.	202.602,80	19,98	83.377,52	119.225,28	41,15
Belanja Tidak Tersangka	9.373,15	0,92	333,00	9.040,15	3,55
Jumlah Belanja	1.014.238,40	100	480.858,09	533.380,31	47,41
Surplus/(Defisit)	(29.089,30)		306.576,16	(335.665,45)	(1.053,91)

Lanjutan.....

dalam juta rupiah

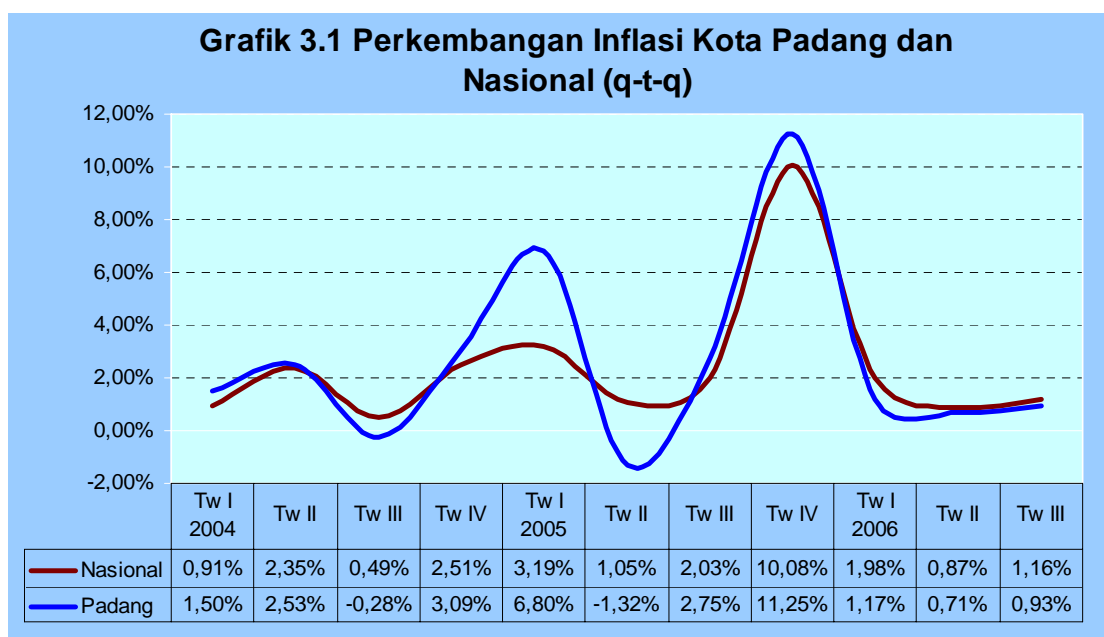
URAIAN	APBD 2006		Realisasi sd. Tw.III 2006	SISA ANGGARAN	Penyerapan %
	Nominal	Porsi (%)			
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Daerah					
Sisa Lebih Perhit. Angg. Tahun Lalu	51.089,30	100,00	19.504,91	31.584,38	38,18
Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-
Hasil PenjIn Aset Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah	51.089,30	100	19.504,91	31.584,38	38,18
Pengeluaran Daerah					
Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	22.000,00	100,00	22.000,00	-	100,00
Pembyrn Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhit. Angg. Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Daerah	22.000,00	100	22.000,00	-	100,00
Jumlah Pembiayaan	29.089,30		-2.495,09	31.584,38	(8,58)

Sumber : Bagian Anggaran Provinsi Sumatera Barat

BAB 3 INFLASI

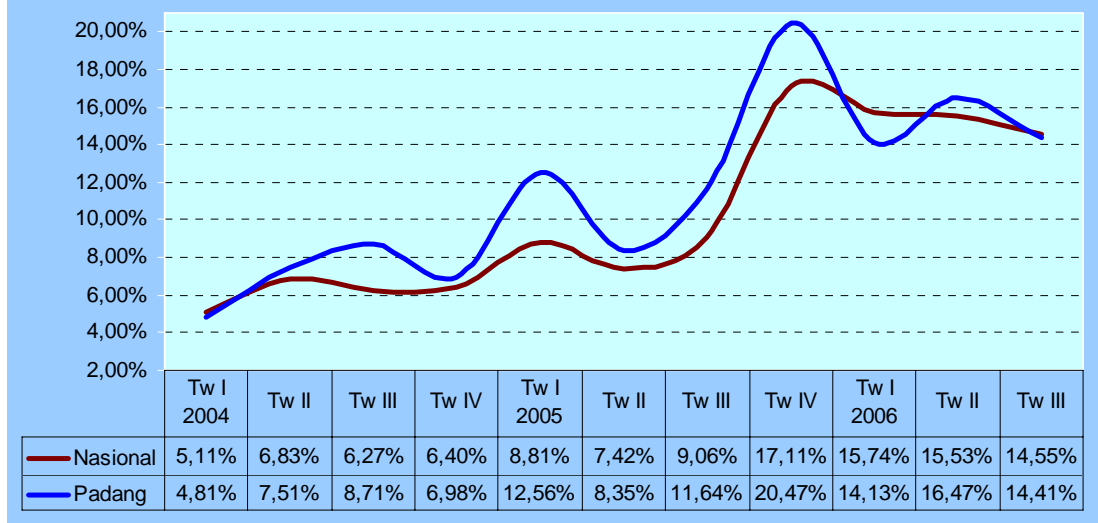
3.1. Umum

Memasuki triwulan III-2006, tingkat harga-harga di Sumatera Barat, yang diwakili kota Padang, diwarnai dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi kota Padang pada triwulan III-2006 tercatat sebesar 0,93% ($q-t-q$). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,71% ($q-t-q$). Namun inflasi kota Padang tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan III-2006 yang tercatat sebesar 1,16% ($q-t-q$). Hingga September 2006, laju inflasi kota Padang mencapai 2,84% ($y-t-d$), lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,06% (Grafik 3.1).



Sementara itu, perkembangan harga secara tahunan di kota Padang, pada triwulan III-2006 mengalami inflasi sebesar 14,41% ($y-o-y$). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,47% ($y-o-y$). Dibandingkan inflasi tahunan nasional triwulan III-2006 yang tercatat sebesar 14,55% ($y-o-y$), inflasi tahunan kota Padang sedikit lebih rendah (Grafik 3.2).

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y)



Faktor utama inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan III-2006 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok makanan jadi dan kelompok pendidikan. Kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,98% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,50%. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 5,46% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,31%. Pada triwulan laporan, terdapat pula kelompok barang/jasa yang mengalami deflasi yaitu kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sebesar 0,19%. Deflasi pada kelompok bahan makanan terjadi sejak triwulan I-2006.

3.2 Determinan Inflasi

Secara tahunan, (y-o-y), inflasi kota Padang, baik inflasi inti maupun non inti, masih berada pada level 2 digit. Berdasarkan determinannya, inflasi inti (*core inflation*) kota Padang tercatat sebesar 12,41% dengan sumbangan sebesar 5,84%, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) sebesar 16,19% dengan sumbangan sebesar 8,57%. Secara umum, masih tingginya inflasi non inti tersebut terutama dikarenakan masih dihitungnya dampak kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 yang lalu.

Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya, berdampak terhadap kontribusi inflasi inti terhadap inflasi kota Padang. Pada triwulan II-2005, sebelum kenaikan harga BBM, kontribusi inflasi inti tercatat hanya sekitar 3,31%, namun pasca kenaikan harga BBM inflasi inti berada pada level 4% hingga 5%. Begitu pula dengan inflasi makanan (*food inflation*), yang semula kontribusinya selalu lebih tinggi dari bukan makanan (*non food inflation*), maka

pasca kenaikan harga BBM, kontribusi inflasi *non food* menjadi lebih tinggi dari inflasi *food*.

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Inti, *Administered & Food* Kota Padang (y-o-y)
dalam %

Kelompok Barang & Jasa	2005		2006					
	Tw. IV		Tw. I		Tw. II		Tw. III	
	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.
Core	9,49	4,64	9,92	4,62	11,63	5,52	12,41	5,84
Non Core	30,97	15,84	17,80	9,50	20,85	10,94	16,19	8,57
Food	21,05	10,12	11,41	5,63	13,19	6,39	8,86	4,38
Non Food	19,95	10,36	16,78	8,50	19,56	10,08	19,83	10,04
Administered	41,09	8,24	31,92	6,57	33,28	7,02	32,65	6,72
Non Administered	15,30	12,23	9,51	7,55	11,98	9,45	9,68	7,69

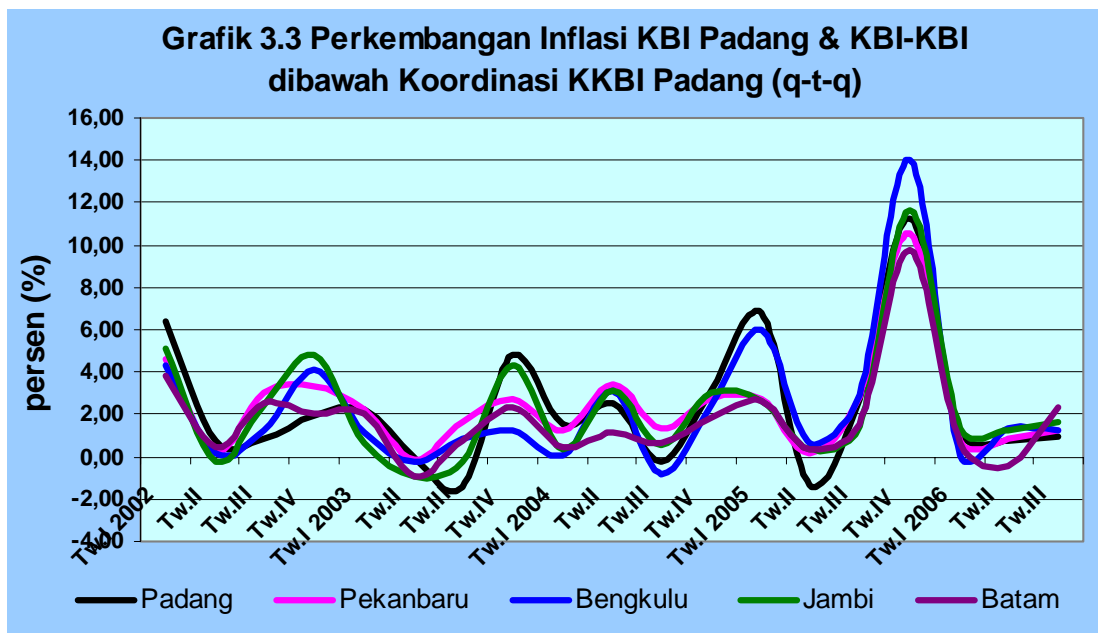
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

3.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota di Provinsi Tetangga

Tingkat harga-harga di kota Padang pada periode triwulan III-2006, diwarnai dengan kenaikan harga beberapa barang dan jasa yang memicu terjadinya inflasi. Di triwulan III-2006 kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,93%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 0,71%. Selama periode triwulan III-2006, kota Padang mengalami inflasi pada bulan Juli 2006 sebesar 0,93%. Sedangkan pada bulan Agustus 2006 sempat mengalami deflasi sebesar -0,88%, dan kembali mengalami inflasi di bulan September 2006 sebesar 0,88%. Kelompok bahan makanan sebagai satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi, sangat berpengaruh terhadap pengereman angka inflasi di kota Padang. Hal ini dikarenakan kelompok bahan makanan memiliki sumbangan tertinggi dalam pembentukan inflasi kota Padang.

Secara nasional, inflasi pada triwulan III-2006 sebesar 1,16% (*q-t-q*) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 0,87% (*q-t-q*). Sementara itu, pergerakan inflasi triwulanan (*q-t-q*) kota-kota di provinsi tetangga seperti Pekanbaru, Bengkulu, Jambi dan Batam, pada triwulan III-2006 cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di kota Bengkulu. Kota-kota yang mengalami kenaikan angka inflasi yaitu kota Pekanbaru dari 0,89% pada triwulan II-2006 menjadi 1,21% pada triwulan III-2006, kota Jambi dari 1,20% pada triwulan II-2006 menjadi 1,61% pada triwulan III-2006, dan kota Batam dari -0,40% pada triwulan II-2006 menjadi 2,30% pada triwulan III-2006. Sementara kota yang mengalami penurunan

angka inflasi yaitu kota Bengkulu dari 1,32% pada triwulan II-2006 menjadi 1,23% pada triwulan III-2006 (Grafik 3.3).



Dilihat dari inflasi bulanan (*m-t-m*), pada bulan Juli 2006 kota-kota tersebut mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di kota Batam sebesar 1,21% sedangkan inflasi terendah di kota Jambi sebesar -0,09%. Pada bulan Agustus 2006, inflasi tertinggi terjadi di kota Pekanbaru sebesar 0,72% dan terendah di kota Padang yang deflasi sebesar -0,88%. Di bulan September 2006, inflasi tertinggi terjadi di kota Jambi sebesar 1,62% dan terendah di kota Pekanbaru sebesar 0,05% (Tabel 3.2).

Dari pergerakan angka inflasi tersebut, laju inflasi s.d September 2006 (*y-t-d*) tertinggi masih terjadi di kota Jambi dengan laju inflasi sebesar 4,26%, disusul kota Pekanbaru sebesar 2,86%, dan berturut-turut kota Padang sebesar 2,84%, kota Bengkulu dengan laju inflasi sebesar 2,66% dan kota Batam sebesar 2,56%. Sementara laju inflasi nasional sampai dengan September 2006 sebesar 4,06%. Laju inflasi s.d September 2006 tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi September 2005 yang berkisar 6% hingga 12%. Dengan pergerakan demikian, target inflasi Bank Indonesia tahun 2006 sebesar 8% (plus minus 1%) diperkirakan akan tercapai bahkan dengan angka inflasi lebih rendah lagi (dengan asumsi tidak terjadi *internal & eksternal shock*).

Tabel. 3.2 Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (m-t-m, %)

Periode	Nasional	Kota				
		Padang	Pekanbaru	Bengkulu	Jambi	Batam
2005						
Jan	1,43	2,37	1,34	3,62	2,49	1,64
Feb	-0,17	-0,01	-0,02	-0,42	-1,38	-0,68
Mar	1,91	4,33	1,41	2,70	1,5	1,69
Apr	0,34	-0,14	0,50	-0,16	0,10	0,17
Mei	0,21	-0,85	-0,75	-0,41	0,05	-0,23
Jun	0,50	-0,33	0,44	1,21	0,20	0,45
Jul	0,78	1,12	1,37	1,47	1,53	0,64
Agt	0,55	0,41	1,15	0,93	-0,27	0,86
Sept	0,69	1,20	0,32	0,51	0,15	0,02
Okt	8,70	10,74	8,73	12,50	10,47	7,95
Nov	1,31	2,11	2,47	2,24	1,74	1,95
Des	-0,04	-1,62	-0,74	-0,85	-0,70	-0,30
2006						
Jan	1,36	-0,91	0,56	1,30	0,92	1,32
Feb	0,58	1,02	0,29	-0,70	0,11	0,10
Mar	0,03	1,07	-0,11	-0,50	0,34	-0,75
Apr	0,05	-0,19	-0,09	-0,50	-0,77	-0,56
Mei	0,37	0,24	0,24	0,22	0,70	-0,02
Jun	0,45	0,65	0,73	1,60	1,28	0,19
Jul	0,45	0,93	0,44	0,77	0,27	1,21
Agt	0,33	-0,88	0,72	-0,17	-0,28	0,07
Sept	0,38	0,88	0,05	0,62	1,62	1,00
Akumulasi 6 bln	4,00	2,81	2,83	2,65	4,19	2,56
y-t-d (Sept'06)	4,06	2,84	2,86	2,66	4,26	2,56

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa

Berdasarkan kelompok barang & jasa, hampir semua kelompok barang & jasa mengalami inflasi kecuali kelompok bahan makanan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 5,46% (sumb. inflasi 0,31%), disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 2,98% (sumb. inflasi 0,50%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok perumahan sebesar 1,15% (sumb. inflasi 0,23%), kelompok sandang sebesar 0,80% (sumb. inflasi 0,06%), kelompok kesehatan sebesar 0,32% (sumb. inflasi 0,01%), dan kelompok transportasi sebesar 0,10% (sumb. inflasi 0,02%). Sementara itu, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar -0,63% dengan sumbangan deflasi sebesar -0,19% (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kel. Barang (q-t-q)

dalam %

Kelompok Barang & Jasa	2005				2006					
	Tw. III		Tw. IV		Tw. I		Tw. II		Tw. III	
	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.
UMUM / TOTAL	2,75	2,75	11,25	11,25	1,17	1,17	0,71	0,71	0,93	0,93
Bahan Makanan	5,75	1,81	10,43	3,37	-1,34	-0,43	-2,35	-0,74	-0,63	-0,19
Makanan Jadi	2,61	0,45	5,72	0,98	5,43	0,88	0,05	0,01	2,98	0,50
Perumahan	0,45	0,09	8,22	1,62	2,29	0,44	4,82	0,93	1,15	0,23
Sandang	3,62	0,27	4,23	0,32	0,55	0,04	5,28	0,37	0,80	0,06
Kesehatan	0,92	0,03	2,30	0,07	5,52	0,16	-0,18	-0,01	0,32	0,01
Pendidikan	0,37	0,02	8,25	0,48	0,11	0,01	1,57	0,09	5,46	0,31
Transportasi & Komk	0,58	0,09	30,61	4,41	0,48	0,08	0,31	0,05	0,10	0,02

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat,

Kelompok bahan makanan yang mengalami deflasi sejak triwulan I-2006, terus mengalami deflasi hingga triwulan III-2006. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar -0,63% (q-t-q) dengan sumbangan deflasi sebesar -0,19%. Berbeda dengan triwulan II-2006, deflasi pada kelompok bahan makanan di triwulan laporan disebabkan oleh deflasi pada sub kelompok sayur-sayuran sebesar -11,04%, disusul kemudian deflasi pada sub kelompok buah-buahan sebesar -5,93%, sub kelompok ikan diawetkan sebesar -4,24%, dan sub kelompok lemak & minyak sebesar -0,76%.

Sementara itu, sub kelompok lainnya mengalami inflasi, dengan urutan sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 5,93%, sub kelompok daging & hasil-hasilnya sebesar 3,82%, sub kelompok telur, susu & hasil-hasilnya sebesar 2,68%, sub kelompok ikan segar sebesar 1,37%, sub kelompok kacang-kacangan sebesar 1,31%, sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 1,02% dan padi-padian sebesar 0,24%. Walaupun mengalami inflasi, namun komoditi-komoditi tersebut sumbangannya lebih rendah dibandingkan komoditi yang mengalami deflasi (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Bahan Makanan	-5,45	5,75	10,43	-1,34	-2,35	-0,63
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	-12,71	1,59	4,86	18,84	-9,65	0,24
Daging dan Hasil-hasilnya	-0,47	0,48	7,93	-2,14	2,46	3,82
Ikan Segar	-2,91	10,28	0,28	-14,08	15,01	1,37
Ikan Diawetkan	-2,25	4,33	14,78	-9,28	2,99	-4,24
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	2,45	1,77	5,27	-2,10	1,06	2,68
Sayur-sayuran	-19,45	6,84	21,05	-2,64	3,20	-11,04
Kacang-kacangan	-0,78	4,27	7,97	0,68	13,58	1,31
Buah-buahan	3,65	-4,22	16,26	1,95	-4,37	-5,93
Bumbu-bumbuan	1,46	27,33	39,94	-21,60	-21,00	1,02
Lemak & Minyak	4,41	5,62	-2,38	-0,18	2,49	-0,76
Bahan makanan lainnya	-2,98	1,36	0,35	-0,02	-2,61	5,93

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Beberapa harga komoditi yang masuk dalam kategori sayur-sayuran, seperti tomat sayur, jengkol, petai, terong panjang dan kol putih/kubis, mengalami penurunan harga yang cukup signifikan karena melimpahnya pasokan atau stok di pasaran. Berhasilnya panen komoditi sayuran salah satunya karena relatif terkendalinya serangan hama tanaman. Begitu pula pada beberapa jenis buah yang diperdagangkan di Sumatera Barat, seperti jeruk, tomat buah dan salak, pada periode laporan cukup tersedia dalam jumlah yang memadai. Disisi lain, harga daging ayam ras dan telur ayam ras justru mengalami kenaikan harga akibat harga pakan ayam yang terus meningkat, dan banyaknya peternak yang mulai mengurangi jumlah ternaknya akibat kekhawatiran terserang flu burung (*avian influenza*).

Pada **kelompok makanan jadi**, setelah mengalami inflasi yang relatif rendah pada triwulan II-2006, kembali meningkat di triwulan III-2006 yaitu sebesar 2,98% (*q-t-q*). Inflasi tersebut disumbang dari inflasi yang terjadi pada sub kelompok makanan jadi sebesar 5,38%. Meningkatnya harga jenis makanan ketupat/lontong sayur pada sub kelompok makanan jadi merupakan imbas dari naiknya harga bahan baku seperti sayur buncis, cabe merah dan telur ayam.

Sementara itu, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar -0,30%. Deflasi tersebut disumbang dari komoditi gula pasir yang mengalami penurunan harga sebagai dampak adanya impor gula pasir ke Sumatera Barat. Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai, pada bulan Agustus 2006 tercatat adanya impor gula pasir ke Sumatera Barat senilai USD134.418. Sedangkan sub kelompok tembakau & minuman beralkohol sejak triwulan II-2006 tidak mengalami perubahan harga dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,68	2,61	5,72	5,43	0,05	2,98
Makanan Jadi	3,35	0,88	10,20	1,87	0,03	5,38
Minuman yang Tidak Beralkohol	-5,73	14,03	0,22	4,09	0,21	-0,30
Tembakau & Minuman Beralkohol	2,66	-0,01	0,00	14,18	0,00	0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Di triwulan III-2006, **kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar**, mengalami inflasi sebesar 1,15% (*q-t-q*) atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 4,82%. Meningkatnya angka inflasi tersebut disumbangkan dari seluruh sub kelompoknya, terutama dari inflasi pada sub kelompok biaya tempat tinggal

sebesar 1,89%, disusul kemudian sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 1,71%, sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga sebesar 0,86%, dan sub kelompok bahan bakar, penerangan & air mengalami inflasi sebesar 0,01%. Inflasi pada sub kelompok biaya tempat tinggal masih berasal dari kenaikan harga sewa dan kontrak rumah. Naiknya harga beberapa komponen bangunan rumah seperti seng, kayu lapis dan batako ikut memberi andil meningkatnya harga sewa/kontrak rumah (Tabel 3.6).

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,07	0,45	8,22	2,29	4,82	1,15
Biaya Tempat Tinggal	-0,47	0,43	1,74	4,87	4,72	1,89
Bahan Bakar, Penerangan & Air	0,00	0,25	19,15	0,00	6,82	0,01
Perlengkapan Rumah Tangga	1,79	1,57	7,96	-0,28	1,05	1,71
Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,71	0,00	5,85	-0,05	1,46	0,86

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Inflasi **kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan** sejak triwulan I-2006 terus mengalami penurunan. Pada triwulan III-2006 inflasi sektor ini sebesar 0,10% (q-t-q). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,31%. Inflasi pada triwulan laporan terutama disumbang oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok sarana & penunjang transportasi sebesar 0,44%, disusul kemudian sub kelompok jasa keuangan sebesar 0,39%, dan sub kelompok transportasi sebesar 0,09%. Sementara sub kelompok komunikasi & pengiriman tidak mengalami perubahan harga di triwulan laporan (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,59	0,58	30,61	0,48	0,31	0,10
Transportasi	0,00	0,75	42,24	0,11	0,37	0,09
Komunikasi & Pengiriman	0,00	0,00	0,41	0,00	0,13	0,00
Sarana & Penunjang Transportasi	11,75	0,80	2,34	6,99	0,00	0,44
Jasa Keuangan	0,00	0,00	1,19	4,46	0,00	0,39

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Setelah mengalami deflasi pada triwulan II-2006, **kelompok kesehatan** di triwulan III-2006 kembali mengalami inflasi yang tercatat sebesar 0,32% (q-t-q). Inflasi yang terjadi tersebut disumbang dari sub kelompok jasa perawatan & jasmani sebesar 4,22% dan sub kelompok perawatan jasmani & kosmetik sebesar 0,12%. Sementara sub kelompok jasa

kesehatan dan sub kelompok obat-obatan tidak mengalami perubahan harga dari triwulan sebelumnya. (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Kesehatan	1,80	0,92	2,30	5,52	-0,18	0,32
Jasa Kesehatan	0,00	5,61	0,00	11,45	0,00	0,00
Obat-obatan	0,00	0,00	1,55	2,37	2,32	0,00
Jasa Perawatan & Jasmani	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22
Perawatan Jasmani & Kosmetik	1,56	-0,82	3,74	4,05	-0,69	0,12

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Pada triwulan III-2006 **kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga** merupakan kelompok yang mengalami inflasi tertinggi di kota Padang. Pada triwulan laporan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 5,46% (q-t-q), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,57%. Inflasi yang terjadi disumbang dari inflasi pada sub kelompok jasa pendidikan sebesar 5,09%, sub kelompok olahraga sebesar 4,21% dan sub kelompok rekreasi sebesar 0,38%. Sementara itu, sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan mengalami deflasi sebesar -0,80%, sedangkan sub kelompok kursus pelatihan tidak mengalami perubahan harga pada triwulan laporan (Tabel 3.9).

Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	-0,01	0,37	8,25	0,11	1,57	5,46
Jasa Pendidikan	0,00	0,77	8,85	0,00	0,15	8,45
Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	0,00	-1,64	8,87	1,70	4,62	-0,80
Rekreasi	-0,06	0,38	6,79	0,00	5,09	0,38
Olahraga	0,00	0,00	3,72	0,66	0,00	4,21

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pemerintah, nampaknya belum mampu mengerem peningkatan biaya masuk sekolah pada beberapa sekolah SLTP dan SMU di Sumatera Barat. Selain biaya SLTP dan SMU, tekanan inflasi pada sub kelompok jasa pendidikan juga berasal dari sekolah dasar dan taman bermain anak-anak meskipun bobotnya tidak terlalu tinggi. Sementara itu, pada setiap tahun ajaran baru, umumnya pasokan alat-alat keperluan sekolah seperti buku bacaan/pelajaran, text book, pensil dan bollpoint, cukup tersedia di pasaran sehingga relatif tidak mengalami kenaikan harga, kecuali harga buku tulis bergaris yang meningkat.

Pada triwulan III-2006 **kelompok sandang** mengalami inflasi sebesar 0,80% (*q-t-q*). Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan II-2006 yang tercatat sebesar 5,28%. Inflasi yang terjadi pada kelompok sandang akibat dari meningkatnya harga pada sub kelompok sandang anak-anak yang mengalami inflasi sebesar 1,55%, disusul kemudian sub kelompok sandang laki-laki sebesar 1,33%, sub kelompok sandang wanita sebesar 0,54% dan sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya sebesar 0,38% (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2005			2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Sandang	0,47	3,62	4,23	0,55	5,28	0,80
Sandang Laki-laki	1,13	1,02	1,23	0,77	1,50	1,33
Sandang Wanita	0,00	0,52	2,36	-0,83	5,29	0,54
Sandang Anak-anak	0,48	2,44	1,85	0,79	1,35	1,55
Barang Pribadi, Sandang lainnya	0,41	9,63	9,45	1,57	9,58	0,38

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Faktor musiman tahun ajaran baru sekolah meningkatkan permintaan seragam sekolah anak, seragam sekolah pria, kaus singlet, kaus kaki, sepatu dewasa, dll, yang memberi tekanan inflasi pada sub kelompok sandang laki-laki dan sub kelompok sandang anak-anak. Sementara itu, memasuki triwulan III-2006, harga emas di pasar internasional masih pada posisi yang cukup tinggi, namun dengan tingkat kenaikan harga yang berangsur-angsur melemah. Harga emas gram kadar 70% yang sempat mencapai Rp140.000/gram diprediksi akan tetap berada pada level harga tersebut dengan kecenderungan yang menurun pada beberapa bulan ke depan.

3.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar

Dilihat secara lebih spesifik, komoditi-komoditi yang merupakan penyumbang inflasi terbesar (total sumbangan sebesar 1,77%) pada triwulan III-2006 (*q-t-q*), antara lain adalah : ketupat/lontong sayur dengan sumbangan inflasi sebesar 0,45%, selanjutnya adalah cabe merah (0,33%), SLTA (0,23%), kontrak rumah (0,14%), daging ayam ras (0,12%), SLTP (0,07%), ikan tuna (0,06%), telur ayam ras (0,05%), minyak goreng (0,04%), rendang (0,04%), buncis (0,03%), kerapu (0,03%), kentang (0,03%), kayu lapis (0,03%), ketimun (0,02%), cabe rawit (0,02%), teri (0,02%), cabe hijau (0,02%), ketela rambat (0,02%), dan buah apel sebesar 0,02% (Tabel 3.11).

Tabel 3.11 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw II/06		Komoditi	Tw III/06	
		Inflasi	Sumb.		Inflasi	Sumb.
1	Tarip Air Minum PAM	52,17%	0,44%	Ketupat/Lontong Sayur	31,25%	0,45%
2	Tongkol	27,47%	0,37%	Cabe Merah	28,91%	0,33%
3	Kontrak Rumah	9,72%	0,26%	SLTA	39,38%	0,23%
4	Emas Perhiasan	11,39%	0,21%	Kontrak Rumah	4,86%	0,14%
5	Jengkol	114,44%	0,18%	Daging Ayam Ras	10,65%	0,12%
6	Sewa Rumah	6,08%	0,15%	SLTP	14,67%	0,07%
7	Bawang Putih	45,45%	0,11%	Tuna	19,38%	0,06%
8	Bawang Merah	15,62%	0,10%	Telur Ayam Ras	5,74%	0,05%
9	Tahu Mentah	18,18%	0,09%	Minyak Goreng	3,16%	0,04%
10	Kelapa	13,82%	0,09%	Rendang	11,12%	0,04%
11	Daging Ayam Ras	6,81%	0,07%	Buncis	54,18%	0,03%
12	Udang Basah	25,00%	0,07%	Kerapu	16,67%	0,03%
13	Baju Muslim	14,99%	0,06%	Kentang	9,17%	0,03%
14	Kol Putih/Kubis	56,24%	0,06%	Kayu Lapis	9,02%	0,03%
15	Kakap Merah	25,00%	0,05%	Ketimun	23,07%	0,02%
16	Bensin	1,51%	0,05%	Cabe Rawit	37,06%	0,02%
17	Tempe	20,69%	0,05%	Teri	12,90%	0,02%
18	Surat Kabar Harian	23,62%	0,04%	Cabe Hijau	26,92%	0,02%
19	Kerapu	20,00%	0,03%	Ketela Rambat	26,04%	0,02%
20	Buku Tulis Bergaris	20,83%	0,03%	Apel	9,10%	0,02%
	Total Sumbangan Komoditi lain		2,51%	Total Sumbangan Komoditi lain		1,77%
	Inflasi	0,71%	-1,80%	Inflasi	0,93%	-0,84%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Selain terdapat komoditi/jasa yang mengalami inflasi, pada triwulan III-2006 terdapat pula beberapa komoditi/jasa yang mengalami deflasi. Komoditi-komoditi yang mengalami deflasi terbesar, dengan total sumbangan sebesar -1,04%, diantaranya adalah bawang merah dengan sumbangan deflasi sebesar -0,16%, selanjutnya adalah bawang putih (-0,16%), jengkol (-0,15%), buah jeruk (-0,12%), tomat sayur (-0,09%), ikan tongkol (-0,07%), petai (-0,07%), kelapa (-0,06%), kangkung (-0,03%), kol putih/kubis (-0,03%), terong panjang (-0,03%), bensin (-0,02%), nangka muda (-0,01%), salak (-0,01%), daun singkong (-0,01%), ikan sepat siam (-0,01%), kacang panjang (-0,01%), ikan asin belah (-0,01%), tomat buah (-0,01%), dan buah anggur sebesar -0,01% (Tabel 3.12).

Tabel 3.12 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw II/06		Komoditi	Tw III/06	
		Deflasi	Sumb.		Deflasi	Sumb.
1	Cabe Merah	-45,13%	-0,94%	Bawang Merah	-21,64%	-0,16%
2	Beras	-10,17%	-0,88%	Bawang Putih	-43,75%	-0,16%
3	Tomat Sayur	-26,32%	-0,08%	Jengkol	-45,09%	-0,15%
4	Kentang	-10,77%	-0,04%	Jeruk	-17,90%	-0,12%
5	Pepaya	-10,77%	-0,04%	Tomat Sayur	-39,97%	-0,09%
6	Minyak Goreng	-3,01%	-0,04%	Tongkol	-4,31%	-0,07%
7	Cabe Rawit	-30,95%	-0,02%	Petai	-29,52%	-0,07%
8	Shampo	-6,29%	-0,02%	Kelapa	-7,62%	-0,06%
9	Alpukat	-25,00%	-0,02%	Kangkung	-7,17%	-0,03%
10	Tomat Buah	-29,17%	-0,02%	Kol Putih/Kubis	-16,92%	-0,03%
11	Ikan Asin Belah	-12,29%	-0,02%	Terong Panjang	-31,47%	-0,03%
12	Cabe Hijau	-21,21%	-0,02%	Bensin	-0,74%	-0,02%
13	Apel	-7,78%	-0,02%	Nangka Muda	-11,11%	-0,01%
14	Kacang Panjang	-15,72%	-0,02%	Salak	-14,29%	-0,01%
15	Mie Kering Instan	-4,60%	0,01%	Daun Singkong	-8,57%	-0,01%
16	Buncis	-16,67%	0,01%	Sepat Siam	-8,86%	-0,01%
17	Wortel	-11,11%	0,01%	Kacang Panjang	-14,00%	-0,01%
18	Kacang Tanah	-10,52%	0,01%	Ikan Asin Belah	-8,41%	-0,01%
19	Anggur	-7,38%	0,01%	Tomat Buah	-18,58%	-0,01%
20	Ketimun	-7,14%	0,01%	Anggur	-7,06%	-0,01%
	Total Sumbangan Komoditi lain		-2,15%	Total Sumbangan Komoditi lain		-1,04%
	Inflasi	0,71%		Inflasi	0,93%	

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

BAB 4

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

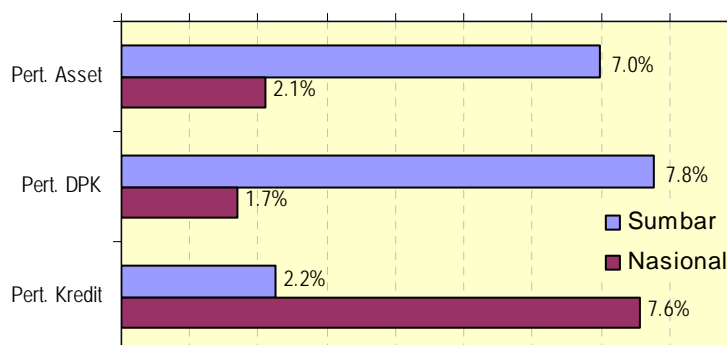
Kinerja perbankan di Sumbar pada triwulan III-2006 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang positif. Stabilitas sistem keuangan regional Sumbar selama triwulan laporan secara umum relatif terjaga. Hal ini terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang cukup terkendali, meskipun disertai dengan tekanan risiko kredit yang sedikit meningkat.

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan menunjukkan peningkatan transaksi tunai sementara itu transaksi non-tunai cenderung menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

4.1. Perkembangan Perbankan

Indikator-indikator kegiatan usaha perbankan menunjukkan peningkatan selama triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti terlihat dari pertumbuhan positif yang dialami total asset, dana yang dihimpun serta kredit yang disalurkan baik oleh bank umum maupun BPR.

Grafik 4.1. Perbandingan Kegiatan Usaha Perbankan Sumbar dan Nasional Triwulan III - 2006



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKD) Sumbar dan Statistik Perbankan Indonesia; *diolah*

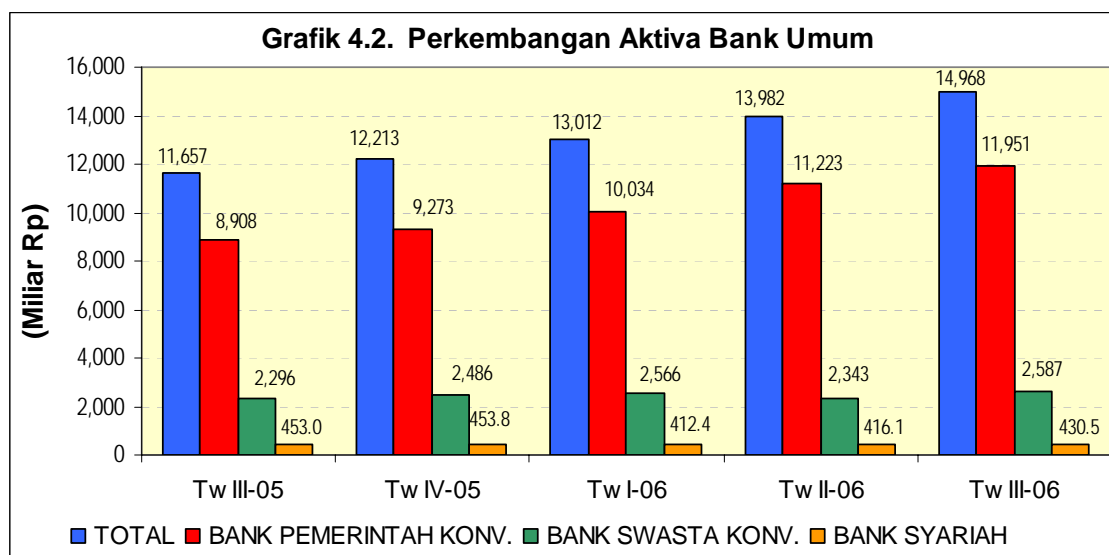
Apabila dibandingkan dengan perbankan nasional (grafik 4.1), perkembangan kegiatan usaha perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) di triwulan III-2006 relatif lebih baik, terlihat dari pertumbuhan asset dan DPK yang dialami perbankan Sumbar masing-masing sebesar 7,0% dan 7,8%, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada perbankan nasional masing-masing sebesar 2,1% dan 1,7%. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 7,6%, tercatat lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan kredit perbankan Sumbar yang hanya meningkat 2,2%. Dilihat dari nisbah kredit terhadap DPK (LDR), nisbah LDR perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) telah mencapai 96,4%, jauh lebih tinggi dibanding LDR nasional sekitar 64,7%.

4.1.1. Perkembangan Bank Umum

4.1.1.1. Total Asset

Total asset bank umum di Provinsi Sumbar pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp14.968 miliar (Grafik 4.2), naik sebesar Rp986 miliar (7,05%) dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan asset terjadi pada semua kelompok bank dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh kelompok bank swasta konvensional sebesar 10,38%. Berdasarkan pangsa, kelompok bank pemerintah konvensional mempunyai pangsa terbesar yakni sebesar 79,84%. Sedangkan pangsa bank syariah masih relatif kecil yaitu sebesar 2,88%.



Dilihat dari komposisi aktiva produktifnya (tabel 4.1), bank umum di Sumbar pada triwulan III-2006 menempatkan portofolio terbesarnya pada kredit yang diberikan (77,90%), selanjutnya dalam bentuk penempatan pada BI (14,03%) dan penempatan pada bank lain (7,25%). Pangsa kredit di dalam aktiva produktif mengalami sedikit penurunan, dari 79,93% pada tahun triwulan II-2006 menjadi 77,90% pada triwulan laporan. Sementara itu komposisi penempatan pada BI terus mengalami peningkatan, dari 13,81% pada triwulan II-2006 menjadi 14,03% pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penempatan pada giro yang mengalami kenaikan sebesar 28,20%, yaitu dari Rp259,2 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp332,3 miliar pada triwulan laporan. Sementara itu penempatan pada SBI masih mengalami peningkatan sebesar 3,17% atau menjadi Rp1.175,9 miliar.

Tabel 4.1. Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum

Keterangan	Nominal (jutaan rupiah)				Komposisi			Pertumbuhan (qtq)		
	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06
Penempatan pada BI	563,882	998,118	1,399,389	1,508,180	10.67%	13.81%	14.03%	77.01%	40.20%	7.77%
Giro	153,321	181,284	259,205	332,288	1.94%	2.56%	3.09%	18.24%	42.98%	28.20%
SBI	410,056	816,229	1,139,787	1,175,892	8.73%	11.25%	10.94%	99.05%	39.64%	3.17%
Lainnya	505	605	397	-	0.01%	0.00%	0.00%	19.80%	-34.38%	-100.00%
Penempatan pada Bank lain	359,586	423,157	558,378	779,915	4.53%	5.51%	7.25%	17.68%	31.96%	39.68%
Surat Berharga	22,807	22,807	23,352	22,518	0.24%	0.23%	0.21%	0.00%	2.39%	-3.57%
Kredit Yang Diberikan	7,663,351	7,856,455	8,098,307	8,375,351	84.02%	79.93%	77.90%	2.52%	3.08%	3.42%
Garansi yang diberikan	47,854	50,253	51,792	64,811	0.54%	0.51%	0.60%	5.01%	3.06%	25.14%
TOTAL	8,656,921	9,350,790	10,131,218	10,750,775	100.00%	100.00%	100.00%	8.02%	8.35%	6.12%

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU/LBUS)

4.1.1.2. Penghimpunan Dana

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar pada triwulan III-2006 mencapai Rp10.522,1 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp771,7 miliar (7,91%) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya (Tabel 4.2). Menurut kelompok bank, peningkatan DPK dialami baik oleh kelompok bank pemerintah maupun bank swasta masing-masing sebesar 8,90% dan 4,28%.

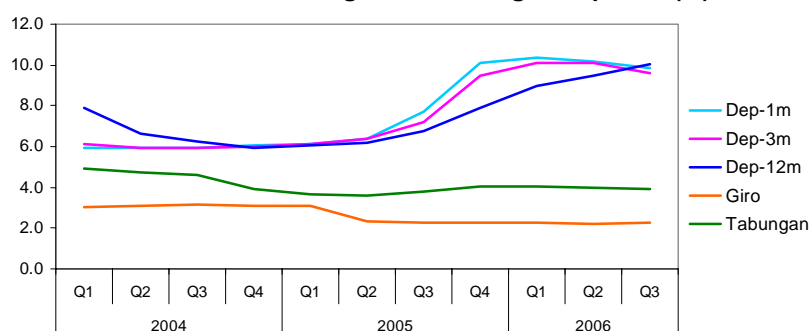
Tabel 4.2. Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Simpanan

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)				Pangsa (%)			Pert. (% , q-t-q)		
	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06
Dana Pihak Ketiga	8,956.3	9,112.7	9,750.5	10,522.1	100.00	100.00	100.00	1.75	7.00	7.91
Giro	2,265.0	2,582.2	2,899.0	3,132.3	28.34	29.73	29.77	14.01	12.27	8.05
Simp. Berjangka	2,785.1	3,114.6	3,250.8	3,463.8	34.18	33.34	32.92	11.83	4.38	6.55
Tabungan	3,906.1	3,415.9	3,600.6	3,926.1	37.49	36.93	37.31	-12.55	5.41	9.04
I. Bank Pemerintah	6,808.2	7,062.8	7,677.5	8,360.5	100.00	100.00	100.00	3.74	8.70	8.90
Giro	1,987.8	2,326.4	2,647.9	2,845.1	32.94	34.49	34.03	17.03	13.82	7.45
Simp. Berjangka	1,659.9	2,021.8	2,153.4	2,397.4	28.63	28.05	28.68	21.81	6.51	11.33
Tabungan	3,160.5	2,714.6	2,876.1	3,118.0	38.44	37.46	37.29	-14.11	5.95	8.41
II. Bank Swasta	2,148.0	2,049.9	2,073.0	2,161.6	100.00	100.00	100.00	-4.57	1.13	4.28
Giro	277.1	255.8	251.1	287.2	12.48	12.11	13.29	-7.68	-1.85	14.37
Simp. Berjangka	1,125.2	1,092.7	1,097.4	1,066.4	53.31	52.94	49.33	-2.89	0.43	-2.83
Tabungan	745.7	701.4	724.5	808.1	34.21	34.95	37.38	-5.94	3.30	11.54

Sumber: Buku Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah (SEKD) Sumbar

Menurut jenis simpanan, semua jenis simpanan menunjukkan peningkatan, tertinggi dialami oleh tabungan sebesar 9,04%. Kemudian diikuti oleh giro dan simpanan berjangka yang masing-masing meningkat sebesar 8,05% dan 6,55%. Peningkatan tabungan dan deposito tersebut terjadi ketika suku bunga deposito (tenor 1 bulan dan 3 bulan) dan tabungan mengalami sedikit penurunan (grafik 4.3). Dengan demikian masuknya dana masyarakat ke dalam sistem perbankan pada triwulan laporan tidak dipengaruhi oleh tren penurunan suku bunga simpanan.

Grafik 4.3. Perkembangan Suku Bunga Simpanan (%)



Dilihat dari struktur jangka waktunya (tabel 4.3), simpanan berjangka yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar sebagian besar merupakan simpanan jangka pendek. Pangsa deposito berjangka waktu 1 bulan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 64,52% dari total deposito, diikuti oleh deposito 3-bulan dengan pangsa 13,04%. Namun dilihat dari pertumbuhannya, deposito 1-bulan hanya meningkat sebesar 7,54% atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan deposito berjangka waktu lebih panjang. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh deposito 6-bulan yakni sebesar 16,62%.

Berdasarkan kelompok banknya, struktur jangka waktu deposito di bank pemerintah didominasi oleh deposito 1 bulan dengan pangsa sebesar 73,73%, diikuti oleh deposito 3-bulan dengan pangsa 8,36%. Sementara itu pada kelompok bank swasta, pangsa terbesar terdapat pada deposito 1-bulan dan 3-bulan masing-masing sebesar 43,81% dan 23,55%.

Tabel 4.3. Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)				Pangsa			Pertumbuhan		
	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06
BANK PEMERINTAH										
1 bulan	1,100.81	1,502.63	1,578.04	1,767.54	74.32%	73.28%	73.73%	36.50%	5.02%	12.01%
3 bulan	192.77	189.57	227.49	200.42	9.38%	10.56%	8.36%	-1.66%	20.01%	-11.90%
6 bulan	98.45	100.00	129.11	158.06	4.95%	6.00%	6.59%	1.58%	29.11%	22.42%
12 bulan	78.46	140.04	162.33	172.49	6.93%	7.54%	7.19%	78.48%	15.91%	6.26%
lainnya	189.41	89.61	56.44	98.90	4.43%	2.62%	4.13%	-52.69%	-37.02%	75.24%
BANK SWASTA										
1 bulan	673.73	505.45	500.07	467.21	46.26%	45.57%	43.81%	-24.98%	-1.07%	-6.57%
3 bulan	170.14	281.70	286.12	251.17	25.78%	26.07%	23.55%	65.57%	1.57%	-12.22%
6 bulan	21.02	54.09	75.54	80.60	4.95%	6.88%	7.56%	157.38%	39.66%	6.69%
12 bulan	24.68	23.81	23.82	29.53	2.18%	2.17%	2.77%	-3.54%	0.06%	23.95%
lainnya	235.68	227.66	211.86	237.86	20.83%	19.31%	22.31%	-3.40%	-6.94%	12.28%
TOTAL										
1 bulan	1,774.54	2,008.08	2,078.11	2,234.75	64.47%	63.93%	64.52%	13.16%	3.49%	7.54%
3 bulan	362.91	471.27	513.61	451.59	15.13%	15.80%	13.04%	29.86%	8.98%	-12.08%
6 bulan	119.46	154.09	204.65	238.66	4.95%	6.30%	6.89%	28.99%	32.81%	16.62%
12 bulan	103.15	163.85	186.15	202.02	5.26%	5.73%	5.83%	58.85%	13.61%	8.53%
lainnya	425.08	317.27	268.29	336.76	10.19%	8.25%	9.72%	-25.36%	-15.44%	25.52%

Sumber: SEKD Sumbar

Berdasarkan kepemilikan dana simpanan di bank umum (tabel 4.4), nasabah perorangan merupakan pemilik DPK terbesar dengan pangsa 61,10%, diikuti oleh nasabah berkategori lainnya (21,52%) dan pemerintah (5,80%). Dilihat dari pertumbuhannya,

peningkatan tertinggi terjadi pada dana milik perusahaan asuransi (77,85%), diikuti oleh dana milik pemerintah (15,40%), dan dana badan/lembaga pemerintah (9,25%).

Tabel 4.4. Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)				Komposisi			Pertumbuhan		
	T. IV-05	T. I-06	T. II-06	T. III-06	T. I-06	T. II-06	T. III-06	T. I-06	T. II-06	T. III-06
Pemerintah	677.3	502.0	528.9	610.4	5.51%	5.42%	5.80%	-25.88%	5.35%	15.40%
Badan/Lembaga Pemerintah	109.2	81.1	23.5	25.6	0.89%	0.24%	0.24%	-25.70%	-71.08%	9.25%
Perusahaan Asuransi	73.7	120.8	132.9	236.4	1.33%	1.36%	2.25%	63.81%	10.04%	77.85%
Badan Usaha Milik Negara	307.9	184.3	230.3	201.3	2.02%	2.36%	1.91%	-40.13%	24.96%	-12.62%
Perusahaan Swasta	452.5	326.2	358.9	381.4	3.58%	3.68%	3.62%	-27.93%	10.02%	6.29%
Yayasan dan Badan Sosial	284.3	281.5	270.0	270.9	3.09%	2.77%	2.57%	-0.99%	-4.08%	0.34%
Koperasi	61.5	53.2	55.2	59.3	0.58%	0.57%	0.56%	-13.54%	3.82%	7.49%
Perorangan	6,263.4	5,765.4	5,892.2	6,429.1	63.27%	60.43%	61.10%	-7.95%	2.20%	9.11%
Lainnya	692.0	1,755.8	2,210.0	2,264.2	19.27%	22.67%	21.52%	153.73%	25.87%	2.45%
Bukan Penduduk	34.4	42.4	48.5	43.5	0.47%	0.50%	0.41%	23.28%	14.37%	-10.24%
TOTAL	8,956.3	9,112.7	9,750.5	10,522.1	100.00%	100.00%	100.00%	1.75%	7.00%	7.91%

Sumber: SEKD Sumbar

Dilihat dari sebaran DPK menurut kabupaten/kota (tabel 4.5), penghimpunan dana masyarakat oleh bank umum masih terkonsentrasi di Kota Padang dengan pangsa 60,4%, diikuti oleh Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan pangsa 11,7%. Sementara itu, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Sawahlunto mencatat pangsa terendah dalam penghimpunan dana yaitu sebesar 5,3%.

Tabel 4.5. Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana

Posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan IV-2005		Triwulan I-2006		Triwulan II-2006		Triwulan III-2006	
	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa
Kota Padang	5,450.5	60.9%	5,229.1	57.4%	5,352.6	54.9%	5,887.3	60.4%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	1,087.7	12.1%	1,010.6	11.1%	1,082.6	11.1%	1,141.3	11.7%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	374.1	4.2%	448.8	4.9%	514.8	5.3%	543.8	5.6%
Kota Solok & Kab. Solok	489.1	5.5%	529.8	5.8%	613.7	6.3%	660.4	6.8%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	406.9	4.5%	468.1	5.1%	516.7	5.3%	522.8	5.4%
Kab. Swl/Sijunjung & Kota Sawahlunto	340.3	3.8%	396.8	4.4%	491.8	5.0%	518.3	5.3%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	332.8	3.7%	465.1	5.1%	525.6	5.4%	540.6	5.5%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	474.9	5.3%	564.4	6.2%	652.6	6.7%	707.7	7.3%
Total	8,248.9	100.0%	8,956.3	100.0%	9,750.5	100.0%	10,522.1	107.9%

Sumber: SEKD Sumbar

4.1.1.3. Penyaluran Kredit

Nilai kredit yang disalurkan oleh bank umum untuk proyek yang berlokasi di Sumbar hingga posisi triwulan laporan mencapai Rp10.067,2 miliar, meningkat Rp201,8 miliar (2,05%) dibandingkan posisi triwulan II-2006 (Tabel 4.6.). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 0,35%.

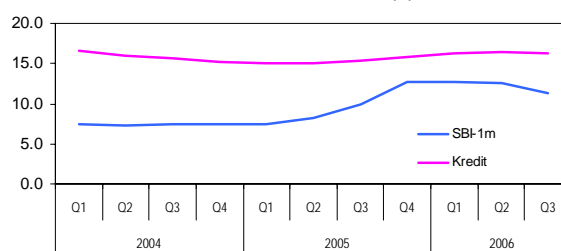
Tabel 4.6 Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)				Pangsa (%)			Pert. (% q-t-q)		
	Tw.IV-05	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06	Tw.I-06	Tw.II-06	Tw.III-06
Kelompok Bank	9,515.8	9,830.9	9,865.3	10,067.2	100.00	100.00	100.00	3.31	0.35	2.05
Bank Pemerintah	7,383.2	7,631.4	7,798.5	7,907.7	77.63	79.05	78.55	3.36	2.19	1.40
Bank Swasta	2,132.6	2,199.5	2,066.8	2,159.5	22.37	20.95	21.45	3.14	-6.03	4.48
Jenis Penggunaan	9,515.8	9,830.9	9,865.3	10,067.2	100.00	100.00	100.00	3.31	0.35	2.05
Modal Kerja	3,403.1	3,638.3	3,673.8	3,786.4	37.01	37.24	37.61	6.91	0.98	3.06
Investasi	2,794.5	2,801.6	2,693.9	2,713.4	28.50	27.31	26.95	0.25	-3.84	0.72
Konsumsi	3,318.2	3,391.0	3,497.7	3,567.5	34.49	35.45	35.44	2.20	3.15	2.00
Sektor Ekonomi	9,515.8	9,830.9	9,865.3	10,067.2	100.00	100.00	100.00	3.31	0.35	2.05
Pertanian	1,175.0	1,098.0	1,013.2	1,099.4	11.17	10.27	10.92	-6.55	-7.73	8.51
Pertambangan & Penggalian	42.6	42.9	17.6	21.4	0.44	0.18	0.21	0.80	-58.99	21.29
Perindustrian	993.8	1,210.6	1,162.6	1,085.8	12.31	11.78	10.79	21.81	-3.97	-6.60
Listrik, Gas & Air	1,313.2	1,296.0	1,261.3	1,244.7	13.18	12.78	12.36	-1.31	-2.68	-1.31
Konstruksi	120.3	120.1	120.6	144.1	1.22	1.22	1.43	-0.17	0.35	19.55
Perdag, Hotel & Restoran	2,084.4	2,167.1	2,259.4	2,352.1	22.04	22.90	23.36	3.97	4.26	4.10
Pengangktn & Komunikasi	133.0	134.7	132.6	121.3	1.37	1.34	1.21	1.29	-1.55	-8.50
Jasa-jasa	320.4	346.4	377.1	397.8	3.52	3.82	3.95	8.10	8.88	5.49
Lain-lain	3,333.1	3,415.0	3,521.0	3,606.6	34.74	35.69	35.77	2.46	3.11	2.26

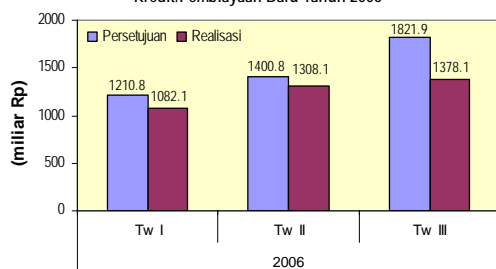
Sumber: SEKD Sumbang

Pertumbuhan kredit tersebut seiring pula dengan perkembangan suku bunga kredit yang sedikit turun, dari 16,38% pada akhir triwulan II-2006 menjadi 16,30% pada akhir triwulan laporan (Grafik 4.4). Penurunan tersebut sejalan dengan tren penurunan BI rate (diimplementasikan melalui suku bunga SBI tenor 1 bulan), yang telah mengalami penurunan sebanyak 125 basis poin, dari 12,50% pada akhir trwulan II-2006 menjadi 11,25% pada akhir triwulan laporan.

Grafik 4.4. Perkembangan Suku Bunga Kredit dan SBI-1 bulan: Q1-2004 s.d Q2-2006 (%)



Grafik 4.5. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Kredit/Pembiayaan Baru Tahun 2006



Selama triwulan III-2006, persetujuan kredit/pembiayaan baru oleh bank umum tercatat sebesar Rp1.821,9 miliar (Grafik 4.5) atau meningkat sebesar 30,06% dibandingkan dengan persetujuan triwulan sebelumnya sebesar Rp 1.400,8 miliar. Sementara pada periode yang sama, realisasi kredit/pembiayaan baru tercatat sebesar Rp1.378,1 miliar, naik 5,35% dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

Menurut kelompok bank, peningkatan kredit terjadi baik pada bank pemerintah maupun bank swasta masing-masing sebesar 1,40% dan 4,48%. Berdasarkan sektor ekonomi (tidak termasuk sektor lain-lain yang bersifat konsumtif), alokasi kredit terbesar diberikan terutama kepada kepada sektor perdagangan, hotel & restoran (23,36%), sektor listrik,

gas & air (12,36%), sektor pertanian (10,92%) dan sektor perindustrian (10,79%). Dilihat dari pertumbuhannya, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan kredit terbesar yakni 21,29%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 19,55%. Sementara itu, tiga sektor ekonomi mengalami penurunan kredit, tertinggi pada sektor pengangkutan & komunikasi (-8,50%).

Menurut jenis penggunaannya, alokasi kredit terbesar adalah kredit modal kerja (37,61%), diikuti kredit konsumsi (35,44%) dan kredit investasi (26,95%). Dalam hal pertumbuhannya, kredit modal kerja mencatat pertumbuhan tertinggi (3,06%) diikuti oleh kredit konsumsi (2,00%) dan kredit investasi (0,72%).

Tabel 4.7 Sebaran Kredit Bank Umum dan LDR Berdasarkan Lokasi Proyek

posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan IV-2005			Triwulan I-2006			Triwulan II-2006			Triwulan III-2006		
	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR
Kota Padang	4,052.4	42.6%	74.3%	4,230.6	43.0%	80.9%	4,162.0	42.2%	77.8%	4,147.7	41.2%	70.5%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	649.7	6.8%	59.7%	709.9	7.2%	70.2%	697.7	7.1%	64.4%	739.4	7.3%	64.8%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	435.0	4.6%	116.3%	450.2	4.6%	100.3%	473.5	4.8%	92.0%	496.3	4.9%	91.3%
Kota Solok & Kab. Solok	1,827.7	19.2%	373.7%	1,818.1	18.5%	343.2%	1,810.4	18.4%	295.0%	1,837.3	18.3%	278.2%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	371.8	3.9%	91.4%	389.2	4.0%	83.1%	411.2	4.2%	79.6%	437.4	4.3%	83.7%
Kab. Swl/Sijunjung & Kota Sawahlunto	643.0	6.8%	189.0%	671.6	6.8%	169.2%	706.1	7.2%	143.6%	735.3	7.3%	141.9%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	501.5	5.3%	150.7%	512.0	5.2%	110.1%	528.5	5.4%	100.6%	546.3	5.4%	101.1%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	1,034.7	10.9%	217.9%	1,049.3	10.7%	185.9%	1,075.8	10.9%	164.8%	1,127.4	11.2%	159.3%
Total	9,515.8	100.0%	115.4%	9,830.9	100.0%	109.8%	9,865.3	100.0%	101.2%	10,067.2	100.0%	95.7%

Sumber: SEKD Sumbar

Sama halnya dengan penghimpunan dana, penyaluran kredit juga terkonsentrasi di Kota Padang dengan pangsa 41,2% (Tabel 4.7). Kota Solok dan Kabupaten Solok menempati peringkat kedua untuk pangsa kredit terbesar (18,3%). Sedangkan pangsa terkecil terdapat pada Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (4,3%).

Berdasarkan lokasi proyek, nisbah kredit terhadap DPK (LDR-Gross) di Sumbar secara umum telah mencapai 95,7% pada akhir periode laporan, lebih rendah dibandingkan dengan nisbah LDR triwulan II-2006 sebesar 101,2% (Tabel 4.7). Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit selama triwulan laporan.

4.1.1.4. Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas.

Kualitas kredit yang disalurkan bank umum di Sumbar masih terjaga cukup baik meskipun persentase kredit bermasalah (berkategori kurang lancar, diragukan dan macet) sedikit naik, dari 4,85% di triwulan II-2006 menjadi 4,95% di triwulan III-2006 (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum

(nominal dalam miliar rupiah)

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)						
	Tw I-05	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06
Lancar	6,365.2	6,630.0	6,794.1	7,107.2	7,228.8	7,496.4	7,690.5
Dalam Perhatian Khusus	295.1	294.8	381.7	270.0	313.6	208.8	270.4
Kurang Lancar	63.5	74.6	65.6	39.1	38.0	113.9	40.0
Diragukan	43.7	79.9	83.7	29.2	40.7	33.4	25.7
Macet	124.3	88.8	175.4	217.8	235.4	245.9	348.7
Rasio NPLs (Gross)	3.36%	3.39%	4.33%	3.73%	4.00%	4.85%	4.95%

Sumber: LBU/LBUS

Menurut jenis penggunaan kredit (Tabel 4.9), persentase NPLs tertinggi dialami oleh kredit investasi (9,07%), kemudian kredit modal kerja (6,85%). Sementara itu persentase NPLs untuk kredit konsumsi merupakan yang terkecil, yaitu sebesar 1,03%. Berdasarkan sektor ekonomi (Tabel 4.9), persentase NPLs tertinggi terjadi pada sektor pertambangan (53,60%), diikuti oleh sektor pertanian (9,11%) dan sektor perdagangan (8,79%).

Tabel 4.9. Sebaran NPLs Bank Umum per Penggunaan dan Sektoral

(nominal dalam miliaran rupiah)

Keterangan	Trw IV-2005		Trw I-2006		Trw II-2006		Trw III-2006	
	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah
Jenis Penggunaan								
- Modal Kerja	159,700	4.96%	166,786	5.01%	238,222	6.80%	248,067	6.85%
- Investasi	105,267	7.45%	117,757	8.25%	124,939	9.17%	132,276	9.07%
- Konsumsi	21,206	0.70%	29,546	0.95%	29,987	0.93%	34,053	1.03%
Sektor Ekonomi								
- Pertanian	84,847	8.28%	85,220	10.41%	100,928	11.37%	96,736	9.11%
- Pertambangan	9,590	26.16%	9,529	27.47%	9,279	72.94%	6,510	53.60%
- Industri	56,621	6.31%	53,030	4.74%	51,569	4.81%	50,440	4.92%
- Listrik, Air & Gas	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
- Konstruksi	6,213	5.62%	9,332	8.46%	8,424	7.41%	8,372	6.20%
- Perdagangan	97,092	4.70%	111,094	5.16%	171,356	7.65%	202,690	8.79%
- Angkutan	4,343	2.36%	6,858	3.85%	14,839	8.71%	6,998	4.58%
- Jasa-jasa	5,291	1.84%	8,399	2.66%	5,839	1.71%	7,772	2.15%
- Lainnya (konsumtif)	22,176	0.73%	30,627	0.98%	30,914	0.95%	34,878	1.05%

Sumber: LBU/LBUS

Sementara itu dalam hal profitabilitas (tabel 4.10), bank umum di Sumbar pada triwulan III-2006 membukukan marjin bunga bersih (NIM) sebesar 6,21%, sedikit dibawah pencapaian NIM triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 6,65%.

Tabel 4.10. Perkembangan Profitabilitas Bank Umum*)

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)						
	Tw I-05	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06
Pendapatan Bunga	305.38	560.8	861.3	1,145.1	348.3	726.8	1,064.0
Beban Bunga	119.77	234.9	357.1	476.0	169.2	346.8	491.9
Rerata aktiva prod.	6,904.0	7,429.7	7,576.0	7,659.8	7,857.3	8,746.1	9,210.3
Aktiva Prod.	6,906.41	7,719.6	8,049.9	8,147.2	8,808.3	9,772.5	10,370.8
NIM	2.69%	4.39%	6.65%	8.74%	2.28%	4.34%	6.21%

Sumber: LBU

*) tidak termasuk bank syariah

4.1.1.5. Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank umum Sumbar pada triwulan III-2006 mencapai Rp6.332,1 miliar atau meningkat Rp280,3 miliar (4,63%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 4.11). Peningkatan kredit UMKM tertinggi terjadi pada kredit skala kecil (6,89%), kemudian kredit berskala menengah (5,21%) dan mikro (3,27%).

Tabel 4.11. Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Baki Debet

Keterangan	Posisi (miliar Rp)				Pangsa (%)			Pertumb. (%)		
	TwIV-05	TwI-06	TwII-06	TwIII-06	TwI-06	TwII-06	TwIII-06	TwI-06	TwII-06	TwIII-06
Mikro (s.d Rp50 jt)	3,068.5	3,163.8	3,264.0	3,370.9	40.27	40.31	40.25	3.11	3.17	3.27
Kecil (Rp50 - Rp500 jt)	1,556.4	1,578.4	1,678.9	1,794.6	20.09	20.73	21.43	1.41	6.37	6.89
Menengah (Rp500 jt - Rp5 M)	983.4	1,036.9	1,108.9	1,166.6	13.20	13.69	13.93	5.44	6.95	5.21
Total UMKM	5,608.2	5,779.0	6,051.8	6,332.1	73.56	74.73	75.60	3.05	4.72	4.63
Besar (>Rp5 M)	2,055.1	2,077.4	2,046.5	2,043.3	26.44	25.27	24.40	1.08	-1.49	-0.16

Sumber: LBU/LBUS

Pangsa UMKM bank umum di Sumbar mencapai 75,60% dari total kredit, sedikit lebih tinggi dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 74,73%. Berdasarkan kelompok baki debetnya, alokasi kredit terbesar disalurkan untuk usaha mikro dengan pangsa 40,25%. Sedangkan pangsa kredit berskala besar (korporat) sebesar 24,40%.

Tabel 4.12. Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)				Pangsa			Pertumbuhan (qtq)		
	Trw IV-05	Trw I-06	Trw II-06	Trw III-06	Trw I-06	Trw II-06	Trw III-06	Trw I-06	Trw II-06	Trw III-06
Pertanian	307.88	309.44	340.85	422.42	5.35%	5.63%	6.67%	0.51%	10.15%	23.93%
Pertambangan	14.67	13.27	12.72	12.15	0.23%	0.21%	0.19%	-9.50%	-4.14%	-4.53%
Industri	81.83	84.15	93.12	100.35	1.46%	1.54%	1.58%	2.84%	10.67%	7.76%
Listrik, Air & Gas	1.74	0.34	1.36	1.34	0.01%	0.02%	0.02%	-80.24%	295.63%	-1.11%
Konstruksi	95.25	94.65	98.00	119.31	1.64%	1.62%	1.88%	-0.63%	3.53%	21.75%
Perdagangan	1,631.38	1,715.18	1,795.43	1,879.60	29.68%	29.67%	29.68%	5.14%	4.68%	4.69%
Angkutan	183.80	171.83	163.86	146.47	2.97%	2.71%	2.31%	-6.52%	-4.64%	-10.61%
Jasa-jasa	235.77	263.83	287.30	329.73	4.57%	4.75%	5.21%	11.90%	8.90%	14.77%
Lainnya (konsumtif)	3,055.92	3,126.36	3,259.18	3,320.71	54.10%	53.85%	52.44%	2.31%	4.25%	1.89%
TOTAL UMKM	5,608.23	5,779.05	6,051.82	6,332.08	100.00%	100.00%	100.00%	3.05%	4.72%	4.63%

Sumber: LBU/LBUS

Secara sektoral (Tabel 4.12), lebih dari setengah kredit UMKM masuk dalam sektor lainnya yang menampung penggunaan konsumtif (52,44%). Selebihnya terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,68%), dan sisanya dibagi untuk tujuh sektor lainnya, mulai dari yang tertinggi untuk sektor pertanian (6,67%) hingga yang terkecil untuk sektor listrik, air & gas (0,02%).

Tabel 4.13. Sebaran NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

(nominal dalam miliaran rupiah)

Sektor Ekonomi	Trw IV-2005		Trw I-2006		Trw II-2006		Trw III-2006	
	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah
- Pertanian	51.91	16.86%	46.86	15.14%	53.10	15.58%	51.21	12.12%
- Pertambangan	9.59	65.39%	9.53	71.80%	9.28	72.94%	6.51	53.60%
- Industri	5.70	6.97%	5.61	6.67%	3.25	3.48%	2.38	2.37%
- Listrik, Air & Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
- Konstruksi	6.00	6.30%	9.33	9.86%	8.42	8.60%	8.37	7.02%
- Perdagangan	86.02	5.27%	94.95	5.54%	90.79	5.06%	96.23	5.12%
- Angkutan	4.34	2.36%	6.86	3.99%	14.84	9.06%	7.00	4.78%
- Jasa-jasa	5.29	2.24%	8.40	3.18%	5.84	2.03%	7.77	2.36%
- Lainnya (konsumtif)	22.18	0.73%	30.63	0.98%	30.91	0.95%	34.88	1.05%
Total (Gross)	191.03	3.41%	212.16	3.67%	216.43	3.58%	214.35	3.39%

Sumber: LBU/LBUS

Kualitas kredit UMKM terjaga baik seperti terlihat dari nisbah NPLs pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar 3,39% atau sedikit membaik dibandingkan nisbah triwulan sebelumnya sebesar 3,58% (tabel 4.13). Berdasarkan sektor ekonomi non konsumtif, nisbah NPLs tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (53,60%) sedangkan persentase terendah dialami oleh sektor jasa-jasa dan sektor industri, masing-masing sebesar 2,36% dan 2,37%.

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM di Sumatera Barat, Bank Indonesia Padang di tahun 2006 telah memprogramkan serangkaian kegiatan yang bersifat bantuan teknis dan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya mendorong penyaluran dan atau peningkatan kredit kepada UMKM. Selama triwulan III-2006, bantuan teknis yang telah dilakukan adalah "Pelatihan Analisis Kredit Mikro dan Kecil kepada BPR" pada tanggal 11-15 September 2006 di Bukittinggi. Selain itu, BI Padang telah berpartisipasi dalam diskusi terfokus mengenai pemberdayaan KKMB bidang kelautan pada tanggal 29 Agustus 2006 di Padang.

4.1.2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Secara umum, indikator-indikator perkembangan kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan bank umum. Total asset BPR di Sumbar pada triwulan III-2006 mengalami peningkatan sebesar 5,31%, menjadi Rp494,79 miliar (Tabel 4.14). Pada periode yang sama, posisi penghimpunan dana BPR tercatat sebesar Rp312,19 miliar atau naik 2,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Baik tabungan maupun deposito mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,00% dan 3,80%.

Sejalan dengan peningkatan DPK, kredit yang disalurkan BPR juga mengalami peningkatan sebesar 7,78%, menjadi Rp380,47 miliar di triwulan III-2006. Menurut

lapangan usaha, peningkatan kredit dialami oleh hampir semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor pertanian (11,27%), diikuti oleh sektor perdagangan (9,50%). Sementara itu kredit pada sektor perindustrian mengalami penurunan sebesar 3,77%. Menurut jenis penggunaan, pertumbuhan kredit tertinggi dialami kredit modal kerja (9,81%), diikuti oleh kredit konsumsi (5,18%) dan kredit investasi (0,67%).

Tabel 4.14 Indikator Perkembangan BPR

Keterangan	Nominal (Rp M)				Pertumbuhan (qtq)		
	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06
Total Asset	430.29	429.40	469.84	494.79	-0.21%	9.42%	5.31%
Penghimpunan Dana	283.25	282.85	303.72	312.19	-0.14%	7.38%	2.79%
- Tabungan	157.32	155.53	170.23	173.63	-1.14%	9.45%	2.00%
- Deposito	125.93	127.33	133.49	138.56	1.11%	4.84%	3.80%
Penyaluran Kredit/Pembiayaan	298.91	322.49	352.99	380.47	7.89%	9.46%	7.78%
- Menurut Sektor Ekonomi							
Pertanian	31.79	35.02	40.19	44.72	10.18%	14.76%	11.27%
Perindustrian	7.30	7.52	8.93	8.59	3.02%	18.65%	-3.77%
Perdag, Hotel & Restoran	142.81	155.49	171.15	187.41	8.88%	10.07%	9.50%
Jasa-jasa	44.25	48.04	47.23	48.91	8.56%	-1.69%	3.56%
Lain-lain	72.76	76.42	85.50	90.84	5.04%	11.88%	6.25%
- Menurut Penggunaan							
Modal Kerja	204.43	218.35	235.64	258.77	6.81%	7.92%	9.81%
Investasi	28.67	34.27	38.25	38.51	19.56%	11.62%	0.67%
Konsumsi	65.82	69.86	79.10	83.19	6.15%	13.22%	5.18%
LDR	105.53%	114.01%	116.22%	121.87%			
NPLs	9.23%	9.49%	9.57%	8.95%			

Sumber: Laporan Bulanan BPR/BPRS

Dengan laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR BPR di Sumbar meningkat, dari 116,22% pada triwulan II-2006 menjadi 121,87% pada triwulan III-2006. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik. Selain itu, kualitas kredit yang disalurkan BPR juga mengalami perbaikan seperti terlihat dari penurunan nisbah kredit bermasalah (NPLs) BPR, dari 9,57% menjadi 8,95%.

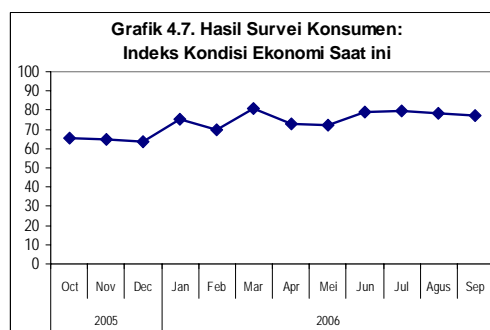
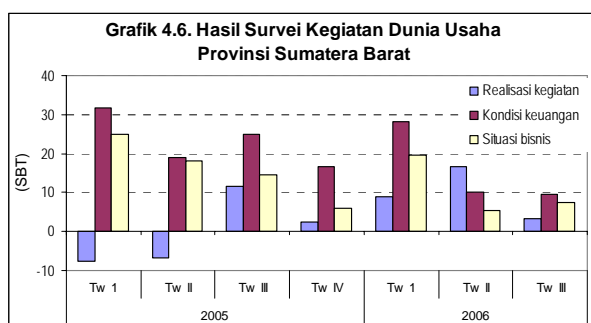
4.2. Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah

Asesmen keuangan daerah dimaksudkan untuk mengkaji potensi sumber-sumber risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di daerah. Secara umum pada triwulan laporan, risiko-risiko yang dialami oleh sektor korporasi dan rumah tangga tidak menunjukkan perkembangan yang membahayakan. Sementara perbankan daerah mengalami tekanan risiko kredit yang meningkat bersamaan dengan peningkatan kegiatan usaha pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya. Prospek keuangan daerah pada triwulan IV-2006 diperkirakan masih dipengaruhi faktor musiman sehubungan dengan bulan puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan yang akan memicu

peningkatan konsumsi masyarakat meskipun dibayangi oleh daya beli masyarakat yang relatif belum pulih. Selain itu, stimulasi sektor fiskal akan mencapai puncaknya pada triwulan terakhir di tahun berjalan.

4.2.1. Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga

Perkembangan kredit untuk sektor bisnis selama triwulan laporan belum begitu menggembirakan, terlihat dari pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja yang rendah. Sejalan dengan itu, hasil survei kegiatan dunia usaha menunjukkan realisasi kegiatan usaha responden pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi kegiatan usaha triwulan II-2006 (Grafik 4.6). Meskipun demikian, situasi bisnis dan kondisi keuangan masih dinilai positif oleh responden dunia usaha.



Dari sisi rumah tangga, daya beli masyarakat diperkirakan belum pulih tercermin dari pertumbuhan kredit konsumsi yang relatif rendah. Kondisi ini didukung pula oleh hasil survei konsumen yang menunjukkan indeks kondisi ekonomi saat ini masih dibawah 100 (Grafik 4.7), berarti dinilai pesimis oleh responden rumah tangga.

4.2.1.1. Risiko Kredit Korporasi

Kredit Investasi dan kredit modal kerja yang proyeknya berlokasi di Sumbar pada triwulan III-2006 tumbuh sebesar 0,72% dan 3,06%. Kredit investasi mengalami peningkatan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif (-3,84%). Sementara itu kredit modal kerja juga mengalami pertumbuhan yang membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Secara sektoral (tidak termasuk sektor lain-lain yang menampung kredit konsumtif dengan pangsa 35,77%), alokasi kredit terkonsentrasi pada empat sektor yaitu sektor perdagangan (23,36%), sektor listrik (12,36%), sektor pertanian (10,92%) dan sektor industri (10,79%).

Diantara sektor-sektor dominan tersebut diatas (kecuali untuk sektor listrik yang kreditnya disalurkan oleh bank yang berkantor di luar Sumbar), risiko terbesar berdasarkan nisbah NPLs berada pada sektor pertanian yang nisbahnya mencapai 9,11%, diikuti oleh

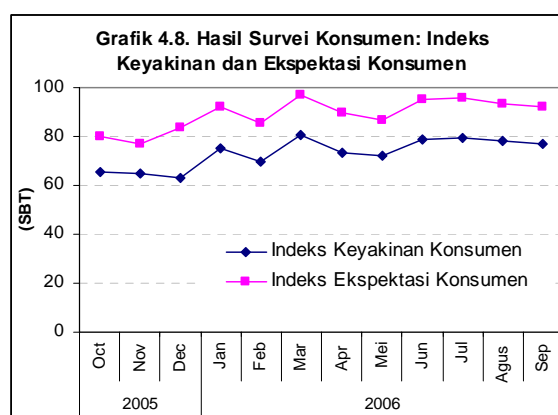
sektor perdagangan sebesar 8,79%. Nisbah NPLs sektor pertanian pada triwulan laporan tercatat membaik dibandingkan triwulan II-2006 sebesar 11,37% sebaliknya nisbah NPLs sektor perdagangan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,65%. Sementara itu rasio NPLs pada sektor industri relatif tetap, yaitu 4,92% atau hampir sama dengan nisbah triwulan sebelumnya sebesar 4,81%.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), situasi bisnis selama triwulan III-2006 masih dirasakan positif oleh responden dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 7,39%, bahkan lebih optimis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan SBT sebesar 5,41%. Sementara itu, kondisi keuangan perusahaan sedikit turun, dari SBT 10,12% pada triwulan II-2006 menjadi 9,67% pada triwulan III-2006. Secara umum, realisasi kegiatan usaha selama triwulan laporan mengalami penurunan, dari 16,69% menjadi 3,35%.

4.2.1.2. Risiko Kredit Rumah Tangga

Kredit konsumsi tumbuh 2,00% sepanjang triwulan III-2006, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,15%. Pangsa kredit konsumsi mencapai 35,44% dari total kredit, masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa kredit modal kerja sebesar 37,61%. Dalam hal kolektibilitasnya, rasio NPLs kredit konsumsi tergolong rendah yaitu 1,03%. Berdasarkan hasil survei konsumen di tiga kota di Sumbar, sebagian besar responden di triwulan III-2006 belum akan melakukan pembelian barang tahan lama.

Sementara itu indeks ekspektasi konsumen dibayangi rasa pesimis yang sedikit meningkat, yaitu dari 95,0 di bulan Juni 2006 menjadi 92,33 di bulan September 2006 (Grafik 4.8). Demikian pula halnya dengan indeks keyakinan konsumen mengalami penurunan, dari 78,75 di bulan Juni 2006 menjadi 77,17 di bulan September 2006.



4.2.2. Asesmen Perbankan

Kondisi sektor perbankan Sumbar selama triwulan III-2006 menunjukkan masih cukup terjaganya stabilitas perbankan daerah di tengah masih lesunya kegiatan dunia usaha di sektor riil. Kegiatan usaha perbankan tumbuh positif dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya namun disertai pula dengan tekanan risiko kredit yang sedikit meningkat.

4.2.2.1. Risiko Kredit

Portofolio aktiva produktif bank umum di Sumbar terkonsentrasi pada kredit dengan alokasi sebesar 77,9%. Selanjutnya penempatan pada BI sebesar 14,03%. Penanaman pada giro mencatat peningkatan sebesar 28,20% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara penanaman pada SBI meningkat 3,17%, jauh lebih rendah dibanding peningkatan pada triwulan sebelumnya (39,64%). Dalam hal kolektibilitas, nisbah NPLs bank umum di Sumbar cenderung meningkat dari 4,85% di triwulan II-2006 menjadi 4,95% di triwulan III-2006. Berdasarkan jenis penggunaan, nisbah NPLs tertinggi dialami oleh kredit investasi sebesar 9,07%, diikuti kredit modal kerja (6,85%). Sedangkan nisbah NPLs kredit konsumsi relatif kecil yaitu sebesar 1,03%.

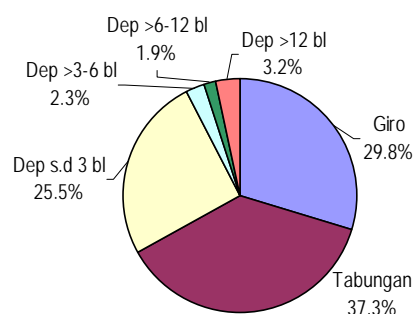
Persentase kredit UMKM di Sumbar mencapai 75,6% dari total kredit. 52,44% kredit UMKM digunakan untuk kegiatan konsumtif. Selebihnya terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,68%). Rasio NPLs kredit UMKM relatif terkendali sebesar 3,39%. Secara sektoral, rasio NPLs UMKM tertinggi terjadi pada sektor pertambangan (53,6%) dan sektor pertanian (12,12%). Sementara itu, rasio NPLs untuk kredit perdagangan relatif kondusif, yaitu sebesar 5,12%.

Dengan kecenderungan suku bunga rata-rata kredit yang sedikit turun, dari 16,38% pada akhir triwulan II-2006 menjadi 16,30% pada akhir triwulan laporan, kredit yang disalurkan di Sumbar sedikit meningkat, yaitu 2,05%. Sedangkan kredit UMKM tumbuh relatif lebih tinggi sebesar 4,63%.

4.2.2.2. Risiko Likuiditas

Struktur DPK bank umum di Sumbar menurut jenis simpanan (Grafik 4.9), didominasi dana jangka pendek yang mencapai 92,6% dari total DPK, yakni terdiri dari giro dengan pangsa 29,8%; tabungan dengan pangsa 37,3%,

Grafik 4.9. Komposisi DPK Menurut Jangka Waktu

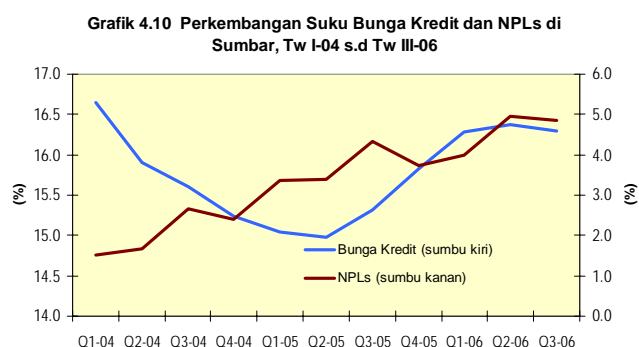


kemudian deposito berjangka waktu hingga 3 bulan dengan pangsa 25,5%. Dengan struktur simpanan tersebut, bank umum di Sumbar menghadapi risiko likuiditas yang relatif tinggi.

Dalam hal kepemilikan, 61,10% dana merupakan milik perorangan. Sementara itu, pangsa simpanan milik nasabah perusahaan swasta dan asuransi masing-masing hanya sebesar 3,62% dan 2,25% sedangkan pangsa pemerintah sebesar 5,80%. Ditinjau dari pelaksanaan fungsi intermediasinya, nisbah LDR Sumbar mendekati 100% yaitu mencapai 95,7% yang mencerminkan Sumbar telah memperoleh pembiayaan kredit yang hampir sama dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakatnya.

4.2.2.3. Risiko Pasar

Berdasarkan analisis grafis untuk melihat hubungan antara suku bunga kredit dengan rasio NPLs dalam periode triwulan I-2004 s.d triwulan III-2006 (Grafik 4.10), terlihat adanya tren peningkatan NPLs yang sejalan dengan peningkatan suku bunga kredit mulai sejak triwulan III-2005. Namun untuk menarik kesimpulan bahwa NPLs sensitif terhadap perubahan tingkat bunga kredit masih memerlukan rentang waktu yang lebih panjang lagi mengingat pada periode sebelum triwulan III-2005 terdapat hubungan yang tidak searah antara kedua variabel tersebut.



4.3. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan ditandai dengan peningkatan transaksi tunai sedangkan transaksi non-tunai mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

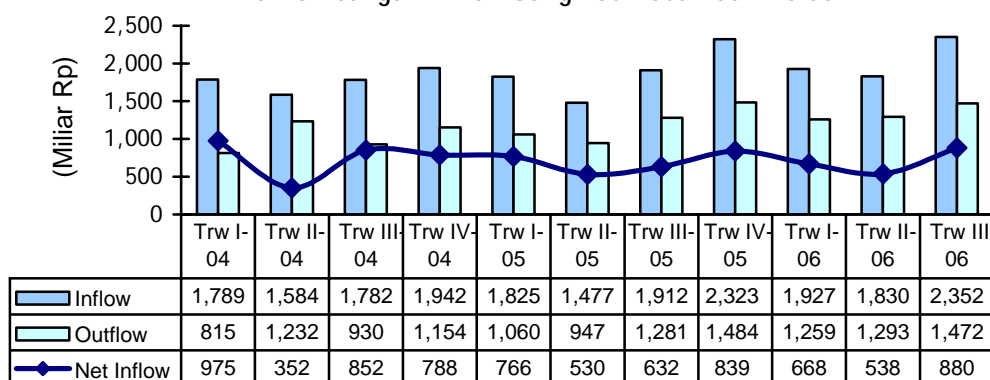
4.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.

4.3.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

Selama triwulan III-2006, kegiatan transaksi tunai melalui Bank Indonesia Padang menunjukkan peningkatan aliran uang kas masuk (inflow) dan keluar (outflow) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.11). Aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (inflow) naik sebesar Rp521,7 miliar menjadi Rp2.352 miliar. Sementara

itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (outflow) tercatat sebesar Rp1.472 miliar atau terjadi peningkatan sebesar Rp178,8 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, terjadi aliran uang kas masuk bersih (net-inflow) sebesar Rp880 miliar pada triwulan laporan, meningkat sebanyak Rp342 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

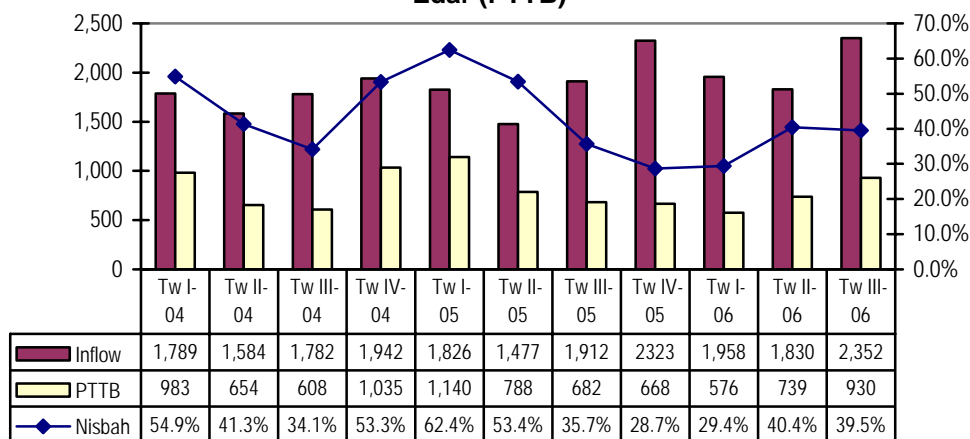
Grafik 4.11.
Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar



4.3.1.2. Pemusnahan Uang Tidak layak Edar (PTTB)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan terhadap uang yang sudah lusuh/rusak sehingga tidak layak lagi untuk diedarkan. Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan mencapai Rp930 miliar, meningkat sekitar 25,8% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp739 miliar (Grafik 4.12).

Grafik 4.12. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)



Nisbah antara jumlah uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (inflow) pada triwulan III-2006 adalah sebesar 39,5% atau lebih rendah dibandingkan nisbah triwulan II-2006 sebesar 40,4%.

4.3.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu

Penemuan uang palsu yang dilaporkan masyarakat melalui perbankan kepada BI Padang masih tergolong sangat kecil. Persentase nilai temuan uang palsu terhadap nilai uang kartal masuk (inflow) selama triwulan III-2006 sebesar 0,0001%, mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase temuan triwulan sebelumnya sebesar 0,00029%.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut mengurangi peredaran uang palsu serta untuk menerima masukan-masukan bagi perbaikan pelayanan pagedaran uang, Bank Indonesia Padang selama triwulan laporan telah melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat di Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan di Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan masing-masing pada tanggal 5 Agustus dan 9 September 2006.

4.3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai.

4.3.2.1 Perkembangan Kliring Lokal

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami penurunan baik volume maupun nominalnya. Volume kliring turun 37,4% menjadi 103,4 ribu lembar dengan nilai transaksi menurun 24,2% menjadi Rp2.401,9 miliar (Tabel 4.15). Bila dilihat secara rata-rata harian, warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan III-2006 tercatat sebanyak 1.641 lembar per hari dengan rata-rata nilai transaksi per harinya mencapai Rp38,1 miliar. Penurunan transaksi melalui kliring tersebut merupakan pola musiman sehubungan dengan preferensi pengusaha untuk cenderung bertransaksi tunai menjelang masuknya bulan Puasa.

Tabel 4.15 Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2005				2006			Growth (qtq)	
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	(+/-)	(%)
Perputaran Kliring									
- Volume (lembar)	160,438	161,213	176,707	166,567	158,752	165,132	103,371	-61,761	-37.4%
- Nominal (miliar rp)	3,131.9	3,174.4	3,533.4	3,586.5	3,135.6	3,168.0	2,401.9	-766.1	-24.2%
Rata-rata Harian Perputaran Kliring									
- Volume (lembar)	2,719	2,600	2,761	2,776	2,561	2,663	1,641	-1,023	-38.4%
- Nominal (miliar rp)	53.1	51.2	55.2	59.8	50.6	51.1	38.1	-13.0	-25.4%
Penolakan Cek/BG Kosong									
- Volume (lembar)	1,347	2,052	1,916	1,651	1,408	1,432	1,081	-351	-24.5%
- Nominal (miliar rp)	16.4	27.7	24.4	26.4	21.3	17.6	13.1	-4.5	-25.4%

Sementara itu penolakan cek/BG yang kosong selama triwulan laporan juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Warkat Cek/BG kosong turun sebanyak 24,5%, dari 1.432 lembar menjadi 1.081 lembar. Sementara nilai transaksi Cek/BG kosong tersebut mengalami penurunan sebesar 25,4%, dari Rp17,6 miliar menjadi Rp13,1 miliar.

4.3.2.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Perkembangan transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan III-2006 menunjukkan peningkatan volume dan nilai transaksi masuk (in-flow), sementara untuk transaksi keluar (out-flow) mengalami penurunan baik volume maupun nilai transfernnya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.16).

Untuk transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi naik sebesar 15,61% menjadi Rp9.363,9 miliar sementara volume transfer meningkat 10,20% menjadi 7.197 transaksi. Sedangkan untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi menurun sebesar 4,68% menjadi Rp8.568,1 miliar sementara volume transaksi turun 0,40% menjadi 8.236 transaksi.

Tabel 4.16 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang

Uraian	2005				2006			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Pert.
Transaksi Masuk (inflow) :								
- Volume (transaksi)	4,134	4,708	5,355	5,613	4,954	6,531	7,197	10.20%
- Nominal (miliar Rp)	6,344.2	7,034.3	9,419.8	8,678.8	7,797.5	8,099.6	9,363.9	15.61%
Transaksi Keluar (outflow)								
- Volume (transaksi)	6,803	6,991	7,493	7,883	7,159	8,269	8,236	-0.40%
- Nominal (miliar Rp)	6,482.7	7,520.0	7,692.0	8,995.0	10,369.3	8,988.6	8,568.1	-4.68%

Peningkatan transaksi masuk ke wilayah KBI Padang melalui RTGS diperkirakan berasal dari peningkatan transfer para perantau untuk keluarganya di kampung sehubungan dengan persiapan memasuki bulan suci Ramadhan.

Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah krisis 1997. Disaat lembaga keuangan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Data BPS pada tahun 2003 menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 42,4 juta unit, atau naik 9,5% dibandingkan tahun 2000. Jika dilihat perincian struktur unit usaha, sebanyak 41,8 juta unit adalah usaha mikro, 1,36 juta usaha kecil, dan 62 ribu usaha menengah. Sedangkan jumlah usaha besar lebih dari 2.000 unit. Kontribusi kegiatan ekonomi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2003 mencapai Rp1.013,5 triliun atau 56,7% dari total PDB. Tenaga kerja yang terserap sebesar 79 juta orang. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 12,2% selama tahun 2002-2003, atau rata-rata 4,1% per tahun.

Pada bulan November 2003, Bank Danamon melakukan penelitian pasar dengan mewawancarai 1.000 pengusaha mikro dan kecil di 8 kota besar. Berdasarkan penelitian tersebut, lebih dari 20 juta rumah tangga di Indonesia memiliki pendapatan tetap keluarga bulanan sebesar Rp400 ribu s/d Rp2,5 juta. 80% diantaranya menyatakan tidak pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Alasan terbesar mereka adalah ketidakmampuan finansial mereka untuk berhubungan dengan Bank. Sebagian lagi menganggap bahwa proses yang terlalu rumit dan kesan Bank yang angkuh membuat mereka beranggapan bahwa layanan Bank tak terjangkau dan memang bukan layanan yang disediakan untuk mereka.

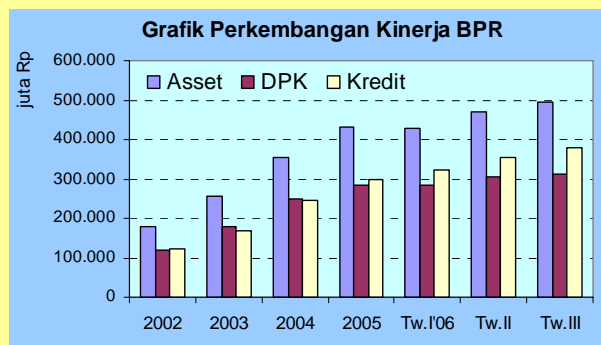
UMKM Mencari Alternatif Pembiayaan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan kelembagaan yang memfokuskan diri melayani para pengusaha mikro. LKM sebenarnya sudah lama ada di masyarakat, namun jumlahnya terlalu kecil bila dibandingkan kebutuhan para pengusaha mikro. Dalam kategori Bank Indonesia, LKM ada 2 jenis yaitu berbentuk bank serta non bank. Untuk yang berbentuk bank seperti BRI Unit Desa, BPR dan yang sedang berkembang saat ini adalah Danamon Simpan Pinjam (DSP). Sementara yang berbentuk non bank seperti koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat (KSM), dll.

Debitur UMKM yang semakin rasional dan memiliki informasi yang relatif banyak mengenai berbagai pilihan lembaga keuangan pada akhirnya dihadapkan pada berbagai persyaratan/prosedur lembaga keuangan yang dirasakan memberatkan. Makin tingginya persaingan, baik antar lembaga keuangan bank maupun dengan non bank, seharusnya menjadikan lembaga keuangan lebih berinovasi dan serius mengatasi kendala akses UMKM dan 'menggarap' pasar-pasar yang potensial, termasuk pasar UMKM.

LKM Bank dan Non Bank di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, perkembangan LKM BPR cukup menggembirakan. Dalam periode 5 tahun, total asset BPR telah mengalami peningkatan sebesar 176% dari Rp178,90 miliar di tahun 2002 maka pada Oktober 2006 total asset menjadi Rp494,79 miliar. Begitu pula dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun meningkat 162% dari Rp119,02 miliar di tahun 2002 menjadi sebesar Rp312,19 miliar di bulan Oktober 2006, dan kredit yang disalurkan meningkat 213,38% dari Rp121,41 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp380,47 miliar. *Loan to deposit ratio* (LDR) BPR meningkat dari 102% di tahun 2002 menjadi sebesar 121,87% di bulan Oktober 2006. Hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa potensi permintaan kredit di sektor UMKM dari tahun ke tahun masih cukup tinggi, sehingga keterbatasan dana (DPK) pada BPR diantisipasi diantaranya dengan menggunakan modal bank sendiri.



Selain LKM BPR, perkembangan LKM non bank di Sumatera Barat ternyata juga cukup baik. Berkembangnya LKM non bank tersebut ditengarai karena terbatasnya akses LKM bank ke sektor UMKM. Dalam 1 tahun saja jumlah LKM non bank bertambah sekitar 5% dari 2.952 LKM non bank menjadi 3.112 LKM non bank. Aset meningkat 39,25% dari Rp978,06 miliar di tahun 2005 menjadi Rp1,36 triliun pada Tw.III-2006. Begitu pula dengan simpanan yang diterima meningkat 43,08% dari Rp54,04 miliar menjadi Rp77,32 miliar. Sayangnya pinjaman yang diberikan justru turun dari Rp341,26 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp309,56 miliar pada Tw.III-2006.

**TABEL PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) NON BANK
DI SUMATERA BARAT**

dalam juta rupiah

Jenis LKM	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)		Total Modal	Simpanan Yg Diterima	Pinjaman Yg Diberikan	Total Asset
		Anggota	Nasabah				
2005							
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	60	7.648	5.794	15.269,96	2.717,56	13.758,12	23.950,11
Unit Simpan Pinjam KUD	197	77.264	46.764	30.085,48	2.034,61	10.262,64	89.967,25
Unit Simpan Pinjam Non KUD	1.249	174.209	144.244	282.897,78	23.625,40	153.492,53	387.089,75
Unit Simpan Pinjam Koperasi	1.446	251.473	191.008	312.983,26	25.660,01	163.755,17	477.057,00
Total	2.952	510.594	387.810	641.236,48	54.037,58	341.268,47	978.064,11
Tw. III 2006							
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	64	8.947	7.748	15.935,54	1.121,76	4.056,94	20.256,54
Unit Simpan Pinjam KUD	236	81.429	50.022	35.730,53	2.494,94	8.949,32	97.722,28
Unit Simpan Pinjam Non KUD	1.288	177.226	87.786	323.834,03	35.603,35	143.800,01	573.149,02
Unit Simpan Pinjam Koperasi	1.524	258.655	137.808	359.564,56	38.098,29	152.749,33	670.871,29
Total	3.112	526.257	283.364	735.064,66	77.318,34	309.555,59	1.361.999,13
Pertumbuhan 2005 - Tw.III 2006							
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	6,67%	16,98%	33,72%	4,36%	-58,72%	-70,51%	-15,42%
Unit Simpan Pinjam KUD	19,80%	5,39%	6,97%	18,76%	22,63%	-12,80%	8,62%
Unit Simpan Pinjam Non KUD	3,12%	1,73%	-39,14%	14,47%	50,70%	-6,31%	48,07%
Unit Simpan Pinjam Koperasi	5,39%	2,86%	-27,85%	14,88%	48,47%	-6,72%	40,63%
Total	5,42%	3,07%	-26,93%	14,63%	43,08%	-9,29%	39,25%

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Prov. Sumbar

Baru-baru ini, sebanyak 19 KSP dan USP di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat memperoleh dana pinjaman untuk penguatan modal atau pembiayaan produktif tahun 2006 sebesar Rp1,7 miliar. Kesembilan kabupaten dan kota tersebut yaitu kota Payakumbuh (1 KSP), kota Sawahlunto (2 KSP), kab. Sawahlunto-Sijunjung (2 KSP), kab. Solok (4 KSP/USP), kab. Pesisir Selatan (3 KSP/USP), kab. Pasaman (2 KSP), kab. Pasaman Barat (1 KSP), kab. Dharmasraya (3 KSP) dan kab. Agam (1 KSP). Dana tersebut, akan disalurkan melalui BPD Sumatera Barat. Pagu pinjaman yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat kepada masing-masing KSP/USP sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 10 tahun (Harian Padang Ekspres, 19 Agt 2006).

Berkembangnya LKM, baik bank maupun non bank di Sumatera Barat, mengindikasikan bahwa masyarakat Sumatera Barat, terutama UMKM, dalam mengatasi pendanaan atau permodalan tidak hanya berharap pada lembaga keuangan bank, namun juga non bank. Masing-masing lembaga keuangan mungkin mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk LKM bank, kewajiban adanya agunan tambahan (biasanya berupa materi) masih menjadi permasalahan bagi UMKM. Sementara itu, LKM non bank biasanya mensyaratkan keanggotaan dan iuran anggota untuk dapat melakukan pinjaman. Faktor penting yang seharusnya dapat ditangkap oleh LKM adalah kemudahan dan kecepatan prosedur serta alternatif jenis agunan yang tidak harus berupa materi/harta. Dengan adanya pemecahan masalah tersebut, niscaya LKM dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat UMKM.

Perbankan Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Daerah

Kebijakan Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, yang sedang gencar mendatangkan investor ke Sumatera Barat perlu mendapatkan dukungan semua pihak. Sebab, dengan masuknya investor ke Sumatera Barat, diharapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen akan tercapai. Untuk pencapaian tersebut juga harus dilibatkan pihak perbankan untuk memacu laju ekonomi itu sendiri. Karena perbankan ini selalu dianggap usaha bisnis. Padahal perbankan juga sebagai *agent of development*. "Kalau hanya gubernur yang giat mendatangkan investor, tapi respon dari pihak lain biasa saja, maka mustahil pertumbuhan ekonomi akan membaik," ujar Pemimpin Bank Indonesia Padang, CY Boestal dalam diskusi terbatas dengan wartawan Padang Ekspres. Boestal optimis dalam waktu 4 bulan ini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 6,2 persen akan dapat tercapai. Saat ini menurut Boestal pengaruh kondisi ekonomi secara nasional yang tidak stabil akibat bencana alam, secara tidak langsung juga mempengaruhi situasi ekonomi Sumatera Barat.

"Sebenarnya untuk mencapai angka 6 tersebut tidaklah susah. Tahun lalu saja Sumatera Barat telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang melebihi angka 5. Apalagi sekarang Gubernur Sumatera Barat sedang gencar mendatangkan investor ke Sumatera Barat. Ini harus 'dikeroyok' bersama-sama baik itu bupati, walikota, legislatif dan perbankan juga ikut mendukung kebijakan gubernur ini. Kalau semua unsur tersebut telah bekerjasama, maka pertumbuhan itu akan dicapai,' ulasnya. Mulai dari penyusunan peraturan dan sisten birokrasi yang sederhana harus menjadi hal yang mendapat perhatian khusus. Sehingga, lanjut Boestal, hal ini tidak akan menyulitkan investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat. "Perbankan juga dilibatkan dalam hal ini. Jangan hanya menganggap perbankan itu usaha bisnis, tapi anggaplah perbankan sebagai *agent of development*. Sering-seringlah, pemerintah melibatkan perbankan,' ulasnya.

Menurutnya, sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor unggulan yang dapat menunjang peningkatan PE di Sumatera Barat. "Kedua sektor ini memang menjadi andalan Sumatera Barat. Sekarang tergantung bagaimana pemerintah daerah mengembangkan sektor ini menjadi produk yang memang dicari-cari orang. Namun Boestal menyayangkan pengelolaan sektor ini masih setengah-setengah. Sebab, saat ini sebagian daerah perhatian lebih banyak tercurah pada sektor lain bukan pada ekonomi. "Seharusnya, baik bupati, walikota dan legislatif, setiap hari harus memikirkan ekonomi. Karena sektor ekonomi memang menjadi kunci hidupnya masyarakat, bagaimana menciptakan si miskin bias menghasilkan uang untuk hidup," tandasnya.

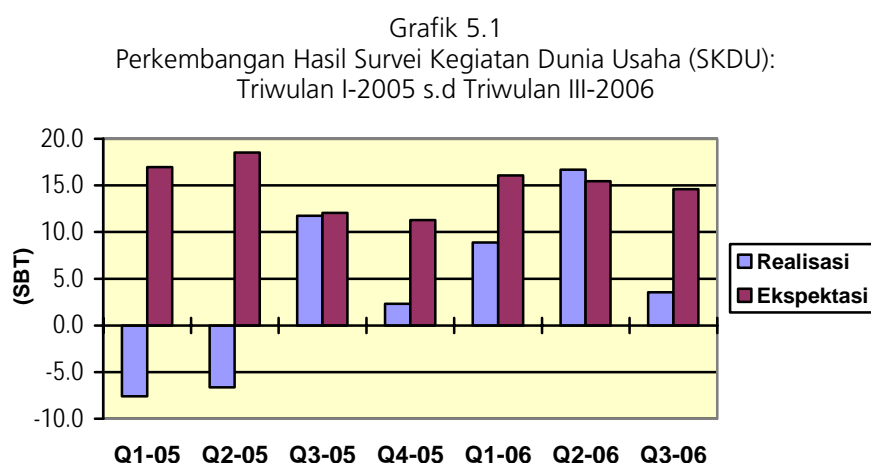
(Padang Ekspres tanggal 25 Agustus 2006)

BAB 5

Prospek Perekonomian

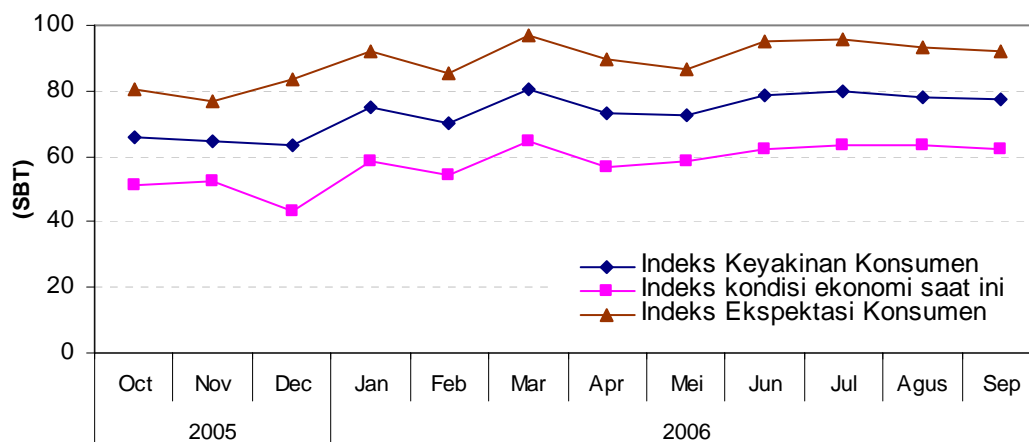
5.1. Prospek Ekonomi

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran serta kondisi makro ekonomi nasional yang cukup stabil, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV-2006 diprediksikan mengalami pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2006. Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang menunjukkan ekspektasi responden untuk kegiatan usaha di triwulan IV-2006 jauh lebih optimis dibandingkan realisasi kegiatan usaha pada triwulan laporan (Grafik 5.1).



Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan diperkirakan terkait dengan peningkatan konsumsi masyarakat sehubungan bulan Puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Namun peningkatan konsumsi tersebut dibayangi oleh masih lemahnya daya beli masyarakat seperti tercermin dari hasil survei konsumen yang menunjukkan indeks balance score (BS) ekspektasi konsumen masih tercatat dibawah 100 (Grafik 5.2). Selanjutnya, konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan meningkat mengingat sampai dengan triwulan III-2006, realisasi belanja Pemda terutama belanja modal masih berkisar 50%. Dengan demikian pada triwulan terakhir di tahun 2006, diprediksikan pemda akan menggenjot realisasi belanja APBDnya.

Grafik 5.2.
Perkembangan Hasil Survei Konsumen: Oktober 2005 – September 2006



Dari sisi penawaran, sektor perdagangan, sektor angkutan & komunikasi serta sektor jasa-jasa diperkirakan menjadi sektor-sektor utama yang mendorong pertumbuhan PDRB pada triwulan IV-2006. Peningkatan sektor perdagangan dipicu oleh meningkatnya permintaan konsumsi rumah tangga terkait dengan bulan Puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan terutama aktifitas perdagangan eceran. Sementara itu tradisi mudik lebaran akan mendorong pertumbuhan transportasi darat dan udara, komunikasi, usaha perhotelan dan rumah makan serta jasa-jasa rekreasi.

Dengan memperhatikan perkembangan pertumbuhan PDRB Sumbar dalam tiga triwulan terakhir serta perkiraan pertumbuhan PDRB pada triwulan IV-2006, laju pertumbuhan PDRB Sumbar di tahun 2006 diperkirakan berkisar 6,4 - 6,7%.

5.2 Prospek Kegiatan Usaha Perbankan

Sejalan dengan perkiraan peningkatan perekonomian Sumbar, kegiatan usaha perbankan pada triwulan IV-2006 berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan laporan. Perkiraan ini didukung oleh hasil survei kredit perbankan daerah yang menunjukkan permintaan kredit dan permintaan kredit baru diperkirakan akan naik pada triwulan IV-2006 dengan angka neto positif masing-masing sebesar 65%. Terhadap permintaan kredit tersebut, diperkirakan realisasi kredit baru pada triwulan IV-2006 akan meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2006. Perkiraan peningkatan kredit tersebut juga diproyeksikan searah dengan peningkatan DPK dengan angka neto sebesar 40%. Sementara itu, tren penurunan suku bunga DPK dan kredit diperkirakan akan berlanjut pada triwulan IV-2006. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh hasil survei kredit perbankan daerah yang menunjukan angka neto negatif untuk suku bunga DPK dan kredit masing-masing sebesar -60% dan -35%.

TOPICAL ISSUE : STUDI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA BARAT

I. Latar Belakang

Sejak implementasi otonomi daerah, aliran modal masuk yang dapat dikelola dengan kebijakan fiskal daerah telah dominan meningkat. Pemerintah daerah mendapatkan belanja yang makin besar yang sangat potensial memberikan dampak penggandaan yang lebih besar pula bagi kegiatan sektor riil di daerah. Namun dampak penggandaan belanja daerah itu dapat tertunda atau tidak terjadi seperti yang diharapkan apabila realisasi belanja tidak terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Akibatnya, kebijakan fiskal daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi daerah justru luput berperan. Kegiatan ekonomi yang semestinya telah mendapatkan insentif untuk tumbuh menciptakan output, kesempatan kerja, perbaikan upah, dan penurunan kemiskinan menjadi tertunda.

Kenyataan cenderung memperlihatkan bahwa daerah tidak mampu membelanjakan uang yang telah menjadi miliknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bila kecenderungan demikian dibiarkan terus berkembang, perekonomian daerah akan terus mengalami pertumbuhan yang lambat. Untuk mengetahui dampak stimulus fiskal terhadap perekonomian daerah di Sumatera Barat yang meliputi kajian terhadap pola realisasi APBD, mekanisme penyusunan APBD dan hambatan dalam penyerapan APBD, Bank Indonesia Padang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Regional (LPER) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, melakukan studi atau kajian terhadap hal-hal tersebut di atas.

II. Metodologi

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dengan menggunakan metode kuesioner, dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Daerah yang menjadi sampel adalah sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan ditambah dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder bersumber pada publikasi dan statistik Bank Indonesia, laporan dan data dari Bappeda Sumatera Barat, Bagian Keuangan Prov. Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari buku, laporan dan dokumen-dokumen lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa perkembangan APBD dan realisasi APBD di Sumatera Barat dengan menggunakan data propinsi dan data kabupaten/kota. Sedangkan

pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Barat.

III. Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil regresi antara belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. Berdasarkan regresi terhadap 3 model ekonomi, regresi model I merupakan yang terbaik dengan nilai koefisien yang paling tinggi (lihat tabel). Pada model I tersebut diperoleh hasil bahwa pada tingkat kesalahan 5% terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah (belanja pembangunan).

Tabel Hasil Pengolahan Data Empiris

Variabel	Regresi I		Regresi II		Regresi III	
	Koefisien	t-test	Koefisien	t-test	Koefisien	t-test
Konstanta	-0,504	-1,055	1,259	12,566	1,271	12,205
Ln BP	0,113	4,189				
Ln TB			0,104	2,444	0,078	1,665
Ln K					0,002	1,075
Variabel Terikat : PE						

Ket :

BP = Belanja Pembangunan

TB = Total Belanja

K = Kredit

PE = Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan tersebut menjelaskan bahwa untuk setiap kenaikan belanja pemerintah 10% akan dapat menaikkan sekitar 1,13% pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat pada nilai koefisien belanja pemerintah pada regresi I sebesar 0,113. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 2000-2004. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan manajemen penganggaran APBD mulai dari proses penyusunan hingga pencairan dana APBD.

Implementasi mekanisme penyusunan APBD di pemerintah Kabupaten/Kota, dan Propinsi di Sumatera Barat berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengungkapkan beberapa fakta, diantaranya :

- Sebagian besar dari tahapan-tahapan penyusunan APBD pada pemerintah daerah di Sumatera Barat (58%) dilakukan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;

- Sebagian dari tahapan-tahapan penyusunan APBD pada pemerintah daerah di Sumatera Barat lainnya (30%) dapat dilakukan tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
- Sedangkan beberapa tahapan sisanya (12%) dilaksanakan tanpa didukung dengan bukti kapan tahapan tersebut dilaksanakan;
- Rata-rata keterlambatan proses penyusunan APBD adalah selama 3,42 bulan, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat;
- Keterlambatan terbesar terjadi pada proses penandatanganan Arah Kebijakan Umum (AKU-APBD) sebesar 47% dan penandatanganan Perda APBD sebesar 26%.

Dilihat dari Realisasi APBD yang terbagi atas belanja rutin dan belanja pembangunan dapat disimpulkan bahwa belanja rutin secara umum dapat mencapai tingkat realisasi hingga 100% dari rencana bahkan lebih, sedangkan realisasi belanja pembangunan rata-rata hanya mencapai angka 78% bahkan ada yang dibawah 50%. Hal ini menandakan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kurang mampu merealisasikan rencana untuk belanja pembangunan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa realisasi APBD menjadi terlambat sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena seringnya terjadi tarik ulur antara legislatif dan eksekutif sehingga penandatanganan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menjadi terlambat. Keterlambatan tersebut berdampak terhadap proses berikutnya yang juga menjadi terhambat. Selain itu, terdapat beberapa dugaan awal kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam penyusunan rencana APBD, diantaranya adalah :

- Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering agak terlambat dipahami oleh penyelenggara keuangan di daerah;
- Pengesahan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat terkadang memakan waktu cukup lama;
- Buku Petunjuk Pelaksanaan sering berubah-ubah dan terlambat disampaikan ke daerah;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Daerah belum memadai/belum optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan APBD;

IV. Rekomendasi

- Penyebab keterlambatan realisasi APBD secara umum adalah pada proses kesepakatan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Oleh karena itu masing-

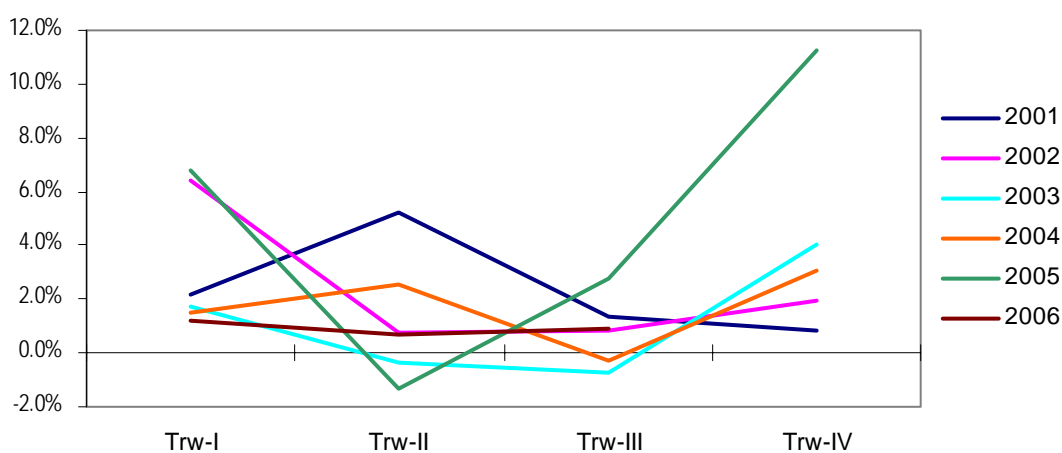
masing pihak seharusnya lebih taat dan memegang teguh pedoman jadwal penyusunan APBD dengan satu tekad mempercepat roda dan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada setiap kendala/hambatan dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD, agar dilakukan inventarisasi kendala/hambatan dan solusinya. Dengan adanya inventarisasi tersebut, diharapkan dapat diantisipasi kendala/hambatan yang sama untuk tahun-tahun berikutnya.
- Perlu dibentuk Tim Pemantau atau Satuan Tugas di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas mencermati pelaksanaan APBD, baik dalam masa proses penyusunan, pengesahan maupun pelaksanaan APBD. Dengan adanya tim ini diharapkan kendala penyusunan APBD dapat segera terpantau dan dilaksanakan solusinya, hingga kendala realisasi pendapatan dan belanja daerah dapat diketahui dan diantisipasi.

5.3. Proyeksi Inflasi

Dengan memperhitungkan pola tekanan inflasi yang akan mencapai puncaknya pada triwulan IV-2006 sehubungan dengan bulan Puasa dan perayaan hari-hari besar keagamaan (Grafik 5.3), laju inflasi kota Padang pada triwulan IV diprediksikan sekitar 2-3%. Dengan demikian laju inflasi kota Padang pada tahun 2006 akan berkisar $6 \pm 1\%$. Hasil tersebut juga didukung proyeksi inflasi menggunakan model ANP yang memperkirakan laju inflasi kota Padang tahun 2006 sebesar 5 – 6,9%.

Grafik 5.3 Pola Inflasi IHK triwulanan 2001-2005



TOPICAL ISSUE : STUDI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA BARAT

I. Latar Belakang

Sejak implementasi otonomi daerah, aliran modal masuk yang dapat dikelola dengan kebijakan fiskal daerah telah dominan meningkat. Pemerintah daerah mendapatkan belanja yang makin besar yang sangat potensial memberikan dampak penggandaan yang lebih besar pula bagi kegiatan sektor riil di daerah. Namun dampak penggandaan belanja daerah itu dapat tertunda atau tidak terjadi seperti yang diharapkan apabila realisasi belanja tidak terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Akibatnya, kebijakan fiskal daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi daerah justru luput berperan. Kegiatan ekonomi yang semestinya telah mendapatkan insentif untuk tumbuh menciptakan output, kesempatan kerja, perbaikan upah, dan penurunan kemiskinan menjadi tertunda.

Kenyataan cenderung memperlihatkan bahwa daerah tidak mampu membelanjakan uang yang telah menjadi miliknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bila kecenderungan demikian dibiarkan terus berkembang, perekonomian daerah akan terus mengalami pertumbuhan yang lambat. Untuk mengetahui dampak stimulus fiskal terhadap perekonomian daerah di Sumatera Barat yang meliputi kajian terhadap pola realisasi APBD, mekanisme penyusunan APBD dan hambatan dalam penyerapan APBD, Bank Indonesia Padang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Regional (LPER) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, melakukan studi atau kajian terhadap hal-hal tersebut di atas.

II. Metodologi

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dengan menggunakan metode kuesioner, dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Daerah yang menjadi sampel adalah sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan ditambah dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder bersumber pada publikasi dan statistik Bank Indonesia, laporan dan data dari Bappeda Sumatera Barat, Bagian Keuangan Prov. Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari buku, laporan dan dokumen-dokumen lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa perkembangan APBD dan realisasi APBD di Sumatera Barat dengan menggunakan data propinsi dan data kabupaten/kota. Sedangkan

pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Propinsi Sumatera Barat.

III. Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil regresi antara belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. Berdasarkan regresi terhadap 3 model ekonomi, regresi model I merupakan yang terbaik dengan nilai koefisien yang paling tinggi (lihat tabel). Pada model I tersebut diperoleh hasil bahwa pada tingkat kesalahan 5% terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah (belanja pembangunan).

Tabel Hasil Pengolahan Data Empiris

Variabel	Regresi I		Regresi II		Regresi III	
	Koefisien	t-test	Koefisien	t-test	Koefisien	t-test
Konstanta	-0,504	-1,055	1,259	12,566	1,271	12,205
Ln BP	0,113	4,189				
Ln TB			0,104	2,444	0,078	1,665
Ln K					0,002	1,075
Variabel Terikat : PE						

Ket :

BP = Belanja Pembangunan

TB = Total Belanja

K = Kredit

PE = Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan tersebut menjelaskan bahwa untuk setiap kenaikan belanja pemerintah 10% akan dapat menaikkan sekitar 1,13% pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat pada nilai koefisien belanja pemerintah pada regresi I sebesar 0,113. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 2000-2004. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan manajemen penganggaran APBD mulai dari proses penyusunan hingga pencairan dana APBD.

Implementasi mekanisme penyusunan APBD di pemerintah Kabupaten/Kota, dan Propinsi di Sumatera Barat berdasarkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengungkapkan beberapa fakta, diantaranya :

- Sebagian besar dari tahapan-tahapan penyusunan APBD pada pemerintah daerah di Sumatera Barat (58%) dilakukan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;

- Sebagian dari tahapan-tahapan penyusunan APBD pada pemerintah daerah di Sumatera Barat lainnya (30%) dapat dilakukan tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
- Sedangkan beberapa tahapan sisanya (12%) dilaksanakan tanpa didukung dengan bukti kapan tahapan tersebut dilaksanakan;
- Rata-rata keterlambatan proses penyusunan APBD adalah selama 3,42 bulan, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat;
- Keterlambatan terbesar terjadi pada proses penandatanganan Arah Kebijakan Umum (AKU-APBD) sebesar 47% dan penandatanganan Perda APBD sebesar 26%.

Dilihat dari Realisasi APBD yang terbagi atas belanja rutin dan belanja pembangunan dapat disimpulkan bahwa belanja rutin secara umum dapat mencapai tingkat realisasi hingga 100% dari rencana bahkan lebih, sedangkan realisasi belanja pembangunan rata-rata hanya mencapai angka 78% bahkan ada yang dibawah 50%. Hal ini menandakan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kurang mampu merealisasikan rencana untuk belanja pembangunan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa realisasi APBD menjadi terlambat sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena seringnya terjadi tarik ulur antara legislatif dan eksekutif sehingga penandatanganan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menjadi terlambat. Keterlambatan tersebut berdampak terhadap proses berikutnya yang juga menjadi terhambat. Selain itu, terdapat beberapa dugaan awal kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam penyusunan rencana APBD, diantaranya adalah :

- Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering agak terlambat dipahami oleh penyelenggara keuangan di daerah;
- Pengesahan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat terkadang memakan waktu cukup lama;
- Buku Petunjuk Pelaksanaan sering berubah-ubah dan terlambat disampaikan ke daerah;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah Daerah belum memadai/belum optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan APBD;

IV. Rekomendasi

- Penyebab keterlambatan realisasi APBD secara umum adalah pada proses kesepakatan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Oleh karena itu masing-

masing pihak seharusnya lebih taat dan memegang teguh pedoman jadwal penyusunan APBD dengan satu tekad mempercepat roda dan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pada setiap kendala/hambatan dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD, agar dilakukan inventarisasi kendala/hambatan dan solusinya. Dengan adanya inventarisasi tersebut, diharapkan dapat diantisipasi kendala/hambatan yang sama untuk tahun-tahun berikutnya.
- Perlu dibentuk Tim Pemantau atau Satuan Tugas di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas mencermati pelaksanaan APBD, baik dalam masa proses penyusunan, pengesahan maupun pelaksanaan APBD. Dengan adanya tim ini diharapkan kendala penyusunan APBD dapat segera terpantau dan dilaksanakan solusinya, hingga kendala realisasi pendapatan dan belanja daerah dapat diketahui dan diantisipasi.

Lampiran

LAMPIRAN 3
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2003-2006

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Total Tahun 2003	Total Tahun 2004 *	Tahun 2005 **)				Total Tahun 2005 **	Tahun 2006 ***)		
			TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW. II	TRW. III
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	19,635,019.63	21,848,356.52	5,927,916.40	6,113,260.74	6,525,441.38	7,439,355.34	26,005,973.86	7,663,002.32	7,800,545.83	8,045,607.29
A. MAKANAN/ <i>Food</i>	12,382,444.34	13,475,171.63	3,627,768.38	3,741,782.53	3,992,583.45	4,567,289.99	15,929,424.35	4,692,795.91	4,742,977.01	4,872,478.41
B. NON MAKANAN/ <i>Non-Food</i>	7,252,575.29	8,373,184.89	2,300,148.02	2,371,478.21	2,532,857.93	2,872,065.35	10,076,549.51	2,970,206.40	3,057,568.81	3,173,128.88
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ <i>Non-profit Institution</i>	370,058.81	413,639.47	103,933.94	110,649.08	122,148.44	135,951.77	472,683.23	138,255.99	140,779.05	144,162.59
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	4,013,616.56	4,395,399.23	1,175,743.13	1,223,576.83	1,293,697.46	1,457,347.67	5,150,365.09	1,508,193.15	1,548,720.11	1,602,757.02
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ <i>Gross Domestic Fixed capital Formation</i>	6,165,721.29	6,752,576.00	1,869,847.11	1,938,574.48	1,985,536.76	2,259,526.74	8,053,485.09	2,314,994.68	2,383,315.32	2,470,908.50
5. PERUBAHAN STOK/ <i>Change in Stock</i>	184,902.33	-348,225.81	-186,794.03	-208,023.42	-248,366.96	-255,958.38	-899,142.79	-285,287.82	-312,286.50	-333,399.09
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Export of Goods and Services</i>	4,194,761.65	5,906,194.56	1,735,068.32	1,918,957.15	2,101,243.29	2,302,527.92	8,057,796.68	2,388,731.29	2,485,191.87	2,641,373.28
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Less Import of Goods and Services</i>	1,433,397.32	1,609,294.05	471,691.25	512,668.17	553,880.52	628,351.98	2,166,591.92	645,706.82	662,593.47	685,246.83
Jumlah/ Total	33,130,682.95	37,358,645.92	10,154,023.62	10,584,326.69	11,225,819.85	12,710,399.08	44,674,569.24	13,082,182.78	13,383,672.19	13,886,162.76

Catatan : *) Angka Diperbaiki, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 4
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2003-2006

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Total 2003	Total 2004 *	Tahun 2005**)				Total 2005 **	Tahun 2006 ***)		
			TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW II	TRW. III
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	15,030,491.04	15,605,371.33	3,987,034.71	4,044,296.85	4,120,844.63	4,209,711.63	16,361,887.82	4,258,880.78	4,311,278.72	4,368,363.89
A. MAKANAN/ <i>Food</i>	9,754,535.59	10,007,178.06	2,541,084.26	2,582,017.43	2,637,272.60	2,703,222.21	10,463,596.50	2,732,957.65	2,763,840.07	2,797,558.92
B. NON MAKANAN/ <i>Non-Food</i>	5,275,955.45	5,598,193.27	1,445,950.45	1,462,279.42	1,483,572.03	1,506,489.42	5,898,291.32	1,525,923.13	1,547,438.65	1,570,804.97
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ <i>Non-profit Institution</i>	267,533.62	276,067.94	67,434.91	68,763.38	70,737.55	72,398.04	279,333.88	72,665.91	72,905.71	73,357.72
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	3,282,955.96	3,354,524.41	852,164.07	866,732.67	880,170.26	897,353.79	3,496,420.79	910,006.48	919,743.55	930,688.50
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ <i>Gross Domestic Fixed capital Formation</i>	4,934,280.76	5,091,190.89	1,315,721.63	1,333,932.97	1,356,499.42	1,381,980.57	5,388,134.59	1,399,669.92	1,418,005.60	1,437,574.07
5. PERUBAHAN STOK/ <i>Change in Stock</i>	147,125.41	-260,750.40	-133,887.36	-143,759.20	-166,729.82	-166,625.56	-611,001.94	-185,202.39	-199,321.94	-209,481.65
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Export of Goods and Services</i>	3,723,589.06	4,808,934.75	1,363,966.87	1,418,713.57	1,502,673.54	1,536,466.72	5,821,820.70	1,568,578.87	1,606,695.34	1,671,123.82
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ <i>Less Import of Goods and Services</i>	1,239,194.21	1,297,202.35	351,945.32	379,050.32	408,828.70	437,290.97	1,577,115.31	440,045.90	443,962.31	449,112.27
Jumlah/ Total	26,146,781.64	27,578,136.57	7,100,489.51	7,209,629.92	7,355,366.88	7,493,994.22	29,159,480.53	7,584,553.67	7,685,344.66	7,822,514.08

Catatan : *) Angka Diperbaiki, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 5
Indeks Harga Konsumen Kota Padang (Tahun Dasar 2002)

Akhir Periode	BAHAN MAKANAN	MAKANAN JADI	PERUMAHAN	SANDANG	KESEHATAN	PENDIDIKAN	TRANSPORT	U M U M	
								IHK	Perub. (%)
2004									
Jan	104.46	110.44	114.58	110.52	104.58	112.90	104.30	108.45	0.72%
Feb	104.55	110.38	115.29	109.54	103.07	112.72	104.30	108.47	0.02%
Mar	106.05	111.20	116.47	109.84	102.63	111.83	104.41	109.28	0.75%
Apr	110.47	111.70	117.14	110.38	106.15	111.83	104.41	111.12	1.68%
Mei	110.38	111.54	117.00	110.62	106.18	111.92	108.49	111.59	0.42%
Jun	111.21	112.00	117.10	111.68	106.50	111.92	108.52	112.04	0.40%
Jul	112.98	113.43	118.06	112.48	106.58	111.92	108.53	113.10	0.95%
Agst	108.70	113.88	118.43	113.00	106.58	112.08	109.05	112.02	-0.95%
Sep	106.76	113.93	118.83	112.84	106.93	115.85	109.05	111.73	-0.26%
Okt	106.96	114.22	118.87	113.84	106.96	116.12	109.05	111.94	0.19%
Nov	109.81	116.17	119.16	116.20	106.96	116.12	109.89	113.52	1.41%
Des	113.05	118.08	120.51	116.90	106.45	116.12	109.92	115.18	1.46%
2005									
Jan	120.94	118.25	121.35	116.51	106.45	116.12	110.42	117.91	2.37%
Feb	120.78	118.20	121.53	116.36	106.53	116.10	110.61	117.90	-0.01%
Mar	127.41	122.95	121.86	117.95	106.53	116.49	124.76	123.01	4.33%
Apr	125.57	125.11	122.08	118.04	106.53	116.49	124.76	122.84	0.14%
Mei	121.11	124.33	122.01	118.28	108.37	116.48	125.49	121.79	-0.85%
Jun	120.46	125.02	121.95	118.50	108.45	116.48	125.49	121.39	-0.33%
Jul	124.40	125.13	121.98	119.66	108.10	116.63	125.49	122.75	1.12%
Agst	124.83	126.50	122.19	120.76	107.93	116.83	125.55	123.25	0.41%
Sep	127.39	128.28	122.50	122.79	109.45	116.91	126.22	124.73	1.20%
Okt	142.24	133.67	131.95	126.26	110.22	118.81	164.86	138.12	10.74%
Nov	148.26	135.72	132.35	126.80	111.89	126.55	164.90	141.04	2.11%
Des	140.68	135.62	132.57	127.99	111.97	126.55	164.86	138.76	-1.62%
2006									
Jan	136.36	135.76	132.49	129.59	112.60	126.56	164.57	137.50	-0.91%
Feb	136.50	139.49	135.58	129.26	113.68	126.56	165.29	138.90	1.02%
Mar	138.79	142.98	135.60	128.70	118.15	126.69	165.65	140.39	1.07%
Apr	135.44	143.00	138.68	130.90	118.15	126.88	165.66	140.13	-0.19%
Mei	135.08	143.00	139.01	135.39	117.68	127.23	166.00	140.47	0.24%
Jun	135.53	143.05	142.13	135.50	117.94	128.68	166.17	141.38	0.65%
Jul	136.51	147.40	142.89	137.02	118.19	128.76	166.22	142.70	0.93%
Agst	130.75	147.42	143.09	138.15	118.12	135.70	166.31	141.45	-0.88%
Sep	134.67	147.31	143.76	136.58	118.32	135.71	166.33	142.70	0.88%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat

LAMPIRAN 6
IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa
(Tahun Dasar 2002)

Kelompok / Subkelompok	IHK		Perubahan q-t-q
	Jun 2006	Sept 2006	
UMUM	141.38	142.7	0.93%
BAHAN MAKANAN	135.53	134.67	-0.63%
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	155.1	155.47	0.24%
Daging dan Hasil-hasilnya	112.71	117.01	3.82%
Ikan Segar	138.92	140.83	1.37%
Ikan Diawetkan	119.01	113.96	-4.24%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	119.01	122.2	2.68%
Sayur-sayuran	154.67	137.59	-11.04%
Kacang-kacangan	166.9	169.08	1.31%
Buah-buahan	145.69	137.05	-5.93%
Bumbu-bumbuan	111.24	112.37	1.02%
Lemak & Minyak	126.57	125.61	-0.76%
Bahan makanan lainnya	104.64	110.85	5.93%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	143.05	147.31	2.98%
Makanan Jadi	148.96	156.98	5.38%
Minuman yang Tidak Beralkohol	142.45	142.02	-0.30%
Tembakau & Minuman Beralkohol	132.87	132.87	0.00%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	142.13	143.76	1.15%
Biaya Tempat Tinggal	134.09	136.63	1.89%
Bahan Bakar, Penerangan & Air	177.79	177.8	0.01%
Perlengkapan Rumah Tangga	117.08	119.08	1.71%
Penyelenggaraan Rumah Tangga	112.26	113.23	0.86%
SANDANG	135.5	136.58	0.80%
Sandang Laki-laki	116.07	117.61	1.33%
Sandang Wanita	124.76	125.43	0.54%
Sandang Anak-anak	123.49	125.4	1.55%
Barang Pribadi, Sandang lainnya	173.69	174.35	0.38%
KESEHATAN	117.94	118.32	0.32%
Jasa Kesehatan	135.93	135.93	0.00%
Obat-obatan	117.19	117.19	0.00%
Jasa Perawatan & Jasmani	141.90	147.89	4.22%
Perawatan Jasmani & Kosmetik	109.23	109.36	0.12%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	128.68	135.71	5.46%
Jasa Pendidikan	140.83	152.73	8.45%
Kursus Pelatihan	102.93	102.93	0.00%
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	120.03	119.07	-0.80%
Rekreasi	108.36	108.77	0.38%
Olahraga	108.20	112.76	4.21%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	166.17	166.33	0.10%
Transportasi	181.15	181.32	0.09%
Komunikasi & Pengiriman	122.44	122.44	0.00%
Sarana & Penunjang Transportasi	146.57	147.21	0.44%
Jasa Keuangan	139.00	139.54	0.39%